

**PENYEBAB KEGAGALAN MEDIASI SASG (SPECIAL ADVISER TO THE UN
SECRETARY-GENERAL ON CYPRUS) DALAM KONFLIK CYPRIOTS
PERIODE 2008 - 2017**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Konsentrasi
*International Security and Peace***



Oleh:

KRISHNA WASUDEWA SUBIAKTA

135120401111030

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Krishna Wasudewa Subiakta
NIM : 135120401111030
Jurusan : Hubungan Internasional
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Universitas Brawijaya
Judul : Penyebab Kegagalan Mediasi SASG (Special Adviser to the UN
Secretary-General on Cyprus) dalam Konflik Cypriots Periode 2008 -
2017

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal lain yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan tertera dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya tidak sesuai dengan pernyataan diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya hasilkan dari skripsi tersebut.

Malang, 3 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Krishna Wasudewa Subiakta

NIM. 135120401111030

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**IDENTITAS PRIBADI**

Nama	: Krishna Wasudewa Subiakta
Tempat/Tanggal Lahir	: Denpasar/11 Mei 1995
Agama	: Hindu
Status	: Mahasiswa
Alamat Asal	: Jl. Yudistira No. 8 Desa Megati, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, Bali
Alamat di Malang	: Jl. Mayjen Panjaitan Gg. XVII/1 Klojen, Malang
Telp	: 085211050123
Email	: krishnawasudewa@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Universitas Brawijaya (2013-...)
- SMA Negeri 1 Kuta (2010-2013)
- SMP Negeri 1 Kuta (2007-2010)
- SD Negeri 4 Tuban (2001-2007)

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYEBAB KEGAGALAN MEDIASI SASG (SPECIAL ADVISER TO THE UN SECRETARY-GENERAL ON CYPRUS) DALAM KONFLIK CYPRIOTS PERIODE 2008 - 2017

SKRIPSI

Disusun oleh:

Krishna Wasudewa Subiakta

NIM 135120401111030

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mely Noviryani, S.Sos., M.A

NIK. 2007077409112001

Ni Komang Desy S. Arya Pinatih, S.IP., M.Si.

NIK. 2011028412302001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt

NIP. 197802202010121001

LEMBAR PENGESAHAN

PENYEBAB KEGAGALAN MEDIASI SASG (SPECIAL ADVISER TO THE UN SECRETARY-GENERAL ON CYPRUS) DALAM KONFLIK CYPRIOTS PERIODE 2008 - 2017

SKRIPSI

Disusun oleh:
Krishna Wasudewa Subiakta
NIM 135120401111030

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian sarjana pada tanggal 16 Oktober 2018
Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Muhammad Riza Hanafi, S.IP., MIA.
NIK. 80020711110413

Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M. Si.
NIK. 2013098602142001

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II

Mely Noviryani, S.Sos., M.A
NIK. 2007077409112001

Ni Komang Desy S. Arya Pinatih, S.IP., M.Si.
NIK. 2011028412302001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam proses menyusun skripsi ini saya telah melalui banyak sekali tantangan dan kesulitan. Namun dengan adanya pihak-pihak yang terus-menerus membantu dan memberikan dukungan kepada saya, maka saya merasa terbantu dan dimudahkan sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Maka dari itu, dengan ini saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi kepada pihak-pihak dibawah ini:

1. **Tuhan Yang Maha Esa:** Atas *Asung Kerta Wara Nugraha-Nya* sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. **Keluarga kecil:** Papa Drs. I Wayan Subiakta, Mama Connie Fientje Walukouw, dan adik Devi Subhadra Subiakta atas dukungan yang tiada henti diberikan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi.
3. **Keluarga besar:** Penulis tidak dapat menuliskannya satu per satu, namun terkhusus bagi Om F. Susianto dan Ma Sandra Walukouw yang telah penulis anggap sebagai orang tua sendiri. Penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan dan berharap dapat membalas kebaikan yang telah diberikan di masa depan.
4. **Dosen Pembimbing Utama:** Yth. Ibu Mely Noviryani, S.Sos., M.A yang telah dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis hingga ke tahap penyelesaian skripsi ini.
5. **Dosen Pembimbing Pendamping:** Yth. Ibu Ni Komang Desy S. Arya Pinatih, S.IP., M.Si. yang telah membantu penulis menyempurnakan skripsi ini.

6. **Dosen Penguji:** Yth. Bapak Muhammad Riza Hanafi, S.IP., MIA. dan Yth. Ibu Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M. Si. yang telah memberikan saran-saran berarti sewaktu ujian komprehensif lalu.
7. Segenap keluarga besar **Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Radio 101.3 MFM, FORMASI UB, HIMAHU UB**, teman-teman lomba debat, dan teman-teman seperjuangan yang telah membantu perkembangan diri penulis serta mengenal Malang lebih dalam.
8. **Komposer:** Terutama dari era *Viennese Classic* seperti Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, dan Franz Schubert. Termasuk komposer dari era lainnya seperti Johann Sebastian Bach, Frédéric François Chopin, dan Johannes Brahms. Komposer-komposer tersebut telah menemani penulis dengan mahakarya mereka masing-masing, sehingga penulis merasa nyaman mengerjakan skripsi ini.

Demikian lembar persembahan penulis, tidak lupa rasa terimakasih penulis ucapkan terhadap pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di UB selama ini. Penulis mendoakan agar semua perbuatan baik anda mendapatkan berkah yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terimakasih.

Krishna Wasudewa Subiakta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas *Asung Kerta Wara Nugraha-Nya* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi berjudul Penyebab Kegagalan Mediasi SASG (Special Adviser to the UN Secretary-General on Cyprus) dalam Konflik Cypriots Periode 2008 - 2017 ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana HI (Hubungan Internasional) pada FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) dengan peminatan ISP (*International Security and Peace*).

Skripsi ini berisi tentang analisis faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi oleh SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017. Dalam penyusunan karya ini tentu banyak pihak yang terlibat, baik secara akademik maupun non-akademik. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Meski telah disusun secara maksimal, namun penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat menjadi sarana dalam memahami konflik Cypriots secara historis dan praktis.

Malang, 31 Oktober 2018

Penulis

ABSTRAK

Konflik Cypriots yang telah berlangsung sejak 1963 merupakan salah satu konflik tertua yang terus berlangsung hingga saat ini. Disebut demikian karena belum terjadi resolusi konflik hingga saat ini. Konflik tersebut melibatkan Greek Cypriots dan Turkish Cypriots sebagai aktor utama.

PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) sebagai "penjaga perdamaian dunia" telah berulang kali berusaha untuk membuat konflik ini mencapai resolusi konflik, hal ini dibuktikan dengan adanya pengiriman UNFICYP (Pasukan Perdamaian PBB di Siprus) sejak 1964 hingga saat ini. Hal tersebut ditambah dengan adanya pengiriman mediator yang tergabung kedalam good offices PBB di Siprus pada tahun yang sama hingga saat ini. Namun sayangnya belum terdapat resolusi konflik Cypriots hingga saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kegagalan mediasi oleh SASG (Perwakilan Khusus Sekjen PBB di Siprus) dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017. Sebuah periode yang ditandai dengan terpilihnya Presiden ROC (Republik Siprus) dari AKEL (sebuah partai sayap kiri Siprus yang pro reunifikasi) serta keterbukaan Turkish Cypriots untuk reunifikasi yang terus menguat sejak Siprus bergabung dengan UE (Uni Eropa) pada 1 Mei 2004 namun diakhiri dengan kegagalan mediasi untuk kesekian kalinya dalam konferensi Siprus di Crans Montana, Swiss pada 7 Juli 2017. Menggunakan konsep determinan kesuksesan dan kegagalan mediasi internasional milik Marieke Kleiboer yang menekankan pada 2 variabel, yaitu contextual dan process.

Kata kunci: Konflik, Cypriots, Greek Cypriots, Turkish Cypriots, PBB, SASG, kegagalan mediasi internasional

ABSTRACT

The Cypriots conflict is an ongoing conflict established in 1963, make it as the current oldest living conflict yet to be resolved which involved Greek Cypriots and Turkish Cypriots as the main actors.

The UN (United Nations) known as "the world peacekeeper" has been attempted to make disputants reached a conflict resolution, it has been proven by deploying UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) since 1964 until now. UN's Secretary General has also been authorized to send its mediators (part of UN's good offices) at the same time as UNFICYP yet they can't help disputants to reach a conflict resolution.

The purposes of this research were to explain several factors leading to the mediation failure by SASG (Special Adviser to the UN Secretary-General on Cyprus) thoroughly during 2008 - 2017. A period marked by AKEL's winning (a left-wing party who supported reunification) at 2008 ROC presidential election and the increasing of Turkish Cypriots' support due to acceptance of ROC (Republic of Cyprus) as the new EU's member at 1 May 2004 but ended abruptly in the Conference of Cyprus held in Crans Montana, Switzerland on 7 July 2017. By using determinants of success and failure of international mediation concept by Marieke Kleiboer who emphasized it in 2 variables, which were contextual and process variables.

Keywords: Conflicts, Cypriots, Greek Cypriots, Turkish Cypriots, UN, SASG, failure of international mediation

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II: KERANGKA PENELITIAN	8
2.1 Studi Terdahulu	8
2.2 Kerangka Konseptual	15
2.2.1 Mediasi Internasional	15
2.2.2 Penyebab Kegagalan Mediasi Internasional	17
2.2.3 Operasionalisasi Konsep	33
2.3 Alur Pemikiran	48
2.4 Argumen Utama	49
BAB III: METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	50
3.3 Teknik Pengumpulan Data	51
3.4 Teknik Analisis Data	51
3.5 Sistematika Penulisan	52
BAB IV: GAMBARAN UMUM MEDIASI SASG DALAM KONFLIK CYPRIOTS PERIODE 2008 - 2017	54
4.1 Mediasi Konflik Cypriots (Pra-2008)	57
4.2 Mediasi Konflik Cypriots (2008 - 2017)	74
BAB V: ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN MEDIASI SASG DALAM KONFLIK CYPRIOTS DENGAN KONSEP DETERMINAN KESUKSESAN DAN KEGAGALAN	88
5.1 <i>Contextual Variable</i>	89
5.1.1 <i>Characteristics of the Dispute</i>	89

5.1.2 <i>Parties and their Interrelationship</i>	99
5.1.3 <i>Characteristics of the Mediator</i>	109
5.1.4 <i>The International Context</i>	115
5.2 <i>Process Variable</i>	117
5.2.1 <i>Communicator</i>	118
5.2.2 <i>Formulator</i>	118
BAB VI: PENUTUP	120
6.1 Kesimpulan	120
6.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Siprus <i>de facto</i>	55
--	----



DAFTAR TABEL

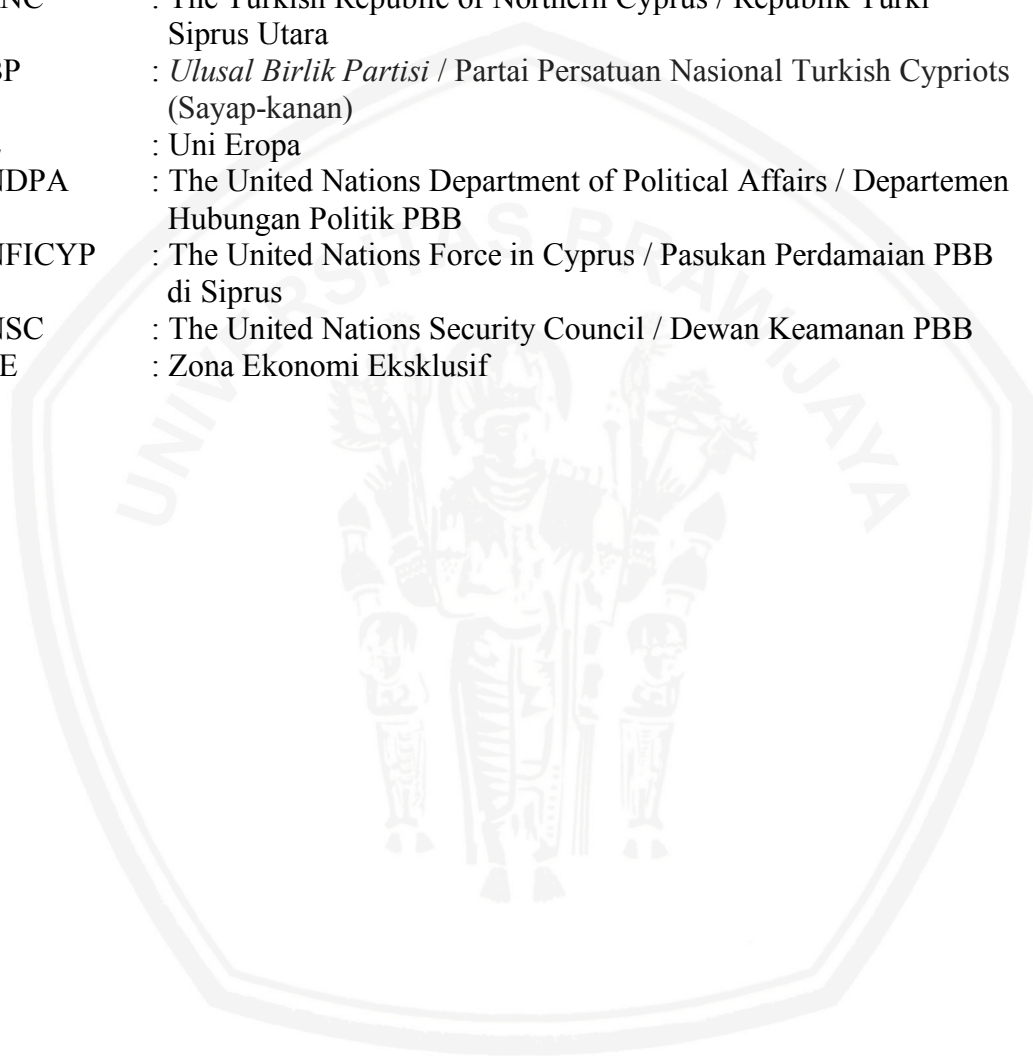
Tabel 1. Operasionalisasi Konsep.....	41
--	----



DAFTAR SINGKATAN

AKEL	: <i>Anorthotikó Kómma Ergazómenou Laoú</i> / Partai Pekerja Progresif Siprus (Sayap-kiri)
AS	: Amerika Serikat
BiH	: Bosnia dan Herzegovina
BFC	: British Forces Cyprus / Pasukan Britania Raya Siprus
CTP	: <i>Cumhuriyetçi Türk Partisi</i> / Partai Republik Turki di Siprus Utara (Kiri-tengah)
DIKO	: <i>Dimokratikó Kómma</i> / Partai Demokrat Siprus (Kanan-tengah)
DISY	: <i>Dimokratikós Sinagermós</i> / Partai Persatuan Demokrat Siprus (Kanan-tengah)
Dubes	: Duta Besar
ECJ	: European Court of Justice / Pengadilan Tinggi UE
EF	: <i>Ethnikí Frouará</i> / Pasukan ROC
ELAM	: <i>Ethniko Laiko Metopo</i> / Front Populer Nasional Siprus (Sayap-kanan)
ELDYK	: <i>Ellinikí Dýnami Kýprou</i> / Pasukan Yunani di Siprus
EOKA	: <i>Ethniki Organosis Kyprion Agoniston</i> / Organisasi Nasional Pejuang Cypriots
EOKA B	: <i>Ethniki Organosis Kyprion Agoniston B</i> / Organisasi Nasional Pejuang Cypriots B
EVROKO	: <i>Evropaiko Komma</i> / Partai Eropa (Sayap-kanan)
HAM	: Hak Asasi Manusia
IGO	: <i>Inter-Governmental Organization</i> / Organisasi Antar Pemerintahan
INTERFET	: <i>The International Force East Timor</i> / Pasukan Internasional di Timor Timur
Kedubes	: Kedutaan Besar
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
KTBK	: <i>Kıbrıs'taki Türk Silahlı Kuvvetleri</i> / Pasukan Komando Perdamaian Turki di Siprus
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
Menlu	: Menteri Luar Negeri
NATO	: The North Atlantic Treaty Organization / Pakta Pertahanan Atlantik Utara
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i> / Organisasi Non-Pemerintahan
NUPI	: The Norwegian Institute of International Affairs / Institusi Hubungan Luar Negeri Norwegia
OKTY	: <i>Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi</i> / Pemerintahan Otonom Turkish Cypriots
P-5	: <i>The Permanent Five</i> / Anggota Permanen DK PBB
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemilu	: Pemilihan Umum
PM	: Perdana Menteri
ROC	: The Republic of Cyprus / Republik Siprus
SASG	: Special Adviser to the UN Secretary-General on Cyprus / Penasihat Khusus Sekjen PBB mengenai Permasalahan Siprus

SBA	: <i>Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia</i> / Wilayah Luar Negeri Britania Raya di Siprus
SDA	: Sumber Daya Alam
Sekjen PBB	: Sekretaris Jenderal PBB
TDP	: <i>Toplumcu Demokrasi Partisi</i> / Partai Demokrasi Komunal Siprus Utara (Kiri-tengah)
TMT	: <i>Türk Mukavemet Teşkilatı</i> / Organisasi Perlawanan Turkish Cypriots
TRNC	: The Turkish Republic of Northern Cyprus / Republik Turki Siprus Utara
UBP	: <i>Ulusal Birlik Partisi</i> / Partai Persatuan Nasional Turkish Cypriots (Sayap-kanan)
UE	: Uni Eropa
UNDPA	: The United Nations Department of Political Affairs / Departemen Hubungan Politik PBB
UNFICYP	: The United Nations Force in Cyprus / Pasukan Perdamaian PBB di Siprus
UNSC	: The United Nations Security Council / Dewan Keamanan PBB
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik yang terjadi di Siprus antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot merupakan salah satu konflik terlama karena masih berlangsung sejak 1963 atau selama 55 tahun hingga saat ini. Greek Cypriot adalah penduduk Siprus yang mempunyai garis keturunan Yunani mayoritas beragama Kristen Ortodoks dan berkulit putih sedangkan Turkish Cypriot merupakan penduduk Siprus yang mempunyai garis keturunan Ottoman Turki mayoritas beragama Islam Sunni dan berasal dari wilayah Ottoman Turki (Fisher R. J., 2001a: 269). Penulis menggunakan konflik Cypriots sebagai studi kasus. Pihak ketiga yang berperan untuk menjembatani keinginan mereka adalah SASG (Global Peace Operations Review, 2014).

Pada 21 Maret 2008. Dibawah pengawasan PBB, presiden terpilih ROC, Demetris Christofias dan Presiden Turkish Cypriot, Mehmet Ali Talat yang sama-sama berasal dari partai sayap-kiri bertemu untuk membicarakan penyelesaian konflik antara Greek Cypriot (penduduk Siprus keturunan Yunani) dan Turkish Cypriot (penduduk Siprus keturunan Turki) secara resmi di *buffer zone* (zona netral) PBB. Christofias baru saja memenangkan pemilu presiden Siprus pada Februari tahun yang sama atas Tassos Papadopoulos, yang memimpin Greek Cypriot di Republik Siprus untuk menolak *Annan Plan for Cyprus* pada 2004. Hasil dari pertemuan ini ialah kedua pemimpin tersebut sepakat untuk melaksanakan pembicaraan serius selama 3 (tiga) bulan kedepan. Keseriusan tersebut ditandai dengan akan dibukanya Jl. Ledra sebagai *confidence building measure* (langkah mengurangi ketegangan diantara kedua belah pihak) (UN, 2008). Pada saat yang sama, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan beberapa langkah berarti untuk bernegosiasi, termasuk

pembentukan *working groups* (kelompok kerja) dan *technical committees* (komite teknis) untuk berdiskusi isu-isu terkait kebudayaan dan bentuk pemerintahan ideal kedepannya (Security Council Report, 2018).

Pada 11 Juli 2008, menindaklanjuti pertemuan 21 Maret 2008. Sekjen PBB, Ban Ki-moon menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer sebagai SASG. Penunjukan Downer dilakukan ditengah tumbuhnya optimisme perdamaian antara pemimpin Greek Cypriot dan Turkish Cypriot setelah konflik yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun (UN, 2008).

Setelah bertugas selama 6 (enam) tahun, akhirnya SASG Downer mengakhiri masa jabatannya pada 2014 dengan *status quo* (belum ada solusi konkret mengenai Siprus) (UNSC, 2014). Kemudian, pada 22 Agustus 2014, Sekjen PBB menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide sebagai SASG PBB menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Downer karena Downer diangkat sebagai Perwakilan Tinggi Australia bagi Britania Raya (UN, 2014). Pada 5 September 2014, Eide melakukan kunjungan pertamanya ke Siprus untuk bertemu presiden Nicos Anastasiades (ROC) dan Derviş Eroğlu (Turkish Cypriot) secara terpisah. Pertemuan bersama ROC - Turkish Cypriot kembali berlanjut pada tanggal 17 bulan yang sama sebelum dihentikan secara unilateral oleh Anastasiades pada 7 Oktober 2014 setelah Turki mengumumkan untuk mengadakan survei seismik di ZEE ROC. Survei tersebut dijalankan oleh 1 kapal eksplorasi dan dikawal oleh 2 kapal perang Turki pada 20 Oktober 2014. (Security Council Report, 2014)

Pada 15 Mei 2015, SASG Eide kembali mempertemukan kedua pemimpin dalam konflik ini yaitu Nicos Anastasiades (ROC) dan Mustafa Akıncı (Turkish Cypriot). Anastasiades dan sepakat untuk bekerja tanpa mengenal lelah agar tercapai kesepakatan komprehensif mengenai Siprus sesegera mungkin. Dalam rentang waktu 15 Mei hingga 11 Agustus 2017, telah terjadi lebih dari 150 pertemuan antara delegasi Greek Cypriot dan

Turkish Cypriot dengan difasilitasi PBB dengan 70 pertemuan dihadiri langsung oleh Anastasiades dan Akıncı. Selain itu, terdapat 369 pertemuan yang dihadiri oleh tim ahli untuk mempercepat proses penyelesaian konflik Siprus. Pada saat itu, proses pembicaraan mulai mengarah kepada *power-sharing* (pembagian kekuasaan) dalam bentuk pemerintahan federal, termasuk didalamnya adalah legislasi federal, pengadilan federal, aspek keamanan internal, hingga pembahasan satu kesatuan kewarganegaraan Siprus. Khusus mengenai hak kepemilikan properti untuk Cypriots (baik Greek Cypriot atau Turkish Cypriot), kedua belah pihak sepakat bahwa para hak kepemilikan perseorangan akan dihormati sekaligus menyatakan bahwa akan terdapat beberapa aturan alternatif yang mengatur hal tersebut. Mereka juga sepakat untuk memberikan beberapa pilihan bagi rakyat untuk memilih apakah akan mendapatkan kompensasi atau tukar tambah terkait hak kepemilikan properti (UNSC, 2017).

Kemudian, dalam lanjutan pertemuan ROC-Turkish Cypriot di Jenewa pada 9 - 12 Januari 2017 dan beberapa pertemuan terpisah sepanjang Januari - Februari 2017, kedua pihak tidak mencapai kata sepakat dalam hal batas wilayah. Terdapat perbedaan dalam peta yang dipresentasikan kedua belah pihak, pihak ROC memasukkan Morphou kedalam peta mereka walaupun secara *de facto* wilayah tersebut berada dibawah administrasi Turkish Cypriot. Selain itu, pertemuan tidak mencapai kata sepakat karena Turki bersikeras untuk tetap menjalankan perannya sebagai *security guarantors* Turkish Cypriot di utara Siprus walaupun resolusi konflik telah terjadi serta meminta persamaan hak bagi Turkish Cypriot sesuai 4 prinsip kebebasan UE (perpindahan penduduk, barang, jasa, dan kepemilikan perseorangan). Suatu hal yang ditolak Anastasiades, sehingga delegasi Turkish Cypriot dan Turki memutuskan untuk meninggalkan pertemuan tersebut dan membuat mediasi tidak mencapai kesepakatan apapun (Morelli, 2018: 17 - 22).

Terakhir, dalam laporan Sekjen PBB kepada DK PBB bernomor S/2017/814 pada 28 September 2017. Sekjen PBB menyampaikan progres terakhir perundingan antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot bertajuk the Conference on Cyprus (Konferensi Siprus) pada 28 Juni - 7 Juli di Crans-Montana, Swiss. Namun keenganan kedua delegasi untuk menyepakati satu poin kesepakatan sebelum seluruh poin disetujui menyebabkan mediasi kembali tidak mencapai resolusi konflik. Isu utama dalam konferensi ini yang tidak terselesaikan adalah *security and guarantees*. Mengingat trauma yang dirasakan Cypriots pra-1974, sehingga menurut Sekjen PBB menyarankan adanya tinjauan ulang terhadap pasal IV Treaty of Guarantees (mengenai pengaturan hak intervensi *guarantors*) antara para pemimpin tertinggi Cypriots bersama Yunani-Turki-Britania Raya selaku *guarantors*. Selama 2008 – 2017, belum terdapat resolusi konflik yang tercapai antara pihak Greek Cypriot dan Turkish Cypriot karena Greek Cypriot dan Turkish Cypriot tidak mencapai kata sepakat pada isu-isu krusial seperti *security* (e.g. penarikan mundur pasukan Turki dari Siprus) dan *guarantees* (e.g. apakah Siprus memerlukan bantuan Yunani-Turki-Britania Raya untuk menjaga keamanan negara). Beberapa progres positif terjadi selama mediasi yang berlangsung di periode tersebut, yaitu dalam hal partisipasi (e.g. partisipasi politik dan HAM) dan hak kepemilikan properti Cypriots (UNSC, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulisan skripsi ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 – 2017. *Ripeness* yang terbentuk ketika Christofias terpilih sebagai presiden ROC pada 2008 namun kolaps ketika terjadi tarik ulur kepentingan antara ROC-Turkish Cypriot, terkhusus dalam isu *security guarantees*. Hal ini diperparah dengan ketidakmampuan PBB dalam menyudahi keberadaan *security guarantors* yang akan membuat Siprus betul-betul merdeka tanpa adanya intervensi negara asing dalam pemerintahannya, membuat PBB seperti tidak mempunyai *power* dalam konflik Siprus.

Kleiboer menyatakan bahwa cukup sulit untuk mengatakan sebuah mediasi sukses atau gagal mengingat para ahli HI sejauh ini belum mengartikulasikan teori mediasi secara eksplisit. Sehingga dia menawarkan konsepnya untuk menjelaskan bagaimana mediasi dinyatakan sukses terlebih dahulu untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan mediasi tersebut. Karena kemampuan mediator untuk menggunakan *power* (e.g. sumber daya ekonomi, politik, dan militer yang dimilikinya) secara bijak dalam memanipulasi *disputants* menjadi penting untuk mencapai kesuksesan mediasi. Maka, **kesuksesan mediasi** ditentukan oleh ukuran besaran antara kombinasi *resources* (sumber daya / alat dukung) yang tersedia baginya dan *skills* (keterampilan) yang mereka gunakan. Artinya adalah *impartiality* (sikap netral) mediator dalam konflik tidak terlalu penting dalam menentukan mediasi, justru kemampuannya dalam memiliki *leverage* (daya tawar) lebih menentukan dalam rangka mendorong *disputants* agar mereka segera menyetujui proses dan perjanjian perdamaian. Sehingga, berkaca kepada analisisnya maka **kegagalan mediasi** ditentukan oleh kurangnya *resources* dan *skills* yang dimiliki mediator (Kleiboer, 1996: 370 - 384).

Fakta-fakta inilah yang menjadi latar belakang dan alasan ketertarikan penulis mengambil topik tentang “Penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 – 2017” sebagai tulisan akhir penulis untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh gelar sarjana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam skripsi ini penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah faktor yang cenderung menjadi penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 – 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 – 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkhusus ilmu HI (Hubungan Internasional). Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian pada topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi yang digunakan SASG dalam upaya mediasi konflik Cypriots serta mempromosikan upaya *good offices* dalam menyelesaikan konflik di Siprus.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 studi terdahulu yang berkontribusi terhadap isu pembahasan. Masing-masing studi terdahulu yang penulis lampirkan memperlihatkan bagaimana suatu mediasi dapat dinyatakan berhasil dan gagal beserta analisis detail mengenai faktor penyebab kegagalannya.

Pertama, penulis menggunakan jurnal karya Reina Zenelaj, Nimet Beriker, dan Emre Hatipoglu berjudul “*Determinants of Mediation Success in Post-Conflict Bosnia: A Focused Comparison*” sebagai studi terdahulu pertama.

Studi terdahulu pertama penulis memiliki persamaan topik yang dibahas yaitu mengenai cara determinasi kegagalan mediasi namun dalam penelitian studi terdahulu pertama yang digunakan penulis memiliki perbedaan objek penelitian serta aktor yang terlibat didalamnya, dimana negara yang menjadi objek penelitian studi terdahulu pertama adalah BiH serta aktor yang terlibat didalamnya adalah UE - AS selaku mediator pertama dan Turki selaku mediator kedua. Studi terdahulu pertama berguna bagi penulis karena dalam tulisan tersebut, studi kasus yang dianalisis menunjukkan perbandingan antara mediasi yang diluncurkan oleh UE-AS serta mediasi yang diluncurkan oleh Turki dengan melihat kepada *the characteristics of dispute, the parties and their interrelationship, the characteristics of mediator*, dan *the mediation strategies*.

Dalam tulisannya, Zenelaj dkk. menyatakan bahwa mediasi yang dibangun UE - AS dalam rangka mengatasi krisis BiH yang telah berlangsung sejak 2005 hingga mencapai puncaknya pada 2009 gagal sedangkan mediasi yang dibangun Turki berhasil.

Seperti contoh, apabila dilihat dari *the characteristics of mediator*. UE - AS masih menjadi aktor terbesar pada BiH secara ekonomi, politik, dan militer. Namun sayangnya UE-AS sejauh

ini gagal untuk menyatukan ketiga etnis besar tersebut dalam sebuah negara kesatuan, dikarenakan fokus AS sebagai “polisi dunia” tengah berpindah ke Afghanistan serta Irak menyebabkan kecenderungan penurunan dukungan AS di BiH membuat UE sebagai aktor terbesar yang ada di kawasan tersebut tidak mampu berbuat banyak hingga kini. Bahkan UE - AS juga gagal dalam hal meresolusi isu Distrik Brčko dan rencana sensus penduduk BiH pada 2011. Berbeda dengan Turki yang mempunyai kedekatan budaya dan sejarah dengan BiH membuatnya selalu mendukung BiH dalam banyak kesempatan, seperti ketika BiH mendeklarasikan kemerdekaan dari Yugoslavia pada 1 Maret 1992 bahkan Turki turut menyuplai persenjataan BiH disaat negara baru tersebut terkena sanksi embargo dari PBB. Sedangkan Turki mempunyai hubungan berkebalikan dengan Serbia sejak berlangsungnya Perang Bosnia, dimana Turki mendukung keputusan NATO untuk meluncurkan serangan serta menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Serbia.

Apabila dilihat dari *the mediation strategies*, UE - AS mengadopsi gaya intervensi struktural dengan cara mengatur “perubahan konstitusi” sebagaimana terlihat dalam Proses Butmir. Intervensi oleh UE-AS seringkali memasang taktik menekan *disputants* (e.g. taktik menolak keanggotaan BiH di UE & NATO apabila tidak tercapai kesepakatan). Harapannya agar Bosnians berupaya memaksa partai-partai untuk cepat mencapai resolusi. Sedangkan Turki menggunakan pendekatan relasional dan fokus kepada pengembangan relasi berbasis kepercayaan diantara Serbia-BiH-Kroasia. Pertama-tama, Turki menginisiasikan serangkaian pertemuan antara para pemimpin ketiga negara tersebut yang terbagi atas dua bagian: 1) Pertemuan antara Turki-Serbia-BiH; dan 2) Pertemuan antara Turki-BiH-Kroasia. Kedua, terkait perundingan Turki-BiH-Kroasia menghasilkan sebuah perjanjian dukungan Turki-Kroasia akan upaya persatuan dan pengajuan keanggotaan BiH ke organisasi internasional (e.g. NATO). Menariknya, Turki menggunakan 2 dialog terpisah namun tetap dalam satu jalur parallel dan sebagai tambahan Turki menawarkan *carrots* (kerja sama dengan Serbia-BiH-

Kroasia dalam bidang diplomasi dan ekonomi) selama pertemuan berlangsung. Setelah pertemuan berakhir, Turki-Serbia menandatangani 6 (enam) jenis perjanjian seperti perjanjian bebas visa, kerjasama di bidang konstruksi, dan meninjau hubungan militer, budaya serta administratif kedua negara. Turki-Kroasia juga sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara hingga 1 milyar euro hingga akhir 2013.

Terakhir, walau mediasi digelar di kawasan serta mempunyai tujuan yang hamper sama (perdamaian). Namun, mediasi yang dilakukan Turki cukup berhasil dibandingkan dengan mediasi UE-AS karena mediasi Turki menghasilkan beberapa hal berikut: 1) Serbia setuju untuk menerima dubes BiH di Belgrade pada 10 Februari 2010; 2) Parlemen Serbia mengadopsi Deklarasi Permintaan Maaf Srebrenica pada 30 Maret 2010; dan 3) Deklarasi Perdamaian dan Stabilitas Istanbul pada 24 April 2010 (Zenelaj, Beriker, & Hatipoglu, 2015).

Selanjutnya, penulis menggunakan artikel karya Asaf Siniver berjudul “***Power, Impartiality and Timing: Three Hypotheses on Third Party Mediation in the Middle East***” dalam jurnal berjudul *Political Studies: 2006* sebagai studi terdahulu kedua.

Studi terdahulu kedua penulis memiliki persamaan topik yang dibahas yaitu mengenai cara determinasi kegagalan mediasi namun dalam penelitian studi terdahulu kedua yang digunakan penulis memiliki perbedaan objek penelitian dimana negara yang menjadi objek penelitian studi terdahulu kedua adalah negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah (negara-negara Arab-Israel) serta aktor yang terlibat didalamnya adalah PBB - AS selaku mediator. Studi terdahulu kedua berguna bagi penulis karena dalam tulisan tersebut, studi kasus yang dianalisis menunjukkan penggunaan indikator-indikator determinan kesuksesan dan kegagalan oleh beberapa pakar (termasuk Kleiboer) didalamnya. Indikator-indikator yang digunakan adalah *leverage* dan *timing*. Siniver menyatakan bahwa: 1) Semakin besar *leverage* yang dimiliki mediator atas *disputants* maka semakin besar kemungkinan kesuksesan mediasi; dan 2) Mediasi kemungkinan besar akan sukses ketika konflik telah mencapai tahap eskalasi.

Siniver menyimpulkan bahwa besaran *leverage* akan mempengaruhi segala aspek mediasi dalam rangka membuat *disputants* melewati rintangan negosiasi serta memastikan implementasi perjanjian yang telah disepakati, suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh *pure mediators* (mediator netral / tanpa kepentingan sama sekali).

Siniver setuju bahwa kesuksesan mediasi terbagi atas dimensi *contextual* dan *process*. Dimensi *contextual* terdiri atas *the nature of dispute*, *the level of intensity*, dan *the relationship between the disputants*. Sedangkan, variabel *process* terdiri atas kualitas mediator yang dilihat dari serangkaian perilaku, peran, dan fungsi mediator selama mediasi berlangsung.

Dalam studi kasusnya mengenai konflik Arab-Israel, mediator berhasil mempromosikan perjanjian-perjanjian substantif untuk perdamaian kedua entitas. Pertama, di awal perang Arab-Israel Dr. Ralph Bunche selaku mediator PBB sukses melakukan mediasi yang menghasilkan 4 perjanjian gencatan senjata antara Israel - Mesir - Lebanon - Yordania - Suriah. Kedua, pada saat Perang Yom Kippur Henry Kissinger selaku Menlu AS berhasil membangun 3 perjanjian antara Israel - Mesir - Suriah. Ketiga, pada 1978 Presiden AS Jimmy Carter berhasil menghasilkan perdamaian Arab - Israel melalui Perjanjian Camp David yang ditandatangani bersama oleh Israel dan Mesir. Keempat, setelah perang Teluk Pertama, usaha bersama pemerintah Norwegia-Pemikir Oslo menghasilkan serangkaian perjanjian antara Israel - PLO. Termasuk didalamnya adalah peluncuran Perdamaian Oslo.

Seperti contoh, Ralph Bunche secara efektif mengakhiri Perang Arab - Israel dengan beberapa cara yaitu: 1) *Leverage* dan *perceived impartiality* (mementingkan diri sendiri dan tidak mengakomodasi kepentingan *disputants* manapun); serta 2) Didukung dengan adanya *timing* yang baik menyebabkan mediasi berlangsung sukses dan dia mendapatkan Nobel Perdamaian 1950 atas usahanya tersebut. *Leverage* didapatkan karena pengalamannya bekerja di Kemenlu AS sehingga mudah baginya untuk meminta bantuan dan *resource* kepada AS. *Perceived impartiality* didapatkan karena sikapnya yang ingin mengakhiri perang sesegera

mungkin tanpa peduli dengan permasalahan lainnya dibandingkan pendahulunya yang memprioritaskan penyelesaian permasalahan politik Arab-Yahudi terlebih dahulu. *Timing* didapatkan karena *disputants* merasakan kerugian yang sama besar akibat perang dan menganggap bahwa diplomasi merupakan alternatif baru yang lebih menguntungkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar (Siniver, 2006).

Terakhir, penulis menggunakan laporan resmi karya Vincent L. Morelli berjudul “*Cyprus: Reunification Proving Elusive*” sebagai studi terdahulu ketiga.

Studi terdahulu ketiga penulis memiliki persamaan subjek yang dibahas yaitu mengenai latar belakang konflik Cypriots. Studi terdahulu ketiga berguna bagi penulis karena dalam tulisan tersebut, hal ini penting bagi penulis untuk menjelaskan awal mula terjadinya konflik yang akan menuntun pembaca kepada alasan diselenggarakannya mediasi oleh SASG.

Awalnya, ROC mendapatkan kemerdekaan dari Britania Raya pada 16 Agustus 1960 melalui Perjanjian London-Zürich (menghasilkan Perjanjian Aliansi dan Perjanjian Penjamin Keamanan Siprus). *Treaty of Alliance* (Perjanjian Aliansi) ditandatangani oleh ROC-Yunani-Turki berisi tentang penempatan tentara Yunani dan Turki di Siprus, sedangkan Perjanjian Penjamin Keamanan (*Treaty of Guarantee*) ditandatangani oleh Yunani-Turki-Britania Raya memastikan integritas teritorial ROC. Sebagai implementasi isi Perjanjian London-Zürich yang juga menghasilkan konstitusi pertama ROC, Makarios III (Greek Cypriot) menjadi presiden ROC dan Fazıl Küçük (Turkish Cypriot) sebagai wakil presidennya.

Pada saat itu jumlah penduduk yang hidup disana diperkirakan berasal dari 77% Greek Cypriot dan 18% Turkish Cypriot, hal ini berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dengan adanya elaborasi *power-sharing* (berbagi kuasa) antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot. Namun, sentimen akan *enosis* (penyatuan ROC dengan Yunani) dan *taksim* (pemisahan wilayah ROC menjadi 2 bagian serta kemungkinan menyatukannya dengan Turki) yang telah berkembang sejak sebelum kemerdekaan membuat perdamaian ROC hanya bertahan sejak

1960 hingga 1963. Hal ini terjadi karena Makarios III mengusulkan modifikasi konstitusi yang lebih mengutamakan hak-hak mayoritas Greek Cypriot dibandingkan Turkish Cypriot menyebabkan meningkatnya polarisasi antara kedua etnis tersebut. Puncaknya adalah *Bloody Christmas* (Insiden Natal Berdarah) yang terjadi pada 20-21 Desember 1963 yang membunuh ratusan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot serta memaksa ribuan Greek Cypriot yang bermukim di utara mengungsi ke daerah selatan dan bagi Turkish Cyprios yang bermukim di selatan mengungsi ke daerah utara. Konflik Cypriots menyebabkan PBB meresmikan UNFICYP pada 4 Maret 1964 untuk mengendalikan *violence* sekaligus bertindak sebagai *buffer* (pemisah) antara kedua etnis tersebut.

Pada 1974, Makarios III dipaksa mengakhiri jabatannya sebagai presiden ROC melalui kudeta yang didukung oleh junta militer Yunani. Pada Juli 1974, merujuk kepada Pasal 4 *Treaty of Guarantee*, Turki menginvasi Siprus dan berhasil menguasai sebagian wilayah utara ROC dan secara *de facto* menguasai wilayah tersebut sejak 25 Agustus 1974 hingga saat ini. *Buffer zone* yang pertama kali dibentuk UNFICYP pada 1964-1966 untuk pengawasan *ceasefire* (gencatan senjata) antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot kemudian diperbaharui pada serangkaian Sidang DK PBB Mei - Desember 1974 dan melalui beberapa resolusi DK PBB seperti resolusi 355 (menekankan adanya *ceasefire* di Siprus) dan resolusi 364 (memperpanjang penugasan UNFICYP di Siprus) (Resolutions 364, 1974). Perdamaian antar kedua etnis tidak kunjung terjadi hingga akhirnya pada 1983 Rauf Denktaş secara unilateral mendeklarasikan berdirinya Turkish Cypriot yang hanya secara resmi diakui Turki hingga saat ini. Hingga saat ini, konflik Cypriots berada pada titik *stalemate* (sama kuat) (Morelli, 2018: 1).

Penulis berkeyakinan bahwa adanya 3 studi terdahulu tersebut akan membantu penulis untuk lebih memahami latar belakang, proses mediasi, serta upaya penyelesaian konflik Cypriots.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Mediasi Internasional

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu yang mengandung gagasan yang dapat dikembangkan sesuai keinginan si peneliti. Sedangkan definisi yang menggambarkan konsep dengan menggunakan konsep-konsep lain disebut definisi konseptual (Mas'oed, 1990: 93 - 94).

Sebelum menganalisis lebih mendalam tentang konsep determinan kesuksesan dan kegagalan mediasi yang akan digunakan selanjutnya dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai garis besar atau definisi umum dari mediasi itu sendiri, terkhusus mediasi internasional.

UNDPA menyatakan bahwa mediasi internasional adalah sebuah bentuk permintaan bantuan oleh *disputants* kepada *good offices* untuk membantu penyelesaian konflik secara sukarela melalui proses dialog formal (negosiasi). Dalam konflik bersenjata, mediasi didefinisikan sebagai sebuah proses politik dimana terdapat 2 atau lebih *disputants* setuju untuk menunjuk pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam isu konflik agar membantu menyediakan opsi serta membuat mereka mencapai perjanjian yang adil secara sukarela. Mediasi berguna untuk membantu *disputants* untuk berkomunikasi dan mengerti satu sama lain, mendorong *disputants* untuk mencari pemahaman, kepentingan, dan solusi kreatif akan masa lalu dan masa depan konflik secara bersama, serta membantu *disputants* untuk mencapai perjanjian yang memuaskan semua pihak (UNDPA, 2011: 3 - 12).

Kleiboer menyatakan bahwa mediasi internasional adalah sebuah bentuk manajemen konflik yang mana sebuah pihak ketiga membantu 2 atau lebih *disputants* dalam mencari solusi tanpa aksi unjuk kekuatan. Mediasi internasional berlandaskan pada praktek dominasi dimana hal tersebut dapat dimulai atau didukung oleh aktor yang mempunyai *power* besar untuk melindungi serta menjaga *status quo* ekonomi dan politik internasional (Kleiboer, 1996: 360 - 384).

Beberapa ahli HI lain seperti Bercovitch & Rubin mendefinisikan mediasi sebagai sebuah proses manajemen konflik dimana *disputants* atau perwakilannya berusaha meminta atau menerima

bantuan dari individu, kelompok, negara, atau organisasi untuk mengubah, mempengaruhi persepsi atau tingkah laku mereka tanpa aksi pemaksaan atau kekerasan. Mediasi internasional berakar pada Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB, yaitu mendesak negara-negara anggota yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah melalui berbagai cara perdamaian dimana salah satunya adalah dengan mediasi (Bercovitch & Rubin, 1992: 7).

Zartman mendefinisikan mediasi sebagai bentuk intervensi politis pihak ketiga dalam sebuah konflik, bertujuan untuk membawa *disputants* menuju penyelesaian konflik yang sesuai dengan kepentingan pihak ketiga dan disetujui *disputants*. Mediasi dapat dimulai ketika *disputants* menyetujui kehadiran pihak ketiga sebagai mediator konflik mereka (Zartman, 2008: 155).

Fisher mendefinisikan mediasi sebagai tindakan intervensi oleh pihak ketiga yang mempunyai kemampuan serta bersikap tidak memihak untuk memfasilitasi negosiasi serta menyelesaikan permasalahan antar *disputants*. Mediasi merupakan sebuah tindakan pasifikasi tanpa paksaan terhadap *disputants* sekaligus mengendalikan isi perjanjian oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam bentuk bilateral / multilateral dalam manajemen konflik (Fisher R. J., 2001b: 159).

Terakhir, Greig & Diehl mendefinisikan mediasi sebagai sebuah alat manajemen konflik yang digunakan dalam berbagai studi kasus, mulai dari permasalahan rumah tangga hingga negara yang melibatkan pihak ketiga untuk menengahi konflik sekaligus membuat kesepakatan antar *disputants*. Mereka tidak percaya bahwa mediator adalah pihak yang tidak berkepentingan dan netral karena kepentingan mendorong mediator terlibat untuk memediasi konflik antar *disputants* (Greig & Diehl, 2012: 2 - 62).

2.2.2 Penyebab Kegagalan Mediasi Internasional

Determinan kesuksesan dan kegagalan mediasi internasional tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah. Setidaknya mediator yang telah ditunjuk *disputants* untuk terlibat dalam mediasi harus cerdik dalam menganalisis penyebab konflik, membangun interaksi

antar *disputants*, dan menghasilkan kesepakatan yang adil dan mampu mencegah berulangnya konflik di masa mendatang.

Kleiboer mengkritik bahwa kesuksesan dan kegagalan mediasi terjadi karena penelitian yang dilakukan para ahli sebelumnya terbatas pada penentuan *idiosyncratic values* (nilai-nilai keanehan), *interpretations*, dan *labelling* saja tanpa elaborasi dengan definisi dan operasionalisasi konsep mediasi itu sendiri. Pada akhirnya hal ini menyebabkan timbulnya analisis yang normatif dan tidak empiris (Kleiboer, 1996: 362).

Kleiboer mendefinisikan bahwa kesuksesan diraih apabila mediator berhasil berlaku seperti 2 variabel berikut, yaitu *contextual* dan *process*. *Contextual* mengadopsi variabel mediasi efektif milik Bercovitch & Rubin, yaitu: 1) Motivasi *disputants* untuk menyelesaikan konflik; 2) Peluang mediator untuk terlibat dalam mediasi; dan 3) Kemampuan mediator dalam mediasi. Indikator *motives to accept mediation* dan *the level of conflict intensity* milik Kleiboer merupakan contoh dari poin 1) dan 2). Sedangkan indikator *leverage* dan *status* merupakan contoh dari poin 3) (Bercovitch & Rubin, 1992: 251 - 254).

Kleiboer menggunakan *contextual* yang akan melihat perilaku mediator berdasarkan *the characteristics of the dispute* (karakteristik isu), *the parties and their interrelationship* (pihak-pihak yang terlibat serta keterkaitannya), *the characteristics of the mediator* (karakteristik mediator), dan *the international context* (konteks internasional).

Sedangkan *process* mengadopsi variabel strategi mediasi milik Zartman, yaitu: 1) *Communication*; 2) *Formulation*; dan 3) *Manipulation* (Zartman, 2008: 165 - 166). Kleiboer menggunakan *process* yang akan melihat perilaku dan aktivitas mediator selama mediasi berlangsung, termasuk didalamnya adalah strategi-strategi yang digunakan mediator saat mediasi berlangsung (*communication, formulation, dan manipulation*) (Kleiboer, 1996).

Kedua variabel tersebut digunakan untuk memahami konflik lebih dalam dengan cara melakukan perbandingan dan perpaduan dengan studi kasus (operasionalisasi konsep), maka dapat ditentukan apakah mediasi tersebut berhasil atau gagal.

Secara rinci, variabel *contextual* dan *process* beserta indikator-indikator didalamnya mampu menjelaskan serta menentukan apakah sebuah mediasi internasional dinyatakan sukses atau gagal, yaitu sbb:

1) *Contextual Variable*

a. *Characteristics of the Dispute*

Characteristics of the dispute merupakan aktivitas yang dilakukan semua pihak ketika masih dalam pra dan awal mediasi, sub-variabel ini terdiri atas 3 indikator, yaitu: 1) *Conflict ripeness*; 2) *The level of conflict intensity*; dan 3) *The nature of the issue(s) in conflict*.

Dalam *conflict ripeness*, *timing* menjadi penting dalam menentukan sebuah mediasi berlangsung sukses atau gagal. *Timing* ditentukan berdasarkan durasi atau peristiwa yang memengaruhi jalannya mediasi konflik dan hal ini dapat dilihat dari 2 posisi. Posisi pertama adalah *clock time*, posisi dimana *ripeness* tercipta berdasarkan durasi konflik (sehari, seminggu, sebulan, setahun, dst.) yang terhubung dengan perubahan atau peristensi perilaku *disputants* terhadap konflik. Mediasi dikatakan berhasil apabila timbul *emergency* (keadaan gawat darurat) akibat negosiasi berlangsung berlarut-larut, perasaan *emergency* akan meningkatkan motivasi *disputants* untuk mengubah pendirian dan harapannya dalam mediasi. Selain, itu konflik sebaiknya dimediasi ketika konflik masih berada pada tahap *initiation* sebelum konflik semakin memanas dan menimbulkan *violence* sehingga *disputants* menjadi semakin kukuh terhadap sikap dan harapan mereka. Menurut Bercovitch, semakin lama konflik berlangsung maka semakin sulit konflik tersebut dimediasi. Mediasi yang diinisiasi antara 12 hingga 36 bulan pasca konflik terbukti mampu menciptakan resolusi konflik.

Posisi kedua adalah *the social or event time*, dimana *ripeness* tercipta ketika: 1) Terjadi *mutually hurting stalemate* (posisi *disputants* sama kuat dan merasa bahwa melanjutkan konflik akan mendatangkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan); 2) Usaha *disputants* untuk memberikan solusi konflik unilateral mustahil sehingga solusi bilateral menjadi solusi konflik alternatif; dan 3) Terdapat perubahan posisi dalam *power relations* dimana *disputant* yang tadinya berada di posisi teratas

berbalik dengan *disputant* yang berada dibawahnya. *Event time* dapat ditandai dengan perubahan internal politik *disputant* seperti pergantian pemimpin atau perpecahan pemerintahan salah satu *disputant* yang tadinya bersatu dalam konflik.

Dalam *the level of conflict intensity*, tingkat intensitas konflik yang dilihat dari *the magnitude of violence* (seberapa besar tingkat kekerasan yang terjadi di lapangan) memengaruhi *disputants* untuk menerima atau menolak mediator. Terdapat 2 hipotesis berbeda terkait hal ini, yaitu: 1) Semakin tinggi intensitas konflik maka semakin besar konflik akan terpolarisasi sehingga besar kemungkinan *disputants* untuk menolak mediasi dikarenakan mereka akan memilih untuk memenangkan konflik dengan segala cara; dan 2) Semakin tinggi intensitas konflik maka semakin besar kemungkinan mediasi akan diterima untuk meminimalisir kerugian *disputants*.

Dalam *the nature of the issue(s) in conflict*, terdapat 5 (lima) jenis isu penyebab konflik yaitu isu kedaulatan (klaim teritorial), ideologi (politik, sosial, dan kepercayaan), keamanan (keamanan wilayah dan perbatasan), *self-determination* (identitas dan kemerdekaan), dan isu lainnya. Isu teritorial atau keamanan menjadi isu yang paling mungkin untuk dimediasi daripada isu ideologi atau *self-determination* karena 2 isu pertama mempunyai kepentingan politis yang lebih besar daripada 2 isu terakhir. Sehingga ideologi dan *self-determination* dikategorikan sebagai *zero-sum* (keuntungan satu *disputant* merupakan kerugian bagi *disputant* lain sehingga tidak dapat dimediasi).

Konflik yang dianggap sebagai *zero-sum* memungkinkan untuk dimediasi apabila mediator berhasil melakukan definisi ulang atau fraksinasi isu kedalam sub-sub unit dan coba untuk dinegosiasikan antara satu dengan lainnya. Namun, hal tersebut tidak mudah apabila kepentingan *disputants* dalam konflik berasal langsung dari penolakan nilai-nilai dasar. Sedangkan isu-isu diluar politik memungkinkan dikategorikan sebagai *positive-sum* (terpadu dan menguntungkan semua pihak sehingga dapat dimediasi) (Kleiboer, 1996: 362 - 364).

b. *Parties and Their Interrelationship*

Parties and Their Interrelationship merupakan aktivitas yang dilakukan semua pihak ketika berada dalam tahap keseluruhan mediasi, sub-variabel ini terdiri atas 6 indikator, yaitu: 1) *Identification of Parties*; 2) *Cohesiveness: Constituencies and Representatives*; 3) *Type of Regime*; 4) *Motives to Accept Mediation*; 5) *Previous and Ongoing Relationships between Parties*; dan 6) *Balance of Power*.

Dalam *identification of parties*, mediasi hanya berhasil apabila mediator mampu mengidentifikasi karakteristik dan ruang lingkup *disputants*, namun hal ini dapat menjadi masalah bagi mediator untuk mengidentifikasi *disputants* dalam peristiwa politik yang tidak terencana (e.g. kerusuhan atau perang saudara) karena mediator sulit untuk mengidentifikasi *disputants* berdasarkan latar belakang, aktor, dan kepentingan konflik. Selain itu, kesulitan identifikasi pun terjadi dalam suatu konflik yang mana mediator telah mengetahui siapa saja *disputants*-nya namun ternyata salah satu *disputants* tidak ingin mengakui *disputant* lainnya sebagai sebuah entitas resmi (e.g. Israel tidak mau mengakui Palestina sebagai *disputant* dalam konflik Israel-Palestina).

Dalam *cohesiveness: constituencies and representatives*, Kleiboer melihat bahwa *disputants* perlu menciptakan stabilitas internal yang terlihat dari: 1) kemampuan delegasi / representasi *disputants* dalam mediasi; serta 2) penyatuan pemahaman internal *disputant* (penyatuan internal kelompok, golongan, atau partai).

Poin 1 mendorong terciptanya stabilitas struktur kekuasaan internal dengan melihat apakah terdapat pemimpin atau perwakilan yang berwenang untuk bernegosiasi dan mengimplementasikan perjanjian yang telah disepakati.

Poin 2 menganalisis bahwa semakin rendah *cohesiveness*, ditandai dengan adanya lebih dari 1 konstituen (e.g. pemerintah, oposisi, media massa) yang berbeda suara. Maka semakin sulit bagi mediator untuk mengidentifikasi atau bagi perwakilan *disputant* karena mereka akan sulit berkonsesi dan mencapai resolusi konflik dengan *disputant* lainnya tanpa saling menjatuhkan satu sama lain di tingkat internal, hal ini terkadang membuat mediator harus memediasi "friksi" antar konstituen untuk meningkatkan *cohesiveness*. Eksistensi lebih dari 1 konstituen dalam konflik juga dapat digunakan sebagai salah satu taktik menjustifikasikan penolakan *disputants* terhadap segala upaya mediasi sehingga terjadi perubahan, hal ini dikenal sebagai *blackmail of weakness* (teror si lemah).

Dalam *type of regime*, mediator perlu untuk mengidentifikasi tipe rezim apa yang dianut oleh *disputants* (rezim demokrasi atau non-demokrasi). Negara yang cenderung menerima mediasi adalah negara yang menganut sistem demokrasi karena negara demokrasi jarang berperang dengan sesama negara demokrasi. Pernyataan ini didukung oleh kelebihan budaya politik demokrasi (mendorong norma-norma perdamaian), struktur (kebijakan institusional terpusat pada para pengambil keputusan tingkat tinggi), dan persepsi pemimpin demokratis (percaya perdamaian lebih baik daripada permusuhan). Studi juga menunjukkan bahwa 35% negara yang menganut sistem multipartai cenderung berkemungkinan besar untuk dimediasi dibandingkan 6% negara yang menganut sistem satu partai.

Cohesiveness tidak dapat diasosiasikan secara langsung dengan *type of regime* karena *cohesiveness* dapat terjadi dalam berbagai sistem politik (e.g. satu partai vs. multipartai) bergantung pada derajat legitimasi dan kebebasan manuver politik konstituen, bukan dilihat dari jumlah konstituen yang terlibat didalamnya.

Dalam *motives to accept mediation*, kesediaan *disputants* untuk menerima mediasi seringkali dianggap sebagai kondisi utama untuk membuat mediasi sukses. Beberapa motif (dalam bentuk kepentingan) *disputants* untuk mencari atau menyetujui mediasi adalah sbb: 1) *Disputants* berharap bahwa mediator akan membantu mereka untuk mencari penyelesaian konflik sesuai keinginan; dan 2) Pertimbangan strategi.

Poin 1 menjelaskan bahwa *disputants* berharap bahwa mediator akan menjamin implementasi perjanjian, mengurangi risiko terjadinya *violence* (kekerasan) dengan musuh, atau melindungi reputasi domestik dan internasional ketika melakukan konsesi besar.

Poin 2 menjelaskan bahwa dengan *disputants* berharap agar dapat menjadi penolong untuk mendapatkan tambahan waktu atau mengurangi dilema antara memilih meningkatkan upaya militer dalam konflik atau melakukan konsesi dengan musuh. Selain itu, mereka berharap dengan adanya mediasi maka dapat meningkatkan hubungan antar *disputants* dan antara *disputants* dengan mediator.

Dalam *previous and ongoing relationships between parties*, faktor *nature* dan *history* (sejarah) berdasarkan kepentingan menjadi penting untuk melihat interaksi *disputants*. *Nature* adalah situasi

dimana *disputants* cenderung tertarik untuk memulai dan mempertahankan hubungan baik jangka panjang daripada jangka pendek, sedangkan *history* adalah situasi dimana *disputants* cenderung tertarik untuk mediasi apabila mereka mempunyai sejarah persahabatan atau kerja sama yang baik di masa lalu atau menggunakan pendekatan konflik moderat.

Namun pertemanan yang terbangun antar *disputants* mungkin saja menyebabkan adanya salah satu pihak yang akan dirugikan di masa depan, terlebih apabila *power* salah satu *disputants* lebih besar daripada *disputant* lainnya. Hal ini disebabkan adanya kepercayaan diri yang tinggi dalam diri mereka bahwa setiap draf perjanjian akan disetujui (karena merasa bahwa semuanya akan baik dan berjalan sesuai rencana), sehingga *disputant* terlena dan menyetujui beberapa hal krusial dalam perjanjian yang seharusnya dapat dibahas secara komprehensif terlebih dahulu. Mungkin saja ini dapat memicu terjadinya konflik baru di masa depan.

Dalam ***balance of power***, adanya *power parity* (kekuatan setara) antar *disputants* menjadi faktor krusial penentu kesuksesan mediasi. Indikasinya adalah apabila terjadi *power disparity* (kekuatan tidak setara), maka *disputant* yang mempunyai *power* lebih kuat akan menganggap mediator sebagai penghalang kesuksesan mediasi (e.g. menolak mediasi atau menghalangi pencapaian konsesi) karena merasa mampu memaksakan kehendaknya terhadap *disputant* yang mempunyai *power* lebih lemah. Bagi mediator, *power disparity* merupakan sumber penghalang kesuksesan mediasi karena salah satu tujuannya adalah agar *disputants* dapat berkompromi (Kleiboer, 1996: 364 - 368).

c. ***Characteristics of the Mediator***

Characteristics of the mediator merupakan karakteristik, kemampuan, serta status mediator dalam mediasi, sub-variabel ini terdiri atas 3 indikator, yaitu: 1) *(Im)partiality and motives*; 2) *Leverage*; 3) *Status*.

(Im)partiality and motives terkait dengan masalah persepsi *disputants* terhadap mediator (e.g. kepentingan, tujuan, perilaku, dan isu) dalam konflik. Terdapat 3 posisi dalam upaya memahami *impartiality and motives*, yaitu sbb: 1) *Impartiality* merupakan sebuah kualitas penting mediator dalam

upaya mewujudkan kesuksesan mediasi; 2) *Impartiality* tidak diperlukan mediator dalam upaya mewujudkan kesuksesan mediasi; dan 3) Penerimaan mediator oleh *disputants* tidak berhubungan dengan *impartiality* melainkan berdasarkan besaran kepemilikan *leverage*.

Poin 1 menunjukkan bahwa *impartiality* mediator membuat *disputants* percaya diri untuk menunjuknya sehingga kesuksesan mediasi dapat tercapai.

Poin 2 menunjukkan adanya *trust-based mediator* (mediator yang dipercaya *disputants*) dalam konflik (e.g. konflik regional), dalam artian *disputants* menunjuk mediator yang berasal dari internal lingkungan mereka yang paham betul akan konflik dan mempunyai hubungan baik antara mediator dengan *disputants*. Mediator bertugas sebagai penghubung *disputants* dalam hal menjaga karakteristik politik, ekonomi, dan pertukaran sosial-budaya yang digerus oleh perkembangan zaman.

Meminjam beberapa pendapat ahli seperti Bercovitch & Rubin yang menyatakan bahwa segala intervensi pihak ketiga (termasuk mediator) tidak dapat dinyatakan netral. Mediator mungkin dianggap *impartial* tetapi tidak mungkin netral. Hal ini karena kompleksitas dan dinamika yang terjadi antara mediator dengan *disputants* terkait *resources* dan *interest* (kepentingan) terhadap *dispute* (masalah) dan *outcome* (hasil) konflik (Bercovitch & Rubin, 1992: 6 - 7). Sedangkan Zartman menyatakan bahwa selain mediator membantu *disputants* untuk mengatasi masalah yang tidak bisa mereka atasi sendiri, mediator pun mempunyai motif dalam bentuk *interest* terhadap *dispute* sehingga perlu mengantarkan *disputants* menuju kearah yang diinginkannya (bias) (Zartman, 2008: 155). Sifat bias terkadang menjadi salah satu faktor penerimaan individu / kelompok sebagai mediator karena *disputant* yang lebih kuat percaya bahwa mediator akan berpihak kepada mereka dalam mediasi sedangkan *disputant* yang lebih lemah percaya bahwa mediator akan mempengaruhi lawannya sehingga tercipta kesepakatan yang tidak merugikan mereka.

Menurut Kleiboer, *impartiality* merupakan penekanan sikap mediator terhadap *disputants* selama mediasi berlangsung sedangkan *neutrality* adalah fakta bahwa tidak ada satupun hubungan positif-negatif yang kuat antara mediator dengan *disputants* sebelum mediasi berlangsung. Namun yang terpenting adalah melihat bagaimana efek *impartiality* dalam kesuksesan dan kegagalan mediasi.

Selain itu, berdasarkan perspektif mediator, *partiality* dilakukan bergantung terhadap situasi *disputants* dan isu-isu konflik internasional. Mediator mungkin akan bersikap bias terhadap salah satu *disputant* untuk menghasilkan perjanjian yang akan mengakhiri penderitaan *disputant* tersebut. Bagaimanapun dalam politik internasional, peran mediator yang berasal dari pemerintahan lebih menonjol daripada mediator organisasi internasional (terlebih dalam mediasi isu regional). Maka dari itu terdapat motif *defensive* (mediator terlibat untuk mencegah kerusakan stabilitas regional) dan *expansionist* (mediator terlibat untuk memperluas *resources*, *influence*, dan *power* kawasan).

Sedangkan, poin 3 menunjukkan bahwa mediator terlibat dalam pencarian informasi dan menggunakan pengaruhnya untuk membingkai ulang isu serta membujuk *disputants* agar mengikuti keinginannya. Hal ini dapat tercapai ketika mediator mempunyai *leverage* yang diinginkan oleh salah satu atau semua *disputants*. Sehingga *impartiality* merupakan turunan dari *leverage* milik mediator.

Leverage merupakan kemampuan mediator untuk menekan salah satu atau keseluruhan *disputants* agar menyepakati perjanjian perdamaian konflik. Mediator mempunyai *power* dan *influence* (pengaruh) untuk membuat *disputants* tunduk kepadanya. *Resources* yang dapat digunakan oleh mediator antara lain: 1) *Sticks* (sanksi) dan *carrots* (penghargaan); atau 2) *Material aspects* (kemungkinan mediator untuk menahan atau menarik bantuan ekonomi) dan *immaterial aspects* (kemungkinan mediator untuk menggunakan faktor psikis dan moral untuk menekan *disputants*).

Terdapat 2 posisi dalam memahami *leverage* yaitu, sbb: 1) Pentingnya *leverage* untuk menyukseskan mediasi; dan 2) Bahaya apabila *leverage* digunakan secara berlebihan.

Poin 1 menjelaskan bahwa *leverage* sangat dipelukan untuk merayu *disputants* agar berkonsesi dan mengimplementasikan perjanjian. Namun, terdapat kemungkinan mediator dengan sedikit *leverage* (e.g. berlatar-belakang non-politisi) membuat mediasi berhasil karena mediator tersebut kemungkinan besar akan berupaya mewujudkan negosiasi yang terbuka dan saling pengertian antara satu sama lain. Selain itu, mediator dengan sedikit *leverage* kemungkinan besar akan dipilih oleh *disputants* karena dianggap lemah dan secara strategi tidak mengancam eksistensi *disputants*. Terlebih, negara kecil yang ditunjuk sebagai mediator dianggap tidak akan mengancam martabat *disputant* yang lebih kuat dan menciptakan sekutu bagi *disputant* yang lebih lemah karena mediator berangkat dari posisi yang sama.

Poin 2 menjelaskan apabila mediator terlalu aktif menggunakan *leverage*, seperti pemberian *carrots* maka akan membuat mediator terlalu bergantung pada mediator. Selain itu, mediator akan berada pada posisi yang sulit karena harus memikirkan "ganti rugi" kepada *disputants* yang bersedia berkonsesi. Hal ini membuat mediasi menjadi stagnan ketika mediator bertindak pasif. Kemudian, apabila mediator memberikan terlalu banyak *sticks* maka mediasi dapat menjadi gagal karena perjanjian hanya mengikat antara mediator-*disputants* bukan secara internasional yang dapat mendorong perubahan persepsi dan perilaku mereka.

Walau kecil, namun *impartiality* dan *leverage* mempunyai keterkaitan dan penting dalam menyukkseskan dan menggagalkan mediasi. Perbedaannya terletak pada 2 hal, yaitu: 1) Mediator *impartial* namun kekurangan *leverage* (*trust-based mediator*); dan 2) Mediator *partial* namun mempunyai *leverage* yang cukup (*power-based mediator*). Namun, Kleiboer menyatakan bahwa hal tersebut membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Status merujuk kepada reputasi, latar belakang, keahlian mediator, dan faktor organisasi. 2 komponen status mediator dijelaskan sbb: 1) *Institutional status* (Identitas konstituen mediator); dan 2) *Positional status* (bergantung terhadap posisi mediator dalam negara atau organisasi). Poin 1 menjelaskan bahwa mayoritas mediator berasal dari perwakilan negara atau NGO dengan mempertimbangkan legitimasi, pendirian, dan terkadang *leverage* dari negara / organisasi dalam suatu isu konflik. Poin 2 menjelaskan bahwa mediator wajib mempunyai posisi internal yang kuat dan mampu menggerakkan *power* negara atau organisasinya ketika dibutuhkan dan mendukung apapun yang dilakukannya selama mediasi (e.g. menjamin mediator untuk berkonsesi dengan *disputants*).

Selain itu, terdapat 2 proposisi untuk menentukan hubungan antara status mediator dengan kesuksesan mediasi, yaitu: 1) Kuantitas status; dan 2) Persamaan pangkat status mediator dengan negosiator / perwakilan *disputants* dalam mediasi Poin 1 menjelaskan bahwa semakin tinggi status mediator maka semakin besar peluang kesuksesannya (e.g. mediasi dipimpin oleh menteri luar negeri suatu negara / pejabat tinggi PBB). Sedangkan poin 2 menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan, maka posisi / pangkat antara mediator dengan *disputants* wajib setara. Apabila *status* mediator lebih rendah daripada *disputants*, maka terdapat kekhawatiran bahwa kehadiran mediator tidak akan

dianggap serius oleh *disputants*. Sebaliknya, apabila *status* mediator lebih tinggi daripada *disputants* maka terdapat kekhawatiran negosiasi akan menjadi gagal (e.g. delegasi *disputants* dalam mediasi mungkin akan membutuhkan persetujuan pemimpinnya untuk mengambil keputusan sedangkan pemimpinnya tidak berada ditempat) (Kleiboer, 1996: 368 - 373).

d. *The International Context*

The international context merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya sebuah mediasi seperti *the impact of other parties* (keterlibatan aktor lain selain *disputants* dan mediator dalam mediasi) dan *the impact of other conflicts* (adanya konflik lain yang terjadi di saat bersamaan serta mempengaruhi mediasi).

The impact of other parties berupa tekanan politik dan ekonomi yang dilancarkan aktor luar terhadap *disputants* (terlebih apabila aktor yang menekan tersebut *powerful*) akan mendorong proses tercapainya penyelesaian konflik. Selain itu tekanan aktor eksternal dapat menahan salah satu atau seluruh *disputants* untuk menggunakan *violence*. Namun, aktor eksternal terkadang dapat menghalangi mediasi (e.g. menolak perjanjian / mendorong *disputants* untuk tidak menandatangani).

The impact of other conflicts berupa konflik lain yang sedang terjadi di saat bersamaan dan mempengaruhi posisi salah satu atau keseluruhan *disputants* dalam mediasi karena mampu memicu mereka untuk memperlambat atau mempercepat proses mediasi. Dinyatakan memperlambat karena *disputant* yang sedang menghadapi konflik lain akan memberikan prioritasnya terhadap konflik tersebut sehingga mediasi *stall* (tertahan). Sedangkan, *disputant* mungkin mempercepat mediasi untuk mengurangi kerugian akibat berhadapan dengan 2 atau lebih konflik sekaligus. Adanya konflik lain yang sedang dihadapi salah satu atau keseluruhan *disputants* mampu menjadi faktor pendorong menuju *de-escalation* (Kleiboer, 1996: 373 - 374).

2) *Process Variable*

Process variable merupakan variabel yang terkait dengan analisis perilaku mediator selama mediasi berlangsung. *Process variable* terdiri atas 2 tipologi, yaitu: 1) *Reflective behavior*, *non-directive behavior*, dan *directive behavior*; dan 2) *Communicator*, *formulator*, dan *manipulator*.

Tipologi nomor 1) berawal dari ***reflective strategies*** (pasif), dimana mediator mencoba untuk beradaptasi dengan *dispute* dan membangun dasar-dasar tindakan selanjutnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas dan ketidakpastian dalam konflik internasional dengan cara menyediakan informasi dan pengetahuan mengenai isu dan *disputants*. Mediator berusaha untuk mencari titik temu isu dengan cara mengurangi distorsi, ketidaktahuan, salah paham, dan niat yang tidak realistis didalamnya.

Kemudian, ***non-directive behavior*** adalah perilaku proaktif *disputants* dalam mencari resolusi konflik dengan bantuan seminimal mungkin dari mediator. Dalam hal ini, mediator boleh mengendalikan publisitas, melakukan manajemen konflik lingkungan (e.g. memilih lokasi netral untuk bermediasi), dan mempersiapkan *resources* (dalam bentuk jumlah dan peserta mediasi) yang akan memengaruhi struktur mediasi.

Terakhir, ***directive behavior*** adalah keterlibatan aktif mediator dalam mendorong terjadinya solusi atau memanipulasi *disputants* secara langsung agar segera mengakhiri konflik. Dalam hal ini mediator dapat menawarkan proposal atau rekomendasi serta menekan *disputants* secara langsung.

Tipologi nomor 2) berawal dari ***communicator*** (pasif) sebagai pembuka kanal komunikasi yang telah rusak sebelumnya antar *disputants*. Mediator dapat menjadi pembawa dan penyampai pesan, atau menjadi jembatan konsesi *disputants*. ***Formulator*** (aktif) adalah peran mediator sebagai pemikir yang inovatif, mampu meyakinkan serta menyarankan *disputants* untuk memikirkan cara dan solusi terbaik bagi mereka. *Communicator* dan *formulator* memang dapat dianalisis perbedaannya namun dalam praktiknya mediator seringkali terjadi tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

Apabila hal tersebut tidak cukup untuk mewujudkan resolusi konflik, maka mediator dapat berperan sebagai ***manipulator*** untuk menggunakan *leverage* yang dimiliki untuk memanipulasi *disputants* kedalam perjanjian perdamaian. *Leverage* dapat berupa upaya membawa *disputants* kedalam

sebuah kesepakatan, upaya menarik *disputants* dari konflik menuju resolusi konflik, menyiapkan resolusi atraktif, merayu *disputants* untuk berkonsesi, atau mengurangi ketidaktertarikan akan konflik yang dimediasi. Ketiga strategi ini berjalan secara berkesinambungan bergantung pada isu dan tahapan mediasi yang sedang dihadapi mediator.

Kesimpulannya, tingkat aktivitas mediator memengaruhi kesuksesan mediasi. Apabila mediator semakin aktif menjalankan strategi mediasi maka peluang untuk terciptanya resolusi konflik akan semakin besar. Namun, keterlibatan aktif mediator dalam konflik yang belum *ripe* untuk diresolusi atau prematur (e.g. hubungan *disputants* sangat jauh, rendahnya tekanan konsesi, atau hambatan politis lainnya) akan memengaruhi kredibilitas dan tingkat penerimaan mediator oleh *disputants*. Sehingga mediator disarankan untuk mulai menggunakan strategi aktif dan agresif ketika konflik telah *ripe* untuk diresolusi (Kleiboer, 1996: 374 - 375).

Variabel *contextual* dan *process* akan memberikan gambaran mengenai bagaimana cara kita menentukan sebuah mediasi berhasil atau gagal. Maka dari itu, selanjutnya penulis akan menghubungkan kedua dimensi ini untuk menentukan faktor penyebab kegagalan mediasi SASG di Siprus.

2.2.3 Operasionalisasi Konsep

Kesuksesan dan kegagalan mediasi internasional erat kaitannya dengan pemahaman mediator akan *context* dan *process* mediasi yang sedang atau telah berlangsung. Dalam penelitian ini, konsep determinan kesuksesan dan kegagalan mediasi internasional akan digunakan untuk melihat apakah mediasi konflik Cypriots periode 2008 - 2017 yang *deadlock* hingga kini dapat dikategorikan sebagai sebuah mediasi gagal? Apakah keengganan Greek Cypriot / Turkish Cypriot untuk berada didalam sebuah negara kesatuan menyebabkan kegagalan mediasi? Atau, apakah keengganan Turki untuk menarik mundur pasukannya dari Turkish Cypriot menyebabkan hal yang sama? Apabila dikategorikan gagal, apa faktor yang menentukan mediasi tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah mediasi yang gagal?

Berikut merupakan rencana penelitian penulis mengenai faktor penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 – 2017, sbb:

1) *Contextual Variable*

a. *Characteristics of the Dispute*

Dalam *conflict ripeness*, penulis akan meneliti *timing* yang tepat untuk menggambarkan masuknya mediator PBB (SASG) kedalam konflik Cypriots. Seperti *clock time*, dimana mediasi yang telah berlangsung sejak 1964 tidak kunjung membuahkan hasil. Demikian dengan *social / event time*, dimana terpilihnya Christofias sebagai pemimpin baru ROC beraliran kiri pada 2008 atau pergantian beberapa pemimpin baik di kubu ROC maupun Turkish Cypriot selama periode 2008 - 2017 hanya memunculkan optimisme sesaat akan tercapainya resolusi konflik namun faktanya tidak berpengaruh signifikan pada mediasi konflik Cypriots.

Dalam *the level of conflict intensity*, penulis akan meneliti tingkat intensitas konflik Cypriots yang menyebabkan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot menerima atau menolak mediasi SASG. Penulis akan menganalisis pengaruh polarisasi serta kerugian konflik Cypriots yang mendorong ROC - Turkish Cypriot menerima atau menolak mediasi.

Dalam *the nature of the issue(s) in conflict*, penulis akan meneliti isu penyebab konflik Cypriots berdasarkan isu kedaulatan, ideologi, keamanan, *self-determination*, dan isu lainnya. Terkhusus, penulis akan menganalisis apakah isu ideologi (e.g. Kristen vs Islam Cypriots) dan *self-determination* (e.g. hak menentukan pendapat bagi Turkish Cypriot) memengaruhi kegagalan mediasi Cypriots.

b. *Parties and Their Interrelationship*

Dalam *identification of parties*, penulis akan mengidentifikasi karakteristik dan ruang lingkup *disputants* dalam konflik Cypriots. Termasuk menganalisis adanya *recognition* (pengakuan) antar *disputants* secara resmi dalam konflik. Penulis akan meneliti apakah ketidakmampuan SASG dalam mengidentifikasi karakteristik dan ruang lingkup Greek Cypriot dan Turkish Cypriot ditambah dengan

tidak adanya pengakuan secara resmi baik dari pihak Greek Cypriot ke Turkish Cypriot maupun sebaliknya dalam konflik menyebabkan kegagalan mediasi.

Dalam *cohesiveness: constituencies and representatives*, penulis akan menganalisis stabilitas internal Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dalam konflik Cypriots. Caranya adalah dengan menganalisis adanya pemimpin atau perwakilan yang berwenang untuk bernegosiasi dan mengimplementasikan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, penulis akan menganalisis tingkat *cohesiveness* Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dengan cara melihat besaran kesatuan pemahaman internal Greek Cypriot maupun Turkish Cypriot (e.g. pemerintah, oposisi, dan media) yang menyebabkan kegagalan mediasi.

Dalam *type of regime*, penulis akan mengidentifikasi tipe rezim apa yang dianut oleh Greek Cypriot dan Turkish Cypriot (demokrasi / non-demokrasi) yang mempengaruhi minat mereka selama mediasi konflik Cypriots berlangsung. Penulis akan menganalisis apakah sistem republik yang dianut keduanya memengaruhi kegagalan mediasi.

Dalam *motives to accept mediation*, pertama-tama penulis akan meneliti apakah Greek Cypriot dan Turkish Cypriot menerima tawaran mediasi atau tidak. Kemudian, penulis akan menganalisis motif Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dalam menerima mediasi. Apakah penerimaan tawaran mediasi konflik Cypriots oleh Greek Cypriot dan Turkish Cypriot yang berujung pada pembentukan serta pelibatan SASG hanya berdasarkan pertimbangan strategi tertentu (untuk tambahan waktu / mengurangi dilema) sehingga menyebabkan kegagalan mediasi.

Dalam *previous and ongoing relationships between parties*, penulis akan meneliti faktor *nature* dan *history* untuk melihat interaksi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dalam konflik Cypriots. Penulis akan meneliti apakah *nature* dan *history* yang buruk antara Greek Cypriot dan Turkish Cypriot menyebabkan kegagalan mediasi. Caranya adalah dengan meneliti niat Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dalam menjalin hubungan jangka pendek serta mempunyai sejarah persahabatan dan kerja sama yang buruk di masa lalu menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.

Dalam *balance of power*, penulis akan meneliti apakah terdapat *power disparity* antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot yang menyebabkan kegagalan mediasi Cypriots.

c. *Characteristics of the Mediator*

Dalam *(im)partiality and motives*, penulis akan meneliti persepsi *disputants* terhadap mediator berdasarkan kepentingan, tujuan, perilaku, dan isu konflik. Hal tersebut terbagi kedalam 3 posisi yaitu: 1) *Impartiality* merupakan sebuah kualitas penting mediator dalam upaya mewujudkan kesuksesan mediasi; 2) *Impartiality* tidak diperlukan mediator dalam upaya mewujudkan kesuksesan mediasi; dan 3) Penerimaan mediator oleh *disputants* tidak berhubungan dengan *impartiality* melainkan berdasarkan besaran kepemilikan *leverage*. Penulis akan berfokus untuk menganalisis poin 2 karena sebenarnya Greek Cypriot dan Turkish Cypriot telah intens berkomunikasi serta bernegosiasi dibawah pengawasan PBB (*good offices & UNFICYP*) sejak 1964, sehingga penulis meyakini bahwa faktor kedekatan antara PBB dengan Cypriots (*trust-based mediator*) menjadi salah satu faktor penerimaan SASG sebagai mediator konflik Cypriots. Selain itu, penulis akan menganalisis motif SASG berdasarkan *resource* dan *interest* untuk terlibat sebagai mediator sehingga menyebabkan kegagalan mediasi Cypriots.

Dalam *leverage*, penulis akan meneliti kemampuan SASG dalam memahami *leverage* yang dimilikinya berdasarkan 2 posisi, yaitu: 1) Pentingnya *leverage* untuk menyukseskan mediasi; dan 2) Bahaya apabila *leverage* digunakan secara berlebihan. Penulis akan berfokus untuk meneliti poin 1 karena penulis tidak melihat SASG menggunakan *leverage* yang dimilikinya secara utuh dalam mediasi konflik Cypriots. Penulis akan menganalisis kecukupan *leverage* yang dimiliki SASG sehingga menyebabkan kegagalan mediasi berdasarkan *resources*, terdiri atas *power* dan *influence*.

Dalam *status*, penulis akan meneliti reputasi, latar belakang keahlian, dan faktor organisasi dari SASG dilihat dari *institutional* dan *positional status*. Dalam *institutional status*, penulis akan menganalisis latar belakang. Dalam *positional status* penulis akan menganalisis kekuatan SASG untuk menggerakkan organisasinya dalam mendukung aktivitasnya selama memediasi konflik Cypriots. Selain itu, penulis akan meneliti hubungan antara status mediator dengan kesuksesan mediasi berdasarkan 2 proposisi, yaitu: 1) Kuantitas status (seberapa tinggi *status* SASG dalam mediasi); dan

2) Persamaan pangkat status mediator dengan negosiator / perwakilan *disputants* (apakah SASG berada dalam posisi setara dengan kedua pimpinan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dalam mediasi). Kedua hal tersebut penting dianalisis untuk mencari penyebab kegagalan mediasi konflik Cypriots.

d. *The International Context*

Dalam *the impact of other parties*, penulis akan meneliti besaran tekanan politik dan ekonomi yang dilancarkan aktor eksternal terhadap Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dan *security guarantors* (e.g. Yunani, Turki, dan Britania Raya) sehingga memengaruhi kegagalan mediasi konflik Cypriots. Penulis akan menganalisis apakah kekosongan aktor eksternal yang *powerful* (e.g. AS) dalam menekan *disputants* dan *security guarantors* menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.

Dalam *the impact of other conflicts*, penulis akan meneliti pengaruh konflik lain terhadap jalannya mediasi konflik Cypriots. Penulis akan menganalisis apakah tidak adanya konflik lain yang tengah dihadapi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot menyebabkan kegagalan mediasi.

2) *Process Variable*

Walau terdapat 2 tipologi dalam menjelaskan *process variable* namun penulis memutuskan untuk menggunakan tipologi kedua (*communicator*, *formulator*, dan *manipulator*) berdasarkan tingkat pemahaman penulis yang lebih baik pada tipologi kedua dibandingkan pertama.

Dalam *communicator*, penulis akan meneliti apakah ketidakmampuan SASG dalam membuka kanal komunikasi yang telah rusak sebelumnya antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot menyebabkan kegagalan mediasi. Selain itu, penulis akan meneliti pengaruh peran SASG sebagai pembawa dan penyampai pesan, serta jembatan konsesi antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot terhadap kegagalan mediasi konflik Cypriots.

Dalam *formulator*, penulis akan melihat peran SASG dalam membantu Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dalam mencari formula yang tepat mengenai penyelesaian konflik Cypriots serta pengaruhnya terhadap kegagalan mediasi konflik Cypriots.

Dalam *manipulator*, penulis akan melihat peran SASG dalam menggunakan *leverage* miliknya untuk memanipulasi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot kedalam perjanjian perdamaian pengaruhnya terhadap kegagalan mediasi konflik Cypriots.

Melihat situasi mediasi konflik Cypriots dimana SASG tidak hanya berusaha untuk menjalin komunikasi baik antara Greek Cypriot dan Turkish Cypriot. Melainkan juga berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Yunani, Turki, dan Britania Raya selaku *security guarantors*. *Shuttle diplomacy* merupakan bentuk komunikasi yang sering digunakan SASG untuk menjembatani keinginan *disputants* dan *security guarantors* dalam mediasi konflik Cypriots.

Selain itu, SASG dibantu Sekjen PBB turut menentukan isu-isu penting yang wajib dibahas dalam pertemuan. Misalnya menentukan bahwa 6 isu penting konflik Cypriots dibahas dalam bentuk *two-table format*, *1st table* melibatkan pemimpin delegasi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot untuk membahas isu teritorial, properti, serta bentuk pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara keduanya. Sedangkan *2nd table* melibatkan Nicos Anastasiades (Presiden ROC), Mustafa Akıncı (Presiden Turkish Cypriot), pemimpin Yunani, Turki, dan Britania Raya, serta UE sebagai *observer* (pengamat) untuk membahas *security & guarantees*. Terakhir, mereka pun turut mengendalikan publisitas mediasi melalui berita yang disampaikan di *website* <http://www.uncyprustalks.org>, portal berita UN Press, serta laporan progres mediasi konflik Siprus oleh Sekjen PBB kepada DK PBB tertanggal 28 September 2017 (UNSC, 2017). Penulis akan menganalisis "anomali" diatas sebagai faktor-faktor yang menentukan kegagalan mediasi konflik Cypriots.

Secara detail, penjabaran operasionalisasi konsep penulis terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep

VARIABEL	SUB-VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	OPERASIONALISASI
<i>Contextual Variable</i>	<i>Characteristics of the Dispute</i>	<i>Conflict ripeness</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila <i>conflict ripeness</i> terbentuk dari <i>the social / event time</i> - Mediasi cenderung gagal apabila <i>conflict ripeness</i> terbentuk dari <i>clock time</i> 	<i>Clock time</i> , mediasi yang telah berlangsung secara berkelanjutan sejak 1964 dan tidak kunjung membuahkan resolusi konflik ditengarai menjadi penyebab kegagalan mediasi Cypriots.
		<i>The Level of Conflict Intensity</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung diterima apabila tingkat intensitas konflik tinggi karena <i>disputants</i> cenderung mencegah kerugian yang semakin besar - Mediasi cenderung ditolak apabila tingkat intensitas konflik tinggi karena cenderung membentuk polarisasi sehingga <i>disputants</i> ingin memenangkan konflik dengan segala cara 	Polarisasi konflik Cypriots menyebabkan sentimen antara Greek Cypriot dan Turkish Cypriot. Sehingga, walau mereka menerima tawaran mediasi PBB namun kuatnya kepentingan mereka masing-masing dalam konflik menyebabkan kegagalan mediasi.
		<i>The Nature of the Issue(s) in Conflict</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Isu teritorial dan keamanan menjadi isu yang paling mungkin untuk dimediasi - Isu ideologi dan <i>self-determination</i> menjadi isu yang paling sulit untuk dimediasi 	Isu <i>self-determination</i> Greek Cypriot dan Turkish Cypriot yang dilatarbelakangi perbedaan ideologi (kebudayaan dan agama) terlihat dari keinginan <i>enosis</i> dan <i>taksim</i> yang masih kuat di wilayah masing-masing.

	<i>Parties and their Interrelationship</i>	<i>Identification of Parties</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila mediator dapat mengidentifikasi karakteristik dan ruang lingkup <i>disputants</i> secara jelas - Mediasi cenderung gagal apabila mediator tidak dapat mengidentifikasi karakteristik dan ruang lingkup <i>disputants</i> secara jelas - Mediasi cenderung berhasil apabila terdapat pengakuan antar <i>disputants</i> dalam konflik - Mediasi cenderung gagal apabila tidak terdapat pengakuan antar <i>disputants</i> konflik 	Ketidakmampuan SASG dalam mengidentifikasi karakteristik dan ruang lingkup Greek Cypriot dan Turkish Cypriot sekaligus tidak adanya <i>recognition</i> antara pihak Greek Cypriot dan Turkish Cypriot menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.
		<i>Cohesiveness: Constituencies and Representatives</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila terdapat perwakilan yang berwenang dalam negosiasi serta mengimplementasikan perjanjian yang telah disepakati dan setiap <i>disputants</i> hanya mempunyai 1 konstituen (e.g. pemerintah, oposisi, dan media satu suara) - Mediasi cenderung gagal apabila tidak terdapat perwakilan yang berwenang dalam negosiasi serta mengimplementasikan perjanjian yang telah disepakati dan setiap 	Tidak terdapat perwakilan yang berwenang dalam negosiasi serta mengimplementasikan perjanjian yang telah disepakati serta adanya lebih dari 1 konstituen di internal Greek Cypriot dan Turkish Cypriot menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.

			<i>disputants</i> mempunyai lebih dari 1 konstituen (e.g. pemerintah, oposisi, dan media tidak satu suara)	
		<i>Type of Regime</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil karena rezim demokrasi cenderung lebih mudah menerima tawaran mediasi - Mediasi cenderung gagal karena rezim non-demokrasi cenderung lebih sulit / bahkan tidak mau menerima tawaran mediasi 	Rezim demokrasi tidak terdapat di keseluruhan atau hanya dianut oleh salah satu antara Greek Cypriot dan Turkish Cypriot sehingga menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.
		<i>Motives to accept mediation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila <i>disputants</i> menerima tawaran mediasi pihak ketiga karena berharap bantuan mediator akan membuat mereka mencari penyelesaian konflik sesuai keinginan - Mediasi cenderung gagal apabila <i>disputants</i> menerima tawaran mediasi berdasarkan pertimbangan taktik dan strategi tertentu 	Penerimaan tawaran mediasi oleh Greek Cypriot dan Turkish Cypriot yang berujung pada keterlibatan SASG hanya berdasarkan pertimbangan strategi tertentu sehingga menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.
		<i>Previous and Ongoing Relationships between Parties</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila <i>disputants</i> tertarik untuk memulai dan mempertahankan hubungan jangka panjang, serta mempunyai sejarah persahabatan atau 	Keinginan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot untuk menjalani hubungan jangka pendek serta sejarah persahabatan dan kerja sama yang buruk di masa lalu menyebabkan

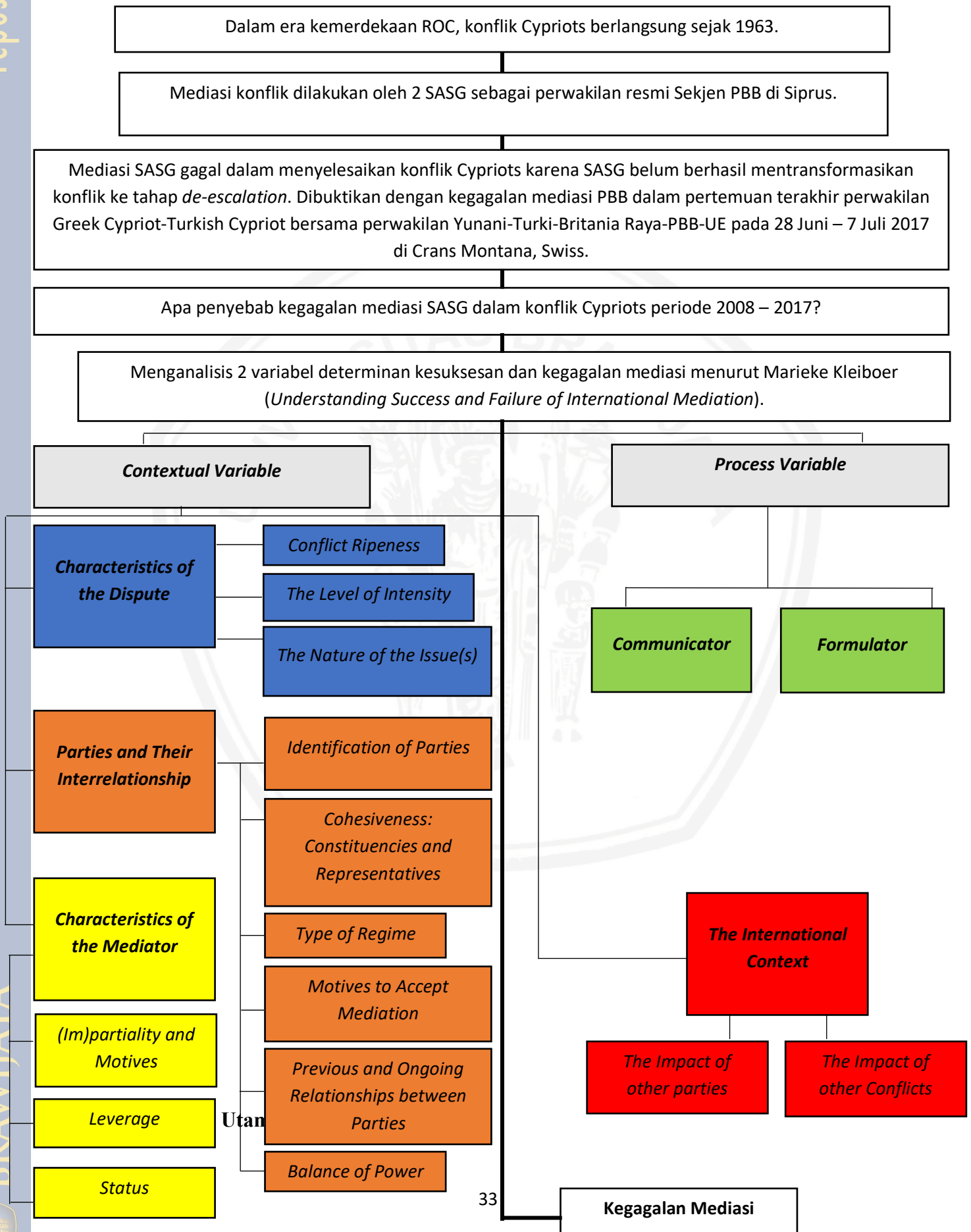
			<p>kerja sama yang baik di masa lalu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung gagal apabila <i>disputants</i> hanya tertarik untuk memulai dan mempertahankan hubungan jangka pendek, serta mempunyai sejarah persahabatan atau kerja sama yang buruk di masa lalu 	kegagalan mediasi konflik Cypriots.
		<p><i>Balance of Power</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila terjadi <i>power parity</i> dalam konflik - Mediasi cenderung gagal apabila terjadi <i>power disparity</i> dalam konflik 	Adanya <i>power disparity</i> antara Greek Cypriot dan Turkish Cypriot menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.
	<p><i>Characteristics of the Mediator</i></p>	<p><i>(Im)partiality and Motives</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila mediator <i>impartial</i> (<i>trust-based mediator</i>) serta cenderung berpihak terhadap salah satu <i>disputant</i> karena adanya <i>resource</i> dan <i>interest</i> mediator terhadap konflik - Mediasi cenderung gagal apabila mediator <i>impartial</i> (tidak ada hubungan sama-sekali dengan <i>disputant</i> sebelum ditunjuk sebagai mediator) karena minimnya <i>resource</i> dan <i>interest</i> mediator terhadap konflik 	SASG tidak mempunyai ikatan kuat dengan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot serta minim <i>resource</i> dan <i>interest</i> terhadap konflik Cypriots sehingga menyebabkan kegagalan mediasi.

		<i>Leverage</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila mediator mempunyai cukup <i>leverage</i> - Mediasi cenderung gagal apabila mediator tidak mempunyai cukup <i>leverage</i> 	Ketidakcukupan <i>resources</i> (<i>power</i> dan <i>influence</i>) yang dimiliki SASG menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.
		<i>Status</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tinggi <i>status</i> dan kemampuan mediator untuk menggerakkan organisasinya dalam mendukung aktivitasnya, serta berada pada <i>rank</i> yang sama dengan <i>disputants</i> maka semakin besar peluang kesuksesan mediasi - Semakin rendah <i>status</i> dan kemampuan mediator untuk menggerakkan organisasinya dalam mendukung aktivitasnya, serta tidak berada pada <i>rank</i> yang sama dengan <i>disputants</i> maka semakin besar peluang kegagalan mediasi 	SASG tidak mempunyai <i>status</i> serta kemampuan yang tinggi untuk menggerakkan PBB dalam mendukung aktivitasnya. Selain itu, SASG tidak berada pada <i>rank</i> yang sama dengan pemimpin Greek Cypriot dan Turkish Cypriot sehingga menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.
	<i>The International Context</i>	<i>The Impact of Other Parties</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila terdapat keterlibatan aktor eksternal yang <i>powerful</i> dalam konflik - Mediasi cenderung gagal apabila tidak terdapat aktor eksternal yang 	Tidak adanya peran AS untuk menekan Greek Cypriot, Turkish Cypriot, Yunani, Turki, dan Britania Raya untuk mencapai resolusi konflik menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.

			<i>powerful</i> dalam konflik	
		<i>The Impact of Other Conflicts</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila terdapat konflik lain yang sedang dihadapi salah satu atau keseluruhan <i>disputants</i> karena mampu menjadi faktor pendorong menuju <i>de-escalation</i> - Mediasi cenderung gagal apabila tidak terdapat konflik lain yang sedang dihadapi salah satu atau keseluruhan <i>disputants</i> 	Tidak adanya konflik lain yang tengah dihadapi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.
<i>Process Variable</i>	<i>Communicator</i>	<i>Mediator's Passive Role</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila mediator mampu bertindak sebagai pembuka kontak yang telah rusak sebelumnya, penyampai pesan, serta jembatan konsesi antar <i>disputants</i> - Mediasi cenderung gagal apabila mediator tidak mampu bertindak sebagai pembuka kontak yang telah rusak sebelumnya, penyampai pesan, serta jembatan konsesi antar <i>disputants</i> 	Ketidakmampuan SASG dalam membuka kontak yang telah rusak sebelumnya, penyampai pesan, serta jembatan konsesi antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots.

	<i>Formulator</i>	<i>Mediator's Active Role</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila mediator mampu mencari formula tepat penyelesaian konflik - Mediasi cenderung gagal apabila mediator tidak mampu mencari formula tepat penyelesaian konflik 	Ketidakmampuan SASG dalam mencari formula tepat penyelesaian konflik Cypriots menyebabkan kegagalan mediasi.
	<i>Manipulator</i>	<i>Mediator's Most Powerful Form of Intervention</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi cenderung berhasil apabila mediator mempunyai <i>leverage</i> yang cukup untuk mengarahkan <i>disputants</i> ke resolusi konflik - Mediasi cenderung gagal apabila mediator tidak mempunyai <i>leverage</i> yang cukup untuk mengarahkan <i>disputants</i> ke resolusi konflik 	SASG tidak memiliki <i>leverage</i> yang cukup untuk mengarahkan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot ke resolusi konflik.

2.3 Alur Pemikiran



Berdasarkan variabel dan sub-sub variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi menurut Kleiboer, keseluruhan variabel beserta sub-variabel seperti *contextual variables (the characteristics of the dispute, the parties and their interrelationship, the characteristics of the mediator, the international context)* dan *process variables (communicator, formulator, dan manipulator)* berperan dalam menentukan kegagalan mediasi konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

Namun, menurut penulis indikator paling utama yang menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots adalah *characteristics of mediator* (berhubungan dengan ketidakcukupan *leverage* yang dimiliki SASG dalam konflik) dan *the international context*, terutama dalam hal *the impact of other parties* dimana tidak terlihat peran AS / NATO untuk menekan *security guarantors* (khususnya Yunani dan Turki) agar tidak terlalu memaksakan kepentingan kedua negara tersebut sekaligus segera menyepakati draf kesepakatan yang dibuat selama mediasi konflik Cypriots berlangsung. Hal ini berbanding lurus dengan ketidakmampuan mediator sebagai manipulator menyebabkan mediasi konflik Cypriots gagal selama periode 2008 - 2017.

Pemilihan variabel-variabel tersebut merupakan dugaan sementara penulis yang didukung dengan data serta analisis mendalam pada bab-bab selanjutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang mengambil studi kasus kontemporer namun menggunakan konsep yang telah ada sebelumnya, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena tersebut dapat berupa objek bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Ikbar, 2014: 17-18). Penelitian deskriptif juga menyediakan gambaran terperinci dan sangat akurat, menemukan data baru yang bertentangan dengan data lama, menciptakan serangkaian kategori atau klasifikasi jenis, menjelaskan rangkaian tahapan atau langkah, mendokumentasikan proses atau mekanisme sebab-akibat, serta melaporkan latar belakang atau konteks sosial. Penulis akan menganalisis penyebab kegagalan mediasi konflik Cypriots periode 2008 – 2017. Sebagaimana tujuan dari penelitian deskriptif yang ingin “menggambarkan” suatu kegagalan mediasi melalui variabel yang tersedia (Neuman, 2015: 44).

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan penegasan mengenai ruang lingkup objek penelitian yang mencakup lingkup topik dan lingkup waktu. Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian berfokus pada analisis penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 – 2017.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka yang relevan dan berhubungan satu sama lain. Jenis data yang dipergunakan

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur. Sebagian besar data berasal dari jurnalisme, risalat akademis, diskusi dengan dosen pembimbing, dan bacaan populer lainnya. Selain itu juga berasal dari laporan, pidato, dan dokumen resmi ROC, Turkish Cypriot, dan PBB.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data yang perlu ditelaah dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan mediasi konflik Cypriots oleh SASG periode 2008 - 2017
2. *Level of analysis* adalah reduksionis, alasannya adalah karena penulis ingin meneliti serta menentukan faktor penyebab kegagalan mediasi konflik Cypriots (ROC vs. Turkish Cypriot) periode 2008 – 2017 dilihat dari perspektif mediator PBB yaitu SASG. Penulis akan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilih hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar mendapatkan gambaran yang lebih tajam. Kegiatan reduksi data dilakukan berlangsung terus-menerus, selama penelitian atau pengumpulan data berlangsung. Selama hal tersebut berlangsung, akan terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, dan menyesuaikan temuan di lapangan dengan konsep yang digunakan).
3. Interpretasi adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan metode deskriptif.
4. Menarik keimpulan dan verifikasi dimana kesimpulan akan dirumuskan berdasarkan rumusan masalah penelitian.

3.5 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan konflik Cypriots serta upaya PBB untuk memediasi konflik tersebut. Objek yang diteliti yaitu mengenai determinan kegagalan SASG dalam mediasi konflik tersebut.

2. Bab II Kerangka Pemikiran

Bab ini berisi penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa atau menggunakan konsep yang sama dengan penelitian penulis. Dalam bab ini juga dijelaskan konsep yang digunakan penulis yaitu konsep determinan kesuksesan dan kegagalan mediasi milik Marieke Kleiboer (Kleiboer, 1996).

3. Bab III Metode Penelitian

Berisi langkah-langkah analisis penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4. Bab IV Gambaran Umum Mediasi Konflik Cypriots oleh SASG periode 2008 - 2017

Berisi gambaran umum konflik Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot serta upaya mediasi PBB sejak 1963 – 2017.

5. Bab V Analisis Penyebab Kegagalan Mediasi SASG dalam Konflik Cypriots dengan Konsep Determinan Kesuksesan dan Kegagalan

Berisi analisis serta penjelasan mengenai penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 – 2017 berdasarkan konsep determinan kesuksesan dan kegagalan milik Kleiboer.

6. Bab VI Penutup

Berisi kesimpulan tentang jawaban rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.



BAB IV

GAMBARAN UMUM MEDIASI SASG DALAM KONFLIK CYPRIOTS PERIODE 2008 – 2017

Resolusi konflik ditentukan oleh banyak faktor, beberapa diantaranya adalah keberhasilan mediator untuk membuka kanal komunikasi yang telah terputus antar *disputants* sebelumnya, memformulasikan ide dan gagasan kedalam draf resolusi perjanjian, serta mampu memanipulasi *disputants* agar berjalan sesuai arah yang diinginkan oleh mediator. Isu merupakan salah satu komponen penting dalam konflik yang harus diselesaikan oleh mediator. Sejarah Siprus sejak era pendudukan Ottoman Turki berbasis pada konflik yang terjadi antara 2 etnis, yaitu Greek Cypriot dan Turkish Cypriot. Greek Cypriot merupakan mayoritas penduduk keturunan Yunani yang telah menghuni pulau tersebut sejak ribuan tahun lalu, Turkish Cypriot merupakan penduduk keturunan Turki yang dibawa oleh pemerintah Ottoman Turki pada abad ke-16 maupun pemerintah Turki sejak 1974. Selain itu, terdapat Britania Raya sebagai penguasa Siprus sejak 1878 - 1960 yang masih memegang penuh Akrotiri (Siprus Selatan) dan Dhekelia (Siprus Timur) sebagai bagian dari SBA sebagai hasil dari *Treaty of Establishment* (salah satu perjanjian pembentuk negara Siprus pada 1960).

Kedua etnis tersebut berasal dari suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda sehingga ketika Britania Raya menanggalkan status kolonial maka konflik ideologi dan *self-determination* antar etnis (*enosis* vs. *taksim*) yang sempat mereda sejak 1960 - 1963 kembali memuncak hingga invasi Turki ke Siprus pada 1974. Perlu diketahui bahwa dalam *Treaty of Guarantee* dan *Treaty of Alliance* (perjanjian pembentuk negara Siprus pada 1960), ROC tidak diizinkan untuk "mengurus" negaranya sendiri, sebaliknya Britania Raya bersama Yunani dan Turki bertindak sebagai *guarantors* (penjamin) keamanan dengan cara mengirimkan pasukan ke Siprus (Yunani membantu Greek Cypriot dan Turki membantu Turkish Cypriot). Pada awalnya, *Treaty of Alliance* membatasi jumlah pasukan yang dapat diberikan bagi ROC (yaitu 950 pasukan Yunani:650 pasukan Turki). Namun, seiring eskalasi konflik sepanjang 1964 - 1974. Kedua *guarantor* mengirimkan pasukan tambahan hingga melebihi jumlah yang disepakati dalam perjanjian tersebut hingga saat ini (e.g. Turki menempatkan 40.000 pasukan aktif di Siprus Utara hingga saat ini). Dengan alasan menjaga keamanan etnis masing-masing, kedua *guarantor* bersikeras untuk tidak mengurangi jumlah pasukan mereka hingga resolusi konflik tercapai.



Gambar 1. Peta Siprus *de facto*
Sumber: (Morelli, 2018)

PBB sendiri berperan di Siprus sejak 1964 dengan mengirimkan *good offices* dan UNFICYP. *Good offices* merupakan sebuah kelompok misi perdamaian PBB yang bertujuan untuk memediasi serta rehabilitasi pasca konflik Cypriots sedangkan UNFICYP merupakan pasukan penjaga perdamaian PBB di Siprus. "Usia" misi perdamaian PBB sendiri telah mencapai 54 tahun sehingga tidak mengherankan apabila konflik Cypriots merupakan salah satu konflik tertua yang belum teresolusi hingga saat ini. SASG merupakan salah satu bagian dari *good offices* PBB yang berperan sebagai perpanjangan tangan dari Sekjen PBB di Siprus.

Secara Umum, sebelum membahas secara spesifik mengenai konflik Cypriots dan aktivitas mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017. Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai sejarah konflik Cypriots beserta mediasinya sejak pra-kemerdekaan ROC hingga 2017 yang mana mediasi resmi terakhir bertajuk the Conference of Cyprus berlangsung di Crans Montana, Swiss pada 28 Juni - 7 Juli 2017. Pada pembahasan berikut, penulis akan menjelaskan isu konflik, aktor, mediator, dan tujuan dalam konflik tersebut.

1.1 Mediasi Konflik Cypriots (pra-2008)

Siprus merupakan sebuah negara yang terletak di laut Mediterania, tepatnya di sebelah utara Mesir, selatan Turki, tenggara Yunani, dan barat Suriah dan Lebanon (Goult, 2018).

Pada awalnya Siprus dihuni oleh penduduk yang berasal dari Yunani sejak era neolitikum. Namun, pada 1571 Ottoman Turki berhasil menguasai Siprus serta memigrasi banyak warganya dari Anatolia menuju pulau tersebut sehingga membentuk komunitas penduduk Siprus keturunan Turki. Hal ini pun didorong dengan banyaknya konversi Cypriots yang sebagian besar beragama Kristen Ortodoks menjadi Islam untuk menghindari *millet* (sistem pembayaran pajak tinggi bagi minoritas Ottoman Turki). Sehingga pada abad ke-18 jumlah penduduk Muslim atau keturunan Turki pernah lebih besar daripada penduduk Siprus keturunan Yunani. Pengenaan pajak yang dirasa terlalu tinggi bagi Greek Cypriot membuat

situasi tidak menentu sehingga pada 1765, Ottoman Turki setuju dengan argumen Greek Cypriot bahwa perlu ada pengurangan pajak bagi mereka untuk mencegah mereka memberontak.

Seiring dengan adanya *megali idea* (ide menyatukan kembali wilayah-wilayah Yunani di masa lampau yang tersebar disepanjang kawasan Mediterania) yang ditandai dengan kemerdekaan Yunani dari Ottoman Turki pada 1832 serta kedatangan Britania Raya sebagai "penguasa" Siprus yang baru sebagai *deterrent* Ottoman Turki terhadap invasi Rusia pada 1878. Greek Cypriot memuji Britania Raya sebagai pembebas Yunani dari penjajahan Ottoman Turki dan sebagai respons, pemerintah kolonial Britania Raya "menaikkan" status Greek Cypriot dan menyetarakannya dengan Turkish Cypriot namun hak veto yang dimiliki Britania Raya dan kecenderungan untuk mendukung Turkish Cypriot dalam pemerintahan seringkali membuat frustrasi Greek Cypriot sebagai mayoritas penduduk Siprus.

Semangat nasionalis Greek Cypriot semakin mengemuka dalam wujud *enosis* (penyatuan wilayah Siprus dengan negara Yunani). Puncaknya dalam referendum yang diadakan pada Januari 1950, 96% Greek Cypriot setuju akan *enosis*. Semangat *enosis* berlanjut pada 1955 dengan terbentuknya EOKA. EOKA dibawah kepemimpinan Georgios Grivas berkembang sebagai organisasi paramiliter sayap kanan dan mulai melancarkan perang gerilya terhadap Britania Raya karena prinsip lain EOKA adalah mengusir penjajah dari Siprus. EOKA turut menginspirasi terjadinya aksi kekerasan terhadap warga keturunan Yunani atau Turki yang menetap di beberapa kota Yunani (e.g. Salonika) maupun Turki (e.g. Istanbul) sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi NATO mengingat Yunani dan Turki adalah kedua anggota mereka yang mampu menjadi *bulwark* (pelindung) kepentingan Barat melawan Komunisme Soviet di Balkan dan Mediterania.

Kehadiran EOKA turut mendorong Britania Raya untuk menggelar pertemuan *tripartite* di London antara Britania Raya, Yunani, dan Turki dan pertemuan antara Sir John Harding

(Gubernur Siprus) dengan Makarios III (Pemimpin Gereja Siprus dan Greek Cypriot) untuk membahas adanya pemerintahan Cypriots secara independen namun dibawah Britania Raya. Pertemuan tersebut gagal mencapai kesepakatan. Diasingkannya Makarios III ke Seychelles oleh Britania Raya pada Maret 1956 justru semakin menguatkan EOKA. Pada 1957, sebuah organisasi mirip EOKA namun berisi Turkish Cypriot dengan slogan *taksim* (awalnya mendukung pemerintahan Britania Raya di Siprus namun akhirnya mendukung pemisahan Siprus menjadi dua bagian) dengan nama TMT berdiri. Sepanjang 1957-1958 perang antara EOKA dan TMT tidak terhindarkan membuat Harold Macmillan mengundang Yunani dan Turki untuk bekerja sama menghasilkan resolusi konflik Cypriots, dan pada Juni 1958 menginisiasi agar Siprus diperintah bersama oleh Siprus-Yunani-Turki-Britania Raya.

Akibat tekanan AS yang tidak ingin melihat Yunani dan Turki sebagai sesama anggota NATO berperang. Maka tekanan tersebut berhasil "memaksa" Britania Raya-Yunani-Turki sebagai *guarantors* (penjamin keamanan Siprus) untuk menghasilkan sebuah inisiatif bernama Konferensi London-Zurich demi membahas proses perdamaian pasca kemerdekaan dan Konferensi London untuk membahas konstitusi Siprus dan *security guarantors*. Greek Cypriot dan Turkish Cypriot tidak mampu terlibat cukup jauh dan dibawah tekanan *guarantors* "terpaksa" menerima hasil konferensi tersebut.

Terdapat 3 perjanjian yang disepakati sebagai pernyataan resmi berdirinya ROC, yaitu ***Treaty of Guarantee, Treaty of Alliance, dan Treaty of Establishment***. Ketiganya disepakati pada 16 Agustus 1960 sebagai dasar konstitusi ROC. *Treaty of Guarantee* berisi tentang perjanjian untuk menghormati kemerdekaan dan integritas Siprus, menolak persatuan / perpecahan Siprus, dan menyetujui kedaulatan Britania Raya di Dhekelia dan Akrotiri (nantinya menjadi bagian dari SBA). *Treaty of Alliance* berisi tentang perjanjian antara ROC dengan Britania Raya-Yunani-Turki terkait pengaturan bagi Yunani dan Turki untuk mengirimkan pasukannya (masing-masing berjumlah 950:650) di Siprus demi menjaga

keamanan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot. *Treaty of Establishment* berisi tentang penggunaan wilayah Dhekelia dan Akrotiri untuk tujuan militer Britania Raya beserta kompensasinya dan pengaturan kewarganegaraan ROC bagi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot.

ROC pun secara resmi berdiri dengan Makarios III (Greek Cypriot) sebagai Presiden dan Fazıl Küçük (Turkish Cypriot) sebagai Wakil Presiden. Melalui resolusi DK PBB no. 155, Siprus resmi bergabung dengan PBB pada 20 September 1960 (Mallinson D. W., 2011).

Setelah ROC resmi dideklarasikan secara "terpaksa" pada 1960, Greek Cypriot dan Turkish Cypriot duduk bersama dalam pemerintahan. Walau tidak ada konflik besar selama 1960 - 1963 namun kebersamaan tersebut tidak kekal karena etnosentrisme yang terjadi satu sama lain, baik dari Greek Cypriot terhadap Turkish Cypriot maupun sebaliknya. Hal ini menyebabkan stabilitas pemerintahan terganggu, seperti pada 30 November 1963 Makarios III mengajukan sebuah proposal untuk amandemen konstitusi Siprus. Küçük meminta waktu untuk berunding dan pada akhirnya menolak proposal tersebut. Sejak saat itu, hubungan antara presiden dan wakil presiden beda etnis Siprus ini memburuk dan menyebar ke setiap elemen di pemerintahan (Ker-Lindsay, 2004: 22 - 89).

Perselisihan antara Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dengan ideologi *enosis* vs. *taksim* semakin memuncak. Hal ini ditandai dengan adanya *Bloody Christmas* yang terjadi pada 20-21 Desember 1963 membunuh ratusan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot serta memaksa ribuan Greek Cypriot yang bermukim di utara mengungsi ke daerah selatan dan bagi Turkish Cyprios yang bermukim di selatan mengungsi ke daerah utara.

Pada Januari 1964, Turki sebagai salah satu *guarantor* mengancam akan menginvasi Siprus untuk melindungi represi Greek Cypriot terhadap Turkish Cypriot. Hal tersebut direspons oleh Britania Raya dengan cara mengajak AS untuk menerjunkan pasukan NATO

untuk mengembalikan stabilitas di Siprus, namun sayangnya hal tersebut tidak terealisasi karena penolakan Greek Cypriot.

Negosiasi substansial diadakan AS sebagai negara utama anggota NATO melalui berbagai insitatif untuk memperbaiki hubungan Yunani-Turki serta mencegah mereka melakukan intervensi konflik Cypriots. Konferensi London yang berlangsung pada Januari 1964 membicarakan banyak hal penting untuk de-eskalasi konflik Cypriots. Konferensi tersebut dihadiri oleh *guarantors*, ROC, dan perwakilan Greek Cypriot & Turkish Cypriot. Konferensi ini pun gagal menghadirkan resolusi konflik Cypriots. Mediasi AS berlanjut dengan diadakannya Inisiatif Ball dan Inisiatif Acheson sepanjang 1964 untuk mencari resolusi konflik Yunani-Turki (termasuk soal perdamaian Siprus), namun sayangnya inisiatif AS mendapatkan tanggapan dingin dari Yunani, Turki, maupun Greek Cypriot dan Turkish Cypriot.

Ancaman invasi Turki ke Siprus serta ketidakberhasilan AS untuk memediasi konflik tersebut membuat PBB melalui resolusi DK PBB no. 186 menugaskan Sekjen PBB untuk mengirimkan *good offices* serta menerjunkan UNFICYP ke Siprus. Sayangnya keberadaan UNFICYP tidak mencegah keinginan Turki untuk menginvasi Siprus, pada 5 Juni 1964 Presiden AS Lyndon B. Johnson sangat menentang rencana invasi dalam surat balasannya kepada PM İsmet İnönü dan memilih untuk mengirimkan wakilnya untuk berunding dengan Yunani, Turki, dan Britania Raya agar tidak terlibat lebih jauh dalam konflik Cypriots.

Mediator PBB yang terlibat pertama kali dalam konflik Cypriots adalah Galo Plaza. Plaza ditunjuk oleh Sekjen PBB U Thant pada 16 September 1964, beberapa bulan setelah penerjunan UNFICYP di Siprus. Galo Plaza ditugaskan untuk mempromosikan solusi damai serta penyelesaian konflik dengan pemerintahan ROC, Yunani, Turki, Britania Raya serta komunitas Greek Cypriot dan Turkish Cypriot. Pada 26 Maret 1965, Plaza merekomendasikan agar diciptakan negara Siprus yang merdeka, terbebas dari pengaruh *guarantor*, perlindungan hak-hak minoritas Turkish Cypriot, demiliterisasi, dan menolak *taksim* yang akan membuat

Siprus terpecah menjadi 2 bagian. Sayangnya, rekomendasi tersebut ditolak Turkish Cypriot dan pemerintah Turki karena tidak setuju dengan klausul penarikan Turki sebagai *guarantor* dari Siprus. Namun pada 23 Juni 1965, Plaza melaporkan secara resmi kepada PBB bahwa resolusi konflik dapat tercapai dengan cara melangsungkan *direct contacts and regular meetings* (pertemuan langsung dan rutin) antara perwakilan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot (Ker-Lindsay, 2004: 56 - 121).

Pada 1967, kudeta militer terjadi di Yunani dan membuat situasi Siprus semakin mengkhawatirkan karena junta militer Yunani menginginkan percepatan penyatuan Siprus dengan Yunani. Hal ini diperparah dengan makin maraknya aksi pengeboman tentara Turki melalui udara di Siprus sebagai *respond* (tanggapan) pembakaran desa-desa yang dihuni Turkish Cypriot oleh EF dan ELDYK (dipimpin oleh Grivas). Turki sekali lagi mengultimatum ROC agar segera menghentikan kekerasan dan Yunani agar segera menarik mundur pasukan dari Siprus. AS melalui Proposal Cyrus Vance menyarankan agar eskalasi konflik antara Yunani dan Turki segera dihentikan sekaligus menarik mundur seluruh pasukan mereka dari Siprus. Junta militer Yunani pun sementara menarik diri dari Siprus dan Makarios menghentikan segala aksi militer EF di Siprus. Krisis 1967 juga menyebabkan pembentukan OKTY yang mewadahi sekitar 40.000 Turkish Cypriot disepanjang 250m² atau wilayah utara Siprus (Bölükbaşı, 1998: 418 - 420).

Satu titik temu hampir tercapai pada Pertemuan Inter-komunal I (1968 - 1971) dan Pertemuan Inter-komunal II (1972 - 1974) antara Greek Cypriot dan Turkish Cypriot yang dimediasi *Good Offices* PBB mulai berlangsung. Dimulai pada 11 Juni 1968, Greek Cypriot mewakilkan Glafkos Clerides sedangkan Turkish Cypriot mewakilkan Rauf Denktaş. Pertemuan pertama diadakan di Beirut, Lebanon dan selanjutnya diadakan di Nikosia. Dalam pertemuan tersebut, Turkish Cypriot yang hidup dalam kondisi memprihatinkan mulai menunjukkan keinginan untuk mempertimbangkan penyerahan hak veto dan keinginan

kehidupan terpisah dengan Greek Cypriot. Namun sayangnya *disputants* tidak menyepakati tentang seberapa besar otonomi yang dapat diberikan terhadap Turkish Cypriot dalam ROC. Hal ini dikritik oleh Denktas yang menyatakan bahwa Greek Cypriot sangat diuntungkan karena mendapatkan legitimasi serta didukung oleh dana PBB dalam situasi konflik yang terus berlangsung sedangkan Turkish Cypriot tidak mendapatkan hal apapun.

Buntunya mediasi Inter-komunal I mendorong terbentuknya EOKA B oleh Grivas (kembali secara rahasia dari pengasingan di Yunani pasca kemerdekaan Siprus) pada 1971. EOKA B sendiri merupakan kelanjutan dari EOKA dan mempunyai tujuan utama untuk membuat pemerintahan Makarios III tidak stabil. Setelah kematian Grivas pada 27 Januari 1974, EOKA B membuat perjanjian rahasia dengan junta militer Yunani dan berlanjut pada kontrol penuh EOKA B dari Athena. Pada 15 Juli 1974, junta militer Yunani bersama EOKA B mengorganisasi kudeta militer terhadap Makarios III. Nikos Sampson (seorang ekstremis *enosis*) ditunjuk sebagai presiden oleh junta militer Yunani, Makarios III sendiri selamat dari percobaan pembunuhan dan pada 19 & 22 Juli 1974 berhasil berpidato didepan DK PBB untuk meyakinkan mereka agar mengeluarkan resolusi untuk menarik mundur pasukan Turki dari ROC.

Atas dasar Pasal 4 *Treaty of Guarantee* yang mengizinkan intervensi salah satu *guarantor* apabila tidak terjadi kesepakatan terkait permasalahan Siprus, Turki yang telah mempersiapkan militernya untuk invasi di Siprus sejak 1964 akhirnya melancarkan serangan pada 20 Juli 1974 melalui Kerynia dan menguasai 6% wilayah utara Siprus. Hal ini mendorong kejatuhan junta militer Yunani pada 23 Juli 1974. Rezim militer Yunani di Siprus pun jatuh dan Sampson dengan segera digantikan oleh Clerides yang bertindak sebagai *acting president* (presiden sementara) ROC. Kegagalan Konferensi Jenewa II mendorong eskalasi konflik yang semakin tinggi antara EF, milisi Greek Cypriot, milisi Turkish Cypriot, dan tentara Turki. Pada 16 Agustus 1974, Turki meluncurkan serangan kedua tanpa perlawanan berarti baik dari EOKA

B, EF maupun ELDYK membuat Turki berhasil menguasai 37% wilayah Siprus dan menjadi *status quo* berbentuk *buffer zone* yang diawasi oleh UNFICYP. Melalui resolusi no. 360, DK PBB menyesalkan invasi Turki di Siprus dan meminta semua pihak yang terlibat di Siprus untuk menghormati kedaulatan ROC (Resolution 360, 1974). Setelah invasi kedua Turki di Siprus, tidak pernah ada konflik bersenjata namun konflik terus berlangsung di jalur diplomasi. ROC & Yunani mengklaim bahwa invasi Turki merupakan bentuk "penjajahan" Turki sedangkan Turki mengklaim bahwa hal tersebut merupakan "operasi perdamaian dan pembebasan". Pemerintahan Siprus dengan segera pulih dan berlangsung kembali di bagian selatan Nikosia, walaupun hanya mampu menjalankan pemerintahan secara *de facto* di 63% wilayah Siprus.

Pada Desember 1974, Makarios kembali ke Siprus untuk meneruskan jabatannya sebagai presiden ROC. Sebagai akibat Turki menggunakan senjata buatan AS dalam invasinya ke Siprus. Pada Februari 1975, pemerintah AS melakukan embargo penjualan senjata kepada Turki namun sayangnya embargo tersebut hanya bertahan beberapa bulan dan keputusan tersebut tidak mampu menekan Turki untuk menarik pasukannya dari Siprus. Dengan demikian, upaya enosis yang diusung Makarios III sejak pra-kemerdekaan ROC belum tercapai.

Pada Januari 1975, fokus *Good Offices* PBB mengarah terhadap pengembalian stabilitas Siprus serta mendorong penarikan mundur seluruh pasukan asing (kecuali UNFICYP) dari Siprus. Sehingga *Good Offices* menginisiasi pertemuan pertama Greek Cypriot dan Turkish Cypriot pasca invasi untuk membahas tentang dasar pembentukan negara federasi. *Good Offices* PBB juga mendorong terjadinya Konferensi Vienna I pada 28 April - 3 May 1975, Konferensi Vienna II pada 5 - 7 Juni 1975, Konferensi Vienna III pada 31 Juli - 2 Agustus 1975, Konferensi Vienna IV di New York pada 8 - 10 September 1975, Konferensi Vienna V di Vienna pada Februari 1976, dan Konferensi Vienna VI pada 31 Maret - 7 April 1977.

Terdapat beberapa poin yang dibahas, salah satunya adalah bagaimana bentuk negara dan pemerintahan Siprus seharusnya. Denktas selaku presiden "Negara Federasi Turki di Siprus" bersikeras akan pembentukan sebuah republik federal berisi 2 zona homogen (Greek Cypriot & Turkish Cypriot), dengan setiap zona mendapatkan otonomi ekstensif. Clerides, perwakilan ROC menolak untuk menyetujui usulan Denktas dan fokus terhadap pemenuhan hak-hak pengungsi Greek Cypriot untuk kembali ke rumah mereka di wilayah yang sekarang dikendalikan oleh Turki. Denktas tidak ingin mendiskusikan masalah pengungsi selama Clerides dan ROC setuju mengenai usulannya terkait bentuk negara federasi di Siprus. Konferensi inipun gagal menemui titik temu. Ditengah-tengah Konferensi Vienna, Kurt Waldheim selaku Sekjen PBB pada waktu itu mengadakan pertemuan yang mengundang Makarios III dan Denktas pada 27 Januari - 12 Februari 1977. Pada akhir pertemuan, terdapat 4 prinsip yang disetujui *disputants* sebagai dasar pembentukan negara Siprus yang baru seperti:

- 1) Makarios III setuju untuk melakukan konsesi dengan menerima bentuk negara baru berupa federasi bizonal dan bikomunal;
- 2) Mereka juga setuju bahwa setiap wilayah akan ditentukan berdasarkan pertimbangan ekonomi, produktivitas, dan hak-hak properti perseorangan;
- 3) Hak kebebasan (perpindahan, menetap, dan memiliki properti) setiap Cypriots terjamin;
- dan 4) *Power* dari pemerintah pusat dalam sistem federal harus menjadi yang terkuat dan dijamin di Siprus.

Hal ini menjadi pembuka jalan bagi negosiasi-negosiasi selanjutnya yang menggunakan format serupa, yaitu Siprus sebagai republik federal, bizonal dan bikomunal.

Pada Pertemuan Kyprianou - Denktas sebanyak 3x sepanjang 1979, terdapat lebih dari 250 sesi berlangsung yang menghadirkan perwakilan dari Greek Cypriot dan Turkish Cypriot. Namun sayangnya isu pengembalian pengungsi Greek Cypriot di Varosha, aspek teritori dan konstitusi, dan *confidence-building measures* menjadi penghambat terjadinya resolusi konflik pada pertemuan-pertemuan tersebut. Bahkan Waldheim menyimpulkan bahwa menyelesaikan misi *Good Offices* di Siprus merupakan sebuah "usaha yang tidak dihargai dan membuat

frustasi". Penyebab gagalnya pertemuan inter-komunal ini diduga karena adanya saran dari Andreas Papandreou (PM Yunani) kepada Kyprianou bahwa Denktas dan Turkish Cypriot merupakan pemerintahan boneka dari Turki sehingga selama tidak adanya tekanan internasional terhadap Turki maka mediasi apapun tidak akan berhasil. Hal ini juga mendorong Papandreou - Kyprianou untuk membujuk Majelis Umum PBB agar mengadopsi sebuah resolusi untuk membatalkan pembicaraan inter-komunal dan menganggap konflik Cypriots hanya berupa *dispute* akibat pendudukan teritori oleh negara lain. Turkish Cypriot melihat aksi mereka sebagai upaya untuk berlindung dibalik PBB demi kepentingan politis semata sehingga pada akhirnya mereka secara unilateral memproklamasikan berdirinya Turkish Cypriot pada 15 November 1983. Berdirinya Turkish Cypriot menandai bahwa Turkish Cypriot ingin berada pada kedudukan yang sama seperti ROC, tidak hanya diperlakukan sebagai "komunitas". Kyprianou memutuskan untuk tidak ingin berunding kembali dengan Denktas.

Sepanjang 1984, Sekjen PBB Javier Pérez de Cuéllar mencoba untuk melakukan pendekatan yang lebih intens mengingat dia sendiri pernah menjadi perwakilan khusus Sekjen PBB (bagian dari *Good Offices*) pada 1975 - 1978 sehingga dia sudah familiar dengan situasi konflik Cypriots. Awalnya, de Cuéllar mencoba untuk mengajak Uni Soviet untuk mendukung mediasi yang dia lakukan dan berhasil. Uni Soviet selama konflik Cypriots terlihat tidak tertarik untuk terlibat lebih dalam konflik namun karena mereka telah berjanji untuk mendukung mediasi yang dilakukan de Cuéllar, maka de Cuéllar sudah mengamankan 1 kursi anggota pendiri DK PBB. Pada September - November 1984, de Cuéllar mengajak Kyprianou dan Denktas untuk bertemu kembali namun akibat keengganan Kyprianou untuk menemui Denktas secara langsung maka mediasi berjalan di tempat yang terpisah. Pertemuan ini dikategorikan sebagai *proximity talks* (pertemuan terbatas), de Cuéllar berperan sebagai pengantar pesan antar ruangan yang disampaikan kedua delegasi tersebut.

Setelah keadaan terasa lebih baik, pada 17 Januari 1985 de Cuéllar mengundang Kyprianou dan Denktas untuk mendiskusikan draf perjanjian berdasarkan hasil *proximity talks* tersebut. Denktas setuju dengan draf tersebut tanpa syarat, sedangkan Kyprianou menyatakan bahwa draf tersebut membutuhkan revisi. Kyprianou beranggapan bahwa de Cuéllar telah melebihi mandatnya sebagai Sekjen PBB dengan "memaksakan" adanya kesepakatan dimana dia merasa bahwa kesepakatan tersebut tidak merefleksikan keinginan Greek Cypriot selama *proximity talks*. Pada April 1985, de Cuéllar mempersiapkan draf perjanjian lain untuk memuaskan keberatan Greek Cypriot dengan cara mengurangi hak veto Turkish Cypriot dan menghilangkan peran Ankara sebagai *guarantor* dalam negara Siprus baru. Sayangnya, Turkish Cypriot menolak draf tersebut. Pada 29 Maret 1986, de Cuéllar mempresentasikan draf lain untuk mengakomodasi keberatan Turkish Cypriot. Draft tersebut berisi prinsip federasi bizonal, termasuk alokasi 29% wilayah Siprus bagi Turkish Cypriot. Hal tersebut diterima dengan senang hati oleh Turkish Cypriot karena tidak menyebutkan rencana penarikan tentara Turki dari Siprus, penduduk Turki, dan prinsip hak Cypriots (perpindahan, menetap, dan memiliki properti). Hal ini tidak disetujui oleh Greek Cypriot karena menganggap poin-poin tersebut merupakan hal dasar yang harus dipenuhi dalam mediasi Cypriots. Kyprianou merasa tidak nyaman dengan tindakan de Cuéllar yang merubah isi draf secara unilateral tanpa konsultasi dengan delegasi Greek Cypriot. Para penstudi konflik Cypriots beranggapan bahwa walau de Cuéllar berperan cukup aktif dalam mediasi, namun *proximity talks* telah membuat *good offices* PBB melakukan pekerjaan berkali-kali lipat. Menurut mereka, seharusnya dengan *guarantee* yang telah diberikan DK PBB digunakan de Cuéllar untuk mengundang Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dalam satu meja.

Pada 12 Juni 1986, de Cuéllar dalam laporannya terhadap DK PBB menyatakan bahwa konflik Cypriots telah mencapai *stalemate* sehingga sulit untuk dimediasi. *Proximity talk* kemudian berlanjut dalam sesi yang lebih kecil setelah terjadi relaksasi hubungan antara

Yunani - Turki dimana pada 16 September - 7 November 1988 George Vasiliou (Presiden ROC) bertemu dengan Denktas dan Oscar Camillion & Gustave Feissel ditunjuk de Cuéllar sebagai mediator PBB. Namun pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan substansial, Denktas mengatakan bahwa Greek Cypriot dan Turkish Cypriot merupakan komunitas yang berbeda dan menikmati *self-determination*, namun Vasiliou menolak klaim tersebut dengan mengatakan bahwa Turkish Cypriot hanyalah sebuah komunitas sehingga mereka tidak berhak untuk mendapatkan *self-determination* (Bölükbaşı, 1998: 421 - 425).

Terpilihnya Denktas kembali dalam pemilu Turkish Cypriot 1990 serta pendaftaran Siprus sebagai anggota UE oleh Vasiliou pada 4 Juli 1990 merupakan babak baru dalam konflik Siprus karena Turkish Cypriot menganggap bahwa pendaftaran oleh Vasiliou tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Denktas membuatnya yakin bahwa Turkish Cypriot hanya dianggap sebagai minoritas yang harus mengikuti keinginan ROC yang dihuni Greek Cypriot sebagai mayoritas. Turki dan Turkish Cypriot apabila pendaftaran Siprus sebagai anggota UE disetujui maka *enosis* akan tercapai karena negosiasi tidak akan melibatkan Turki (bukan anggota UE) sehingga negosiasi akan berlangsung *partial* dan Turkish Cypriot diperkirakan tidak akan mendapatkan hak yang sama seperti Greek Cypriot di Siprus. Sehingga pada 1993, Turki dan Turkish Cypriot menolak penunjukkan Serge Abou sebagai perwakilan UE yang bertugas mengoordinasikan Siprus kedalam UE (Bölükbaşı, 1998: 420 - 425).

Sepanjang 1994-2002 tidak ada progres signifikan dalam mediasi konflik Cypriots, kecuali pada 11 November 2002 dimana Kofi Annan mulai menyusun proposal yang akan menjadi kerangka resolusi konflik Siprus bernama *Annan Plan for Cyprus*. Pada 18 November dan 27 November tahun yang sama, ROC dan Turkish Cypriot setuju untuk duduk bersama membahas *Annan Plan for Cyprus*. ROC siap duduk bersama sebagai upaya memuluskan langkah mereka untuk diterima sebagai anggota baru UE dengan 100% wilayah dibawah penguasaan secara *de facto*, sedangkan Turkish Cypriot berharap mediasi dapat membantu mereka untuk mencapai

resolusi konflik agar segera terbebas dari embargo ekonomi dan politik yang dijatuhkan oleh UE dan PBB di wilayah Siprus utara.

Pada 26 Februari 2003, kedua pihak secara bersamaan merevisi proposal tersebut. Walau mediasi sempat kolaps pada 10 Maret 2003 namun setelah Tassos Papadopoulos (Presiden ROC, nasionalis dari partai kanan-tengah DIKO) menandatangani draf perjanjian masuknya Siprus sebagai anggota resmi UE. Denktas, seorang nasionalis Turkish Cypriot yang telah berjuang untuk taksim sejak 1974 membuka 2 pintu perbatasan yang telah tertutup selama 29 tahun pada April tahun yang sama serta menunjuk Mehmet Ali Talat dari partai CTP (kiri-tengah) sebagai PM baru menggantikan Derviş Eroğlu untuk memperkuat koalisi UBP pada 14 Desember 2003 membuat mediasi konflik Cypriots dapat berlanjut. Pada 5 Februari 2004, Kofi Annan mengundang Papadopoulos, Denktas, PM Yunani, Turki, dan Britania Raya untuk bertemu di PBB. Dalam pertemuan tersebut sepakat untuk menyetujui pertemuan bilateral di Nikosia.

Annan Plan for Cyprus sendiri telah direvisi sebanyak 5 kali hingga diterima semua pihak pada 1 April 2004 dan pada 24 April 2004 berlangsung referendum di ROC dan Turkish Cypriot untuk menentukan apakah Annan Plan for Cyprus disetujui atau tidak. Pada 31 April 2004 di Bürgenstock, Swiss. Kofi Annan menyatakan bahwa Annan Plan for Cyprus telah disetujui dan siap diimplementasikan apabila referendum berhasil memenangkan kubu "Ya". Proposal tersebut berisi keuntungan-keuntungan yang akan diterima setiap pihak sbb: 1) Siprus akan bersatu dan akan segera bergabung secara resmi sebagai anggota UE dengan menjunjung tinggi aturan hukum, demokrasi, dan HAM; 2) Bentuk pemerintahan adalah bizonal-bikomunal yang terdiri atas 2 negara konstituen (Greek Cypriot dan Turkish Cypriot); 3) Kedua konstituen tersebut akan mengajak rakyat mereka masing-masing untuk bekerja sama di pemerintahan federal; 4) Hubungan kedua etnis dalam pemerintahan akan diperbaiki hingga melebihi situasi pada 1960; 5) Pengungsi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dapat kembali ke rumah mereka

di wilayah utara / selatan Siprus dan bagi orang yang menempati rumah tersebut saat itu akan mendapatkan kompensasi setimpal; 6) Keamanan, keadilan, dan isolasi bagi Turkish Cypriot akan segera berakhir dan menjadi rekan kerja setara dengan Greek Cypriot di negara Siprus bersatu nantinya; 7) UE akan mengakomodasi penyelesaian konflik serta menyediakan bantuan ekonomi dan politik bagi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot; dan 8) Tentara Yunani dan Turki yang menempati wilayah ROC dan Siprus Utara berangsur-angsur akan dikurangi jumlahnya hingga seperti *Treaty of Alliance* 1960 (950 tentara Yunani : 650 tentara Turki).

Hasilnya adalah 76% Greek Cypriot menolak berbanding 65% Turkish Cypriot menyetujuinya. Cypriots yang menyetujui proposal tersebut menganggap bahwa hal tersebut akan membawa mereka kedalam kehidupan perekonomian yang lebih baik terlepas dari etnis mana mereka berasal, sedangkan bagi yang menolak merasa bahwa proposal tersebut hanya merupakan perpanjangan kepentingan dari Greek Cypriot atau Turkish Cypriot. Pada 1 Mei 2004, ROC resmi menjadi anggota UE dengan 37% wilayahnya masih berada dalam pendudukan Turki. Setelah referendum berakhir, tidak terdapat negosiasi yang menghasilkan keputusan signifikan bagi *disputants*. (Michael, 2012: 85 - 87)

Sikap saling menyalahkan terjadi sebelum dan setelah referendum Cypriots terkait *Annan Plan for Cyprus* di tahun 2004 berlangsung dan gagal menghasilkan keputusan reunifikasi kedua etnis. Presiden ROC, Tassos Papadopoulos berulang kali muncul dalam siaran televisi dan menyatakan bahwa Annan Plan merupakan sekumpulan dokumen "perjanjian gagal" sekaligus menyarankan agar Greek Cypriot memilih "Tidak" pada referendum tersebut. Ia bahkan menyarankan agar Greek Cypriot tidak takut dengan tekanan dari PBB dan AS sekaligus yakin bahwa akan ada solusi lain yang lebih baik di masa depan (The Guardian, 2004). Pernyataannya menyalahkan PBB telah "menjual" Greek Cypriot kepada Turkish Cypriot didukung oleh media massa Greek Cypriot dengan menampilkan berita terkait kerugian *Annan Plan for Cyprus* dan gambar-gambar mengerikan apabila referendum

memenangkan "Ya". Presiden Turkish Cypriot, Rauf Denktaş pun seringkali mengeluarkan pernyataan yang menyinggung Günter Verheugen, komisioner UE (terlibat dalam proses pendaftaran Siprus ke UE) sebagai seorang penjaga *Nazi* (Politico, 2004). Verheugen pun mengkritik bahwa ia merasa dikhianati oleh pemerintah ROC yang pernah berjanji tidak akan menghalangi segala upaya untuk mencapai resolusi konflik. Annan pun mengkritik bahwa seharusnya pemerintah ROC benar-benar mempraktikkan kesediannya untuk berbagi kekuasaan dan kesejahteraan dengan Turkish Cypriot (Asmussen, 2004). "Himbauan" Papadopoulos berhasil membuat mayoritas Greek Cypriots memilih "Tidak" dalam referendum sedangkan pilihan "Ya" mayoritas Turkish Cypriot sia-sia karena mayoritas Greek Cypriot tidak setuju dengan proposal Sekjen PBB tersebut. AKEL sebagai sekutu utama Papadopoulos awalnya ingin memilih "Ya" namun berubah menjadi "Tidak" beberapa hari jelang referendum karena veto Rusia di sidang DK PBB terkait kesediaan untuk mengamankan Siprus secara intensif apabila referendum berakhir "Ya". Hal ini membuat Greek Cypriot ragu terhadap komitmen DK PBB untuk menjaga stabilitas Siprus pasca referendum sekaligus mengusir tentara Turki dari Siprus utara pasca implementasi Annan Plan for Cyprus (apabila berakhir "Ya").

Pasca referendum, ROC sibuk menyolidkan posisinya pasca resmi menjadi anggota baru UE namun tidak menghiraukan Turkish Cypriot yang bermukim di wilayah Siprus utara sehingga etnis tersebut terus terisolasi hingga 2008. Seperti contoh, pada 24 Januari 2006 Turki pernah mengusulkan sebuah rencana untuk membuka pelabuhan-pelabuhan di wilayah Siprus utara bagi ROC sebagai ganti pembukaan isolasi terhadap wilayah tersebut. Sayangnya, Papadopoulos menolak hal tersebut.

Status quo berakhir ketika Papadopoulos diganti oleh Christofias (dari AKEL). Kebijakan ROC yang tadinya cukup nasionalis dan tidak bertoleransi terhadap kepentingan Turkish Cypriot langsung berubah menjadi menerima perbedaan dan bersedia untuk berunding kembali

dengan etnis minoritas Siprus tersebut demi mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun itu.

1.2 Mediasi Konflik Cypriots (2008 - 2017)

Selama periode 2008 - 2017, tidak ada konflik besar yang berujung pada terjadinya *violence / war* di Siprus kecuali respons yang diberikan pemerintahan ROC atau Turkish Cypriot terhadap kebijakan yang dikeluarkan antara satu dengan lainnya.

Pada 2008, hal ini terlihat pada perubahan AKEL sebagai partai koalisi dan memilih "Tidak" pada era pemerintahan Papadopoulos menjadi pendukung penuh reunifikasi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot pasca kemenangan mereka dalam pemilu 2008 yang mengantarkan Demetris Christofias sebagai presiden baru ROC. Disisi lain, tekanan oposisi terhadap Ali Talat semakin besar karena tak kunjung membawa Turkish Cypriot mencapai resolusi konflik dengan Greek Cypriot. Misalnya, Eroğlu pernah mengkritik Ali Talat karena terlalu "lunak" kepada ROC sekaligus menginginkan pemisahan Greek Cypriot - Turkish Cypriot seperti Ceko - Slovakia pada 1 Januari 1993. Disisi lain, PBB masih mempunyai keinginan serupa untuk mewujudkan negara Siprus yang bizonal dan bikomunal.

Terhitung sejak Maret 2008 – Juli 2017, telah terjadi banyak pertemuan penting antara perwakilan ROC dan Turkish Cypriot dimana seluruh pertemuan tersebut difasilitasi PBB yang diwakilkan oleh SASG serta melibatkan Yunani, Turki, dan Britania Raya sebagai *security guarantors*.

Pertemuan pertama terjadi pada 21 Maret 2008. Dibawah pengawasan PBB, presiden terpilih ROC, Demetris Christofias dan Presiden Turkish Cypriot, Mehmet Ali Talat yang keduanya beraliran kiri bertemu untuk membicarakan penyelesaian konflik antara Greek

Cypriot (penduduk Siprus keturunan Yunani) dan Turkish Cypriot (penduduk Siprus keturunan Turki) secara resmi di *buffer zone* (zona netral) PBB. Christofias baru saja memenangkan pemilu presiden Siprus pada Februari tahun yang sama atas Tassos Papadopoulos, yang memimpin Greek Cypriot di Republik Siprus untuk menolak *Annan Plan for Cyprus* pada 2004. Hasil dari pertemuan ini ialah kedua pemimpin tersebut sepakat untuk melaksanakan pembicaraan serius selama 3 (tiga) bulan kedepan dibawah pengawasan PBB. Keseriusan tersebut ditandai dengan akan dibukanya Jl. Ledra sebagai *confidence building measure* (langkah mengurangi ketegangan diantara kedua belah pihak) (UN, 2008). Pada saat yang sama, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan beberapa langkah berarti untuk bernegosiasi, termasuk pembentukan *working groups* (kelompok kerja) dan *technical committees* (komite teknis) untuk berdiskusi isu-isu terkait kebudayaan dan bentuk pemerintahan ideal kedepannya (Security Council Report, 2018).

Pada 11 Juli 2008, menindaklanjuti pertemuan 21 Maret 2008. Sekjen PBB, Ban Ki-moon menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer sebagai SASG. Penunjukan Downer dilakukan ditengah tumbuhnya optimisme perdamaian antara pemimpin Greek Cypriot dan Turkish Cypriot setelah konflik yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun (UN, 2008).

Progres awal pertemuan yang berlangsung cepat melambat ketika Christofias dengan Ali Talat tidak sepaham dengan dasar negosiasi mereka sendiri. Talat menginginkan negosiasi berbasis apa yang telah dibahas dalam revisi terakhir Annan Plan for Cyprus 2004. Sesuai dengan yang disepakati dalam revisi ke-5 proposal tersebut bahwa terdapat penarikan mundur tentara Yunani dan Turki dari wilayah Siprus secara bertahap hingga ke angka 950 : 650 tentara kedua negara tersebut di Siprus serta pengakuan kewarganegaraan negara Siprus bersatu bagi rakyat Turkish Cypriot (termasuk pendatang dari daratan Turki pasca invasi 1974). Sedangkan Christofias, seorang "Tidak" pada referendum berusaha menghindari permulaan negosiasi dari

basis tersebut sehingga pada 2009 rasa ketidakpastian, ketidaksabaran, dan frustrasi dengan mulai memuncak di kedua kubu.

Pada 2010, negosiasi hampir mencapai titik temu namun setelah melakukan lebih dari 60 pertemuan selama 18 bulan sejak negosiasi pertama dilakukan pada 2008. Resolusi konflik tidak tercapai. Meskipun pada saat itu Christofias dan Talat menyatakan bahwa mereka telah mencapai progres positif dalam hal bentuk pemerintahan, UE, dan ekonomi. Namun hal itu tidak cukup bagi Talat untuk meyakinkan konstituen Turkish Cypriot agar tetap memilihnya sebagai pemimpin mereka dalam pemilu di tahun yang sama.

Pergantian pemimpin Turkish Cypriot pada 2010 merupakan langkah mundur bagi mediasi konflik Cypriots karena Eroğlu merupakan seorang pendukung *taksim* garis keras (bahkan lebih keras daripada Denktaş), berasal dari partai nasionalis Turkish Cypriot, serta mempunyai hubungan dekat dengan Turki. Meskipun Eroğlu bersedia melanjutkan mediasi, namun parlemen ROC skeptis dengan kehadirannya ditambah dengan dugaan bahwa kemenangannya didukung oleh suara Turkish Cypriot yang berasal dari daratan Turki (pasca invasi 1974), dimana mereka berpemikiran sama seperti pemimpinnya dan diperkirakan berjumlah setengah dari keseluruhan 326.000 penduduk Turkish Cypriot di wilayah Siprus Utara (Turkish Ministry of Economy, 2017).

Selama 2010, pertemuan Christofias - Eroğlu tidak menghasilkan progres apapun. Hal ini diperparah dengan krisis ekonomi global 2008 yang berimbas kepada perekonomian ROC dan Turkish Cypriot sehingga fokus Christofias - Eroğlu berkurang terhadap mediasi konflik Cypriots. Kemudian *blunder* (kesalahan besar) yang dilakukan oleh SASG Downer pada 26 Mei 2010. Pada waktu itu, Christofias dan Eroğlu mengadakan pertemuan resmi pertama dan kontroversi terjadi ketika Downer membacakan pernyataan Sekjen Ban yang memberi ucapan selamat terhadap berlangsungnya mediasi kembali dan berangkat dari poin-poin yang telah disepakati oleh Christofias - Talat pada 30 Maret 2010. Menurut PBB, hal tersebut merupakan

kesepakatan perjanjian. Seketika itu, beberapa politisi ROC memprotes pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa ROC tidak berada dalam posisi menyetujui pernyataan Sekjen Ban dan kesepakatan yang telah dicapai saat pertemuan Christofias - Talat. Eroğlu pun berpendapat bahwa Turkish Cypriot tidak akan terikat kesepakatan yang terjadi di masa pemerintahan Talat sekaligus menolak segenap resolusi DK PBB yang meminta agar Turki menarik mundur pasukannya dari wilayah Turkish Cypriot. Pada Mei 2010, Eroğlu menuduh Greek Cypriot memperlakukan Turkish Cypriot secara tidak layak sekaligus menyatakan bahwa dia tidak akan membubarkan Turkish Cypriot atau mengirim kembali pendatang Turki pasca invasi 1974 kembali ke negara mereka. Selain itu pada Oktober 2010, Eroğlu dikabarkan cukup frustrasi dengan jalannya mediasi dan percaya bahwa penyelesaian konflik semakin tidak memungkinkan. Disisi lain, Christofias sibuk menghadapi krisis ekonomi global yang menghantam negaranya hingga era pemerintahannya berakhir pada 2013. Dengan alasan tersebut, Christofias pun memberitahu PBB bahwa resolusi konflik tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat (Cyprus Mail, 2018). Secara resmi, mediasi di tahun tersebut berakhir pada bulan Desember karena Eroğlu bermasalah dengan kesehatannya.

Pada 1 Januari 2011, sebagai respons atas kritikan Eroğlu beberapa bulan sebelumnya. Christofias balik menuduh Turki tidak melakukan usaha apapun untuk membantu Turkish Cypriot mencapai resolusi konflik. Sepanjang April - Mei 2011, ROC menyelenggarakan pemilihan legislatif namun partai-partai nasionalis beraliran kanan-tengah / sayap kanan seperti EDEK, EVROKO, dan DIKO tidak berhasil menambah suara mereka. Recep Tayyip Erdoğan terpilih kembali sebagai PM Turki untuk masa jabatan hingga 2016 hingga diharapkan mampu mendorong Turkish Cypriot agar berkonsesi dengan ROC seperti yang pernah dilakukannya pada referendum 2004 dahulu. Sepanjang 2011, Sekjen Ban bersama SASG Downer mencoba untuk mendorong mediasi agar menghasilkan progres positif. Sekjen Ban pun bersikeras untuk memulai mediasi pada 30 Oktober 2011 untuk menilai kembali jalannya mediasi selama ini.

Selain itu, PBB pun bersiap untuk mengadakan konferensi Siprus untuk membahas *security & guarantees* seperti saran Turki. Namun pertemuan tersebut tidak pernah terwujud.

Sebuah *poll* opini publik yang dikeluarkan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan ketidakpuasan publik terhadap proses mediasi di Siprus. Terdapat kecenderungan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot untuk vote tidak pada reunifikasi. Publik kedua kubu pun menginginkan adanya diskusi publik untuk menentukan parameter negosiasi dan *confidence-building measures* agar tingkat kepercayaan terhadap mediasi meningkat.

Ketika Siprus ditunjuk sebagai presiden Dewan UE selama 6 bulan pada 2012, Eroğlu menyatakan bahwa tidak akan ada negosiasi selama periode tersebut. Sehingga negosiasi sempat tidak berjalan selama 6 bulan karena Siprus menduduki suatu jabatan yang ditentang oleh Turkish Cypriot.

Pertemuan yang digagas PBB di New York pada 22 - 24 Januari 2012 dengan mengundang Christofias - Eroğlu bertujuan untuk menyelesaikan isu keamanan, pemerintahan, ekonomi, dan hubungan dengan UE kedalam sebuah proposal bernama *Greentree 2*. Proposal tersebut kemudian akan dibuatkan referendum seperti 2004 sehingga dapat diketahui apakah Cypriots menyukainya atau tidak. Namun hal tersebut tidak terwujud karena Christofias dan Eroğlu tidak berkonsesi dalam hal hak kepemilikan properti, keamanan, teritorial, penduduk Turkish Cypriot yang berasal dari daratan Turki, dan kewarganegaraan Cypriots. Oposisi ROC menyarankan agar Christofias tidak menuruti *deadline* (tenggat waktu) atau arbitrase PBB atau menyetujui segala bentuk perjanjian terkait konflik Cypriots tanpa persetujuan terlebih dahulu terhadap isu-isu internal Cypriots diatas. Turkish Cypriot lebih lanjut menyarankan agar PBB menunda mediasi hingga pemilu ROC 2013. Christofias merespons dengan menyatakan bahwa Turkish Cypriot tidak lagi tertarik dengan resolusi konflik Cypriots. Dia pun menyarankan agar mediasi tetap berlanjut selama masa kepresidenan Siprus di Dewan UE karena kedua hal tersebut tidak berhubungan sama-sekali. Namun Christofias percaya bahwa apabila mediasi

tidak segera mencapai resolusi konflik, maka hal tersebut akan mengganggu kesuksesan ROC sebagai presiden di Dewan UE selama 6 bulan. Selain itu, faktor krisis ekonomi yang belum teresolusi menyebabkan keenganan Christofias untuk melanjutkan negosiasi dengan Eroğlu.

Walaupun mediasi dapat berlanjut pada masa kepresidenan Siprus di Dewan UE. PBB secara resmi menutup mediasi pada Mei 2012. SASG Downer beralasan bahwa Sekjen Ban merasa bahwa mediasi ditunda karena terdapat isu-isu internal yang belum disepakati sekaligus mengumumkan bahwa PBB tidak akan menyelenggarakan sebuah mediasi yang tidak produktif. SASG Downer mengindikasikan bahwa mediasi akan dilanjutkan apabila terhadap niat penuh Greek Cypriot dan Turkish Cypriot untuk melanjutkan mediasi. Setelah pengumuman tersebut dikeluarkan, ROC dan Turkish Cypriot saling menyalahkan satu dengan yang lain terkait tidak adanya progres berarti selama mediasi berlangsung (Morelli, 2017: 3 - 13).

Christofias memutuskan untuk tidak maju kembali sebagai calon presiden dalam pemilu 2013, maka dari itu persaingan terjadi antara Nicos Anastasiades (kanan-tengah, DISY) dan Stavros Malas (AKEL). Namun Anastasiades berhasil memenangkan pemilu yang berlangsung 2 putaran tersebut dengan dukungan DIKO dan EVROKO sebagai mitra koalisi. Kedua partai ini sebelumnya berkoalisi dengan AKEL dalam pemilu 2008 namun berpisah karena tidak setuju dengan pendekatan Christofias dalam mediasi konflik Cypriots. Selama kampanye, isu konflik Cypriot tidak banyak dibahas karena krisis ekonomi masih terjadi di ROC sehingga isu ekonomi (e.g. pengaturan fiskal dan *budget*) menjadi topik utama pemilu tersebut. Anastasiades merupakan seorang pendukung "Ya" dalam referendum 2004 namun kali ini terkesan hati-hati karena partainya berkoalisi dengan partai-partai "Tidak" dalam referendum tersebut. Anastasiades mengusulkan bahwa basis mediasi selanjutnya sebaiknya berdasarkan pada kesepakatan yang terjadi antara pemimpin Greek Cypriot dan Turkish Cypriot periode 1977 - 1979 (Pertemuan Makarios III - Denktas & Kyprianou - Denktas). Dia pun menyarankan

agar negosiasi tidak selalu melibatkan presiden setiap harinya namun cukup mengirimkan perwakilan saja. Suatu hal positif dilakukan Anastasiades, yaitu menyatakan bahwa Turkish Cypriot merupakan penduduk ROC. Yiannakis Omirou, pemimpin parlemen Siprus menyatakan bahwa ROC akan membuat sebuah kebijakan baru untuk menggunakan keanggotaan ROC di UE sebagai "senjata" untuk menentukan prospek Turki sebagai calon anggota UE kedepannya. "Senjata" tersebut dipergunakan untuk menekan Turki agar segera menarik mundur pasukannya dari Siprus. Konflik Cypriots dipandang sebagai konflik yang timbul akibat invasi Turki yang melanggar hukum internasional sehingga penyelesaiannya harus melalui jalur internasional yang sesuai dengan hukum UE dan hukum internasional pula.

Turkish Cypriot dengan segera meminta Anastasiades agar melanjutkan negosiasi, namun Anastasiades sedang fokus untuk menyelesaikan krisis finansial negaranya terlebih dahulu sebelum berpindah fokus. Disisi lain, Turkish Cypriot pun tak kunjung menyodorkan gagasan baru kepada PBB agar mediasi dapat dilanjutkan kembali. Dalam kunjungan Menlu Ioannis Kasoulides ke markas PBB di New York, dia menyatakan bahwa pemerintahan Anastasiades tidak akan terikat dengan kesepakatan yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya sekaligus mengusulkan agar Verosha (kota mati di wilayah pendudukan Turki) diberikan kepada ROC sebagai *confidence-building measures*. Apabila terwujud, Turkish Cypriot dapat menggunakan pelabuhan Famagusta untuk melangsungkan perdagangan dengan negara-negara Eropa dibawah pengawasan UE. Sayangnya, ide tersebut ditolak oleh Turkish Cypriot sekaligus menyatakan bahwa sebaiknya mereka berdua menjalankan dua negara terpisah saja (ROC dan TRNC) karena perbedaan bahasa, agama, kewarganegaraan, dan asal-usul.

Pada Mei 2013, Anastasiades-Eroğlu akhirnya bertemu pertama kali namun sedikit tekanan dari AS dalam bentuk adanya *joint-declaration* Anastasiades-Eroğlu berdasarkan perjanjian 1977-1979 dan Annan Plan for Cyprus 2004 menyebabkan mundurnya DIKO dari koalisi pemerintahan. DIKO merupakan penolak Siprus yang bizonal-bikomunal dan kebetulan

pemimpin DIKO adalah Nikolas Papadopoulos yang merupakan putra dari mantan presiden Tassos Papadopoulos (penolak referendum 2004). Rumitnya proses negosiasi dalam membentuk *joint-declaration* (e.g. *disputants* saling melempar proposal) menyebabkan kegagalan *joint-declaration*.

Konflik sempat memuncak setelah Turki memutuskan untuk mengirimkan kapal navigasi ke wilayah ZEE ROC setelah ROC berunding dengan Yunani, Israel, dan Mesir mengenai pemanfaatan SDA di wilayah tersebut. Turki menyatakan tidak akan menarik mundur kapalnya kecuali Turkish Cypriot diberikan peran lebih besar dalam menentukan keputusan-keputusan penting terkait pemanfaatan SDA (e.g. energi). Anastasiades merespons dengan menolak kelanjutan mediasi sebelum Turki menarik mundur kapalnya dari wilayah ZEE ROC. Bagi Anastasiades, energi merupakan isu federal dan akan dibahas dalam dialog apabila tercapai kesepakatan. Sedangkan bagi Turkish Cypriot, isu energi seharusnya menjadi topik pembahasan utama mediasi konflik Cypriot. Keengganan *disputants* untuk berkonsesi menyebabkan mediasi tetap tidak berlangsung hingga Eroğlu digantikan oleh Akıncı pada pemilu 2015.

Dalam rentang waktu terpilihnya kedua presiden tersebut. Setelah bertugas selama 6 (enam) tahun, akhirnya SASG Downer mengakhiri masa jabatannya pada 2014 dengan *status quo* (belum ada solusi konkret mengenai Siprus) (UNSC, 2014). Kemudian, pada 22 Agustus 2014, Sekjen PBB menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide sebagai SASG PBB menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Downer karena Downer diangkat sebagai Perwakilan Tinggi Australia bagi Britania Raya (UN, 2014). Pada 15 Mei 2015, SASG Eide mempertemukan kedua pemimpin dalam konflik ini yaitu Nicos Anastasiades (ROC) dan Mustafa Akıncı (Turkish Cypriot).

Akıncı merupakan seorang pemimpin yang beraliran kiri, mendukung unifikasi serta referendum 2004, sehingga membuat dirinya jauh berbeda dari pendahulunya. Sewaktu

kampanye, Akıncı juga berniat untuk memberikan Verosha kepada ROC untuk dikelola bersama sehingga menghasilkan lapangan pekerjaan dan keuntungan yang sama bagi kedua etnis. Terpilihnya Akıncı menggantikan Eroğlu memunculkan harapan baru akan tercapainya resolusi konflik Cypriots. Namun sayangnya, karena kemenangan Akıncı hanya terjadi dalam pemilu presiden (TDP berkoalisi dengan partai-partai kecil) maka partainya belum mampu mengendalikan parlemen negara Turkish Cypriot. Sebagai simbol perdamaian, kedua pemimpin memutuskan untuk berjalan bersama di Jl. Ledra (simbol perpisahan dua etnis). Selain itu, juga terdapat *joint-statement* perayaan Natal dan Tahun Baru 2016 oleh kedua pemimpin tersebut yang ditayangkan oleh seluruh televisi Siprus.

Progres positif pada 2015 tidak terjadi sejak 2016 setelah Akıncı kehilangan koalisinya akibat intrik politik internal. Selain itu, partai-partai nasionalis Turki kembali bangkit dibawah *Hüseyin Özgürün dan Serdar Denktaş* membuat Akıncı tidak leluasa menjalankan kebijakannya baik di pemerintahan maupun terkait mediasi konflik Cypriots. Disisi lain, Anastasiades mendapatkan tekanan dari oposisi seperti DIKO dan ELAM yang merupakan partai *anti-guarantees* dan anti-pendudukan pasukan asing di Siprus. Tekanan oposisi bagi keduanya telah memberikan dampak signifikan bagi terhambatnya proses mediasi konflik Cypriots sejak saat itu hingga konferensi terakhir di Crans-Montana, Swiss pada 28 Juni - 7 Juli 2017.

Pada 13 Februari 2017, Parlemen ROC menyetujui sebuah proposal yang didaftarkan oleh ELAM mengenai rencana perayaan *enosis* tahunan serta mengenalkan istilah tersebut dalam literatur dan diskusi di sekolah-sekolah Siprus. 19 anggota parlemen dari 5 partai berbeda menyetujui proposal tersebut, 16 anggota AKEL menolak, dan anggota parlemen kanan-tengah DISY (partai Anastasiades) abstain. Sebagai respons, Akıncı membatalkan pertemuan rutin dirinya dengan Anastasiades pada 14 Februari (Morelli, 2017: 4 - 19). Pada 15 Februari 2017, Mustafa Akıncı selaku pemimpin Turkish Cypriot mengirimkan surat kepada Sekjen António

Guterres mengatakan bahwa mediasi Cypriots kemungkinan gagal apabila aturan yang disahkan parlemen Siprus, mengizinkan diadakannya selebrasi *enosis* di Siprus tidak segera dicabut (Hürriyet Daily News, 2017). Dalam laporan Sekjen PBB kepada DK PBB bertanggal 28 September 2017 juga dijelaskan bahwa permasalahan tersebut menyebabkan perundingan dihentikan selama 2 bulan sejak 16 Februari hingga 11 April 2017, menurut Sekjen PBB hal itu menyebabkan *disputants* kehilangan waktu krusial disaat mereka mencapai banyak hal signifikan lainnya dalam perundingan di Swiss, 9 - 12 Januari 2017 (UNSC, 2017).

Anastasiades dan sepakat untuk bekerja tanpa mengenal lelah agar tercapai kesepakatan komprehensif mengenai Siprus sesegera mungkin. Dalam rentang waktu 15 Mei hingga 11 Agustus 2017, telah terjadi lebih dari 150 pertemuan antara delegasi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dengan difasilitasi PBB dengan 70 pertemuan dihadiri langsung oleh Anastasiades dan Akıncı. Selain itu, terdapat 369 pertemuan yang dihadiri oleh tim ahli untuk mempercepat proses penyelesaian konflik Siprus. Pada saat itu, proses pembicaraan mulai mengarah kepada *power-sharing* (pembagian kekuasaan) dalam bentuk pemerintahan federal, termasuk didalamnya adalah legislasi federal, pengadilan federal, aspek keamanan internal, hingga pembahasan satu kesatuan kewarganegaraan Siprus. Khusus mengenai hak kepemilikan properti untuk Cypriots (baik Greek Cypriot atau Turkish Cypriot), kedua belah pihak sepakat bahwa para hak kepemilikan perseorangan akan dihormati sekaligus menyatakan bahwa akan terdapat beberapa aturan alternatif yang mengatur hal tersebut. Mereka juga sepakat untuk memberikan beberapa pilihan bagi rakyat untuk memilih apakah akan mendapatkan kompensasi atau tukar tambah terkait hak kepemilikan properti (UNSC, 2017).

Kemudian, dalam lanjutan pertemuan ROC-Turkish Cypriot di Jenewa pada 9 - 12 Januari 2017 dan beberapa pertemuan terpisah sepanjang Januari - Februari 2017, kedua pihak tidak mencapai kata sepakat dalam hal batas wilayah. Terdapat perbedaan dalam peta yang dipresentasikan kedua belah pihak, pihak ROC memasukkan Morphou kedalam peta mereka

walaupun secara *de facto* wilayah tersebut berada dibawah administrasi Turkish Cypriot. Selain itu, pertemuan tidak mencapai kata sepakat karena Turki bersikeras untuk tetap menjalankan perannya sebagai *security guarantors* Turkish Cypriot di utara Siprus walaupun resolusi konflik telah terjadi serta meminta persamaan hak bagi Turkish Cypriot sesuai 4 prinsip kebebasan UE (perpindahan penduduk, barang, jasa, dan kepemilikan perseorangan). Suatu hal yang ditolak Anastasiades, sehingga delegasi Turkish Cypriot dan Turki memutuskan untuk meninggalkan pertemuan tersebut dan membuat mediasi tidak mencapai kesepakatan apapun (Morelli, 2018: 17 - 22).

Terakhir, dalam laporan Sekjen PBB kepada DK PBB bernomor S/2017/814 pada 28 September 2017. Sekjen PBB menyampaikan progres terakhir perundingan antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot bertajuk the Conference on Cyprus (Konferensi Siprus) pada 28 Juni - 7 Juli di Crans-Montana, Swiss. Namun keenganan kedua delegasi untuk menyepakati satu poin kesepakatan sebelum seluruh poin disetujui menyebabkan mediasi kembali tidak mencapai resolusi konflik. Isu utama dalam konferensi ini yang tidak terselesaikan adalah *security and guarantees*. Mengingat trauma yang dirasakan Cypriots pra-1974, sehingga menurut Sekjen PBB menyarankan adanya tinjauan ulang terhadap pasal IV Treaty of Guarantees (mengenai pengaturan hak intervensi *guarantors*) antara para pemimpin tertinggi Cypriots bersama Yunani-Turki-Britania Raya selaku *guarantors*. Selama 2008 – 2017, belum terdapat resolusi konflik yang tercapai antara pihak Greek Cypriot dan Turkish Cypriot karena Greek Cypriot dan Turkish Cypriot tidak mencapai kata sepakat pada isu-isu krusial seperti *security* (e.g. penarikan mundur pasukan Turki dari Siprus) dan *guarantees* (e.g. apakah Siprus memerlukan bantuan Yunani-Turki-Britania Raya untuk menjaga keamanan negara). Beberapa progres positif terjadi selama mediasi yang berlangsung di periode tersebut, yaitu dalam hal partisipasi (e.g. partisipasi politik dan HAM) dan hak kepemilikan properti Cypriots (UNSC, 2017).

Sebagaimana tujuan PBB sebagai mediator konflik internasional dan ingin menciptakan resolusi konflik yang adil baik bagi Greek Cypriot maupun Turkish Cypriot. Namun hal tersebut tidak mudah karena terdapat isu ideologi (*enosis* vs. *taksim*) dan *self-determination* (e.g. Turkish Cypriot ingin mendirikan "negara berdaulat") antara Greek Cypriot - Turkish Cypriot yang menghambat mediasi mencapai hasil yang diharapkan oleh *disputants* dan mediator (yaitu mencapai negara Siprus yang bizonal & bikomunal). Ditambah dengan kehadiran Yunani, Turki, dan Britania Raya sebagai *guarantors* yang mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri di Siprus (e.g. Turki mengirimkan tentara di wilayah Siprus Utara untuk menjaga komunitas Turkish Cypriot dari ancaman kekerasan oleh Greek Cypriot) membuat situasi menjadi semakin sulit diatasi. Hal ini disebut Fisher sebagai *intractable conflicts* sehingga memengaruhi kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017 (Fisher R. J., 2001a: 307)

BAB V

ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN MEDIASI SASG DALAM KONFLIK CYPRIOTS DENGAN KONSEP DETERMINAN KESUKSESAN DAN KEGAGALAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan operasionalisasi dari kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017 menggunakan konsep determinan kesuksesan mediasi oleh Marieke Kleiboer. Penulis akan menjelaskan gagasan terkait bagaimana terdapat banyak faktor penentu kegagalan mediasi, baik dari *nature of conflict* maupun para aktor yang terlibat didalamnya. Secara mendalam penulis akan menjelaskan faktor internal dan eksternal konflik yang memengaruhi kegagalan mediasi. Penulis akan mengawalinya dengan penjelasan satu persatu variabel, sub-variabel, dan indikator dari operasionalisasi konsep yang digunakan yaitu determinan kesuksesan dan kegagalan mediasi milik Marieke Kleiboer kedalam studi kasus yang dibahas yaitu penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

Menurut Kleiboer, kesuksesan mediasi dapat diraih apabila mediator berhasil berlaku seperti 2 variabel berikut, yaitu *contextual* dan *process variables*. Dalam kerangka teori, telah dijelaskan bahwa *contextual variable* terdiri atas *the characteristics of the dispute, the parties and their interrelationship, the characteristics of the mediator*, dan *the international context*. Sedangkan, *process variable* terdiri atas *communication, formulation*, dan *manipulation* (Kleiboer, 1996). Dalam bab ini penulis mencoba membahas satu per satu variabel, sub-variabel serta indikator yang digunakan Kleiboer untuk studi kasus kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

5.1. Contextual Variable

5.1.1. Characteristics of the Dispute

Dalam menganalisis *contextual variable* dalam suatu mediasi internasional, Kleiboer berpendapat bahwa *characteristics of the dispute* merupakan aktivitas yang dilakukan semua pihak

ketika masih dalam pra dan awal mediasi, sub-variabel ini terdiri atas 3 indikator, yaitu: 1) *Conflict ripeness*; 2) *The level of conflict intensity*; dan 3) *The nature of the issue(s) in conflict*.

5.1.1.1. *Conflict Ripeness*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi *ripeness* adalah dengan cara menentukan *timing*. *Timing* ditentukan berdasarkan durasi / peristiwa tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya konflik yang sedang berlangsung. Mediasi cenderung gagal apabila *conflict ripeness* terbentuk dari *clock time* (Kleiboer, 1996: 362 - 363).

Mengingat konflik telah berlangsung selama 55 tahun (sejak 1963) dan selama periode 2008 - 2017 telah terjadi berbagai momen *ripeness* seperti pergantian presiden serta normalisasi hubungan ROC dan Turkish Cypriot namun penulis melihat bahwa hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap kesuksesan mediasi konflik Cypriots. Ditinjau dari *clock time*, mediasi Cypriots yang berlangsung rutin sejak 1964 terutama oleh PBB namun tidak kunjung membuahkan hasil. Menurut penulis, hal ini mengakibatkan mediasi berada pada titik jenuh sehingga turut menyebabkan tingginya pesimisme Greek Cypriot dan Turkish Cypriot untuk mencapai resolusi konflik. Seperti mediasi oleh Galo Plaza dari *good offices* PBB sepanjang 1964 - 1965 beberapa bulan setelah *Bloody Christmas* 1963 terjadi, mediasi oleh sekjen Waldheim setelah invasi Turki ke Siprus 1974, mediasi oleh sekjen de Cuéllar sepanjang *proximity talks* 1980an (intensif setelah "Turkish Cypriot" berdiri pada 15 November 1983), hingga mediasi sekjen Annan pasca KTT Helsinki 1999 yang berakhir pasca referendum Annan Plan for Cyprus pada 2004.

Selama periode 2008 - 2017, tercatat beberapa kali momen *ripeness* yaitu pertama, terpilihnya pemimpin sayap-kiri Demetris Christofias (AKEL) sebagai presiden Siprus mengalahkan *incumbent* Tassos Papadopoulos (DIKO) pada 24 Februari 2008 membuat pertemuan resmi keduanya dapat dimulai pada 21 Maret 2008 dan berlanjut pada terbentuknya 6 *working groups* (Bentuk pemerintahan, UE, keamanan dan *guarantees*, teritori, properti, dan ekonomi) dan 7 komite teknik (kriminal, perdagangan dan ekonomi, kebudayaan, manajemen krisis, humaniter, kesehatan, dan

lingkungan). Pada 3 April 2008, Jl. Ledra dibuka sebagai bentuk *confidence-building measures* (Michael, 2012: 71 - 91). Namun kekalahan pemimpin kiri-tengah Mehmet Ali Talat (CTP) dalam pemilu legislatif 2009 dan pemilu presiden Turkish Cypriot 2010 menyebabkan dirinya harus digantikan Derviş Eroğlu dari partai sayap-kanan UBP sebagai PM baru Turkish Cypriot dan membuat mediasi Cypriots berjalan lambat.

Kedua, kemenangan Mustafa Akıncı dari partai kiri-tengah TDP sebagai presiden Turkish Cypriot dalam pemilu presiden 2015 membuat mediasi menciptakan beberapa progres positif. Salah satunya adalah *confidence-building measures* yang tercipta antara Akıncı - Anastasiades, mereka sepakat untuk membuka titik perbatasan baru di Deryneia sekaligus menghubungkan listrik antara wilayah ROC - Turkish Cypriot untuk pertama kalinya sejak invasi Turki di Siprus tahun 1974.

Pada 15 Mei 2015, DK PBB menyambut kelanjutan mediasi Cypriots dibawah SASG Eide. Pada 23 Mei 2015, kedua pemimpin melakukan perjalanan bersama disepanjang Jl. Ledra. Hal ini tentu meredakan ketegangan yang terjadi antara Anastasiades - Eroğlu sebelumnya (Morelli, 2018: 5 - 14).

Menjelang tahun baru 2016, terdapat *joint address* oleh Anastasiades dan Akıncı untuk menyambut tahun baru bagi Cypriots (Daily Sabah, 2015). Ditambah dengan keberhasilan SASG mempertemukan ROC dan Turkish Cypriot dalam konferensi Siprus yang berlangsung di Mont Pellerin (8 - 11 dan 20 - 22 November 2016), Jenewa (9 - 12 Januari 2017) dan Crans Montana (28 Juni - 7 Juli 2017) (UNSC, 2017). Namun sayangnya dalam ketiga pertemuan tersebut *disputants* dan *guarantors* gagal mencapai resolusi konflik. Semua hal tersebut membuktikan bahwa *ripeness* telah muncul berulang kali namun Greek Cypriot, Turkish Cypriot, dan *guarantors* bersama mediator tidak kunjung menemukan resolusi konflik.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa *clock time* menjadi salah satu faktor yang cenderung menyebabkan kegagalan mediasi Cypriots karena dengan rentangan konflik yang semakin panjang maka *disputants* semakin enggan untuk menyetujui hasil negosiasi atau bahkan menerima tawaran mediasi sehingga peluang untuk terjadinya resolusi konflik pun semakin kecil. Idealnya, mediasi diinisiasi dalam rentang waktu 12 hingga 36 bulan setelah terjadinya konflik.

Terbukti, sejak mediasi PBB pertama kali dilakukan pada 1964 Greek Cypriot dan Turkish Cypriot belum menemukan resolusi konflik hingga mediasi terakhir di Konferensi Siprus yang diadakan di Crans Montana pada 28 Juni - 7 Juli dimana Eide bertindak sebagai mediator.

5.1.1.2. *The Level of Conflict Intensity*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *the level of conflict intensity* dapat diidentifikasi dengan cara menentukan *the magnitude of violence*. *The magnitude of violence* ditentukan berdasarkan besaran kekuatan konflik yang sedang berlangsung sehingga memengaruhi *disputants* untuk menerima atau menolak mediator. Mediasi cenderung ditolak apabila tingkat intensitas konflik tinggi karena cenderung membentuk polarisasi sehingga *disputants* ingin memenangkan konflik dengan segala cara (Kleiboer, 1996: 363 - 364).

Melihat konflik Cypriots, periode 1955 - 1959 & 1963 - 1974 merupakan salah satu periode terkelam dalam sejarah Cypriots. Selain menimbulkan ribuan korban jiwa dan ratusan ribu pengungsi baik dari Greek Cypriot maupun Turkish Cypriot, periode tersebut juga merupakan dimana eskalasi konflik terjadi dan tidak hanya Cypriots yang terlibat namun terdapat Yunani, Turki, dan Britania Raya yang terlibat sebagai *guarantors* ditambah dengan kehadiran AS yang mempunyai kepentingan atas hubungan Yunani dan Turki (keduanya anggota NATO) (Bölükbaşı, 1998: 411 - 420).

Sebelum 1974 dan dilihat dari populasi, Greek Cypriot superior atas Turkish Cypriot. Hal ini pula yang membuat mereka dapat bertindak untuk membuat aturan-aturan baru bahkan mengajukan amandemen konstitusi pada 1963 sehingga membuat Turkish Cypriot merasa "dikucilkan" dan mundur secara serentak di pemerintahan pada waktu itu (PIO, 2018). Hal tersebut sangat terasa sehingga antara 1963 - 1974 korban jiwa lebih banyak berjatuhan di pihak Turkish Cypriot (Ker-Lindsay, 2004: 135). Namun, sejak invasi Turki pada 1974 keadaan menjadi sama kuat karena Turkish Cypriot mendapatkan perlindungan langsung dari

tentara Turki di 37% wilayah Siprus yang dikuasai dan pemerintahan ROC sedang tidak stabil akibat sedang memulihkan diri dari percobaan kudeta dan invasi Turki. Walaupun eskalasi konflik semakin berkurang, deklarasi Turkish Cypriot secara unilateral oleh Turkish Cypriot pada 15 November 1983 semakin menguatkan polaritas yang terjadi di Siprus sehingga konflik semakin sulit dimediasi dan dicari solusinya (Bölükbaşı, 1998: 420 - 422).

Terlebih, sejak 1974 posisi Turkish Cypriot menjadi semakin kuat karena didukung oleh Turki secara langsung yang dibuktikan dengan kehadiran tidak kurang dari 43.000 ditambah 3.500 pasukan asli Turkish Cypriot dan 26.000 pasukan cadangan sehingga membuat seluruh personel militer KTBK berjumlah 72.500. ROC sendiri mempunyai sekitar 8.500 - 12.500 pasukan ditambah 50.000 pasukan cadangan yang tergabung kedalam EF. Yunani membantu menjaga keamanan ROC dengan mengirim sekitar 950 ELDYK sehingga total keseluruhan pasukan menjadi sekitar 63.450 (Cyprus Mail, 2017). Greek Cypriot yang secara absolut menguasai pemerintahan ROC sejak 1964 berpendapat bahwa Turki secara ilegal menempatkan pasukannya di wilayah utara mereka namun tidak mampu melakukan apa-apa hingga saat ini karena kalah jumlah pasukan serta dukungan eksternal (Michael, 2012: 111). Britania Raya melalui BFC mempunyai sekitar 3.500 pasukan yang bertugas di Akrotiri dan Dhekelia (bagian dari SBA) (UK Defence Journal, 2018). Penempatan pasukan *guarantors* di Siprus telah diatur dalam *Treaty of Guarantee* yang menjadi salah satu dasar berdirinya ROC pada 16 Agustus 1960 (UN Peacemaker, 1960). UNFICYP sendiri hingga saat ini telah mengirimkan sekitar 150.000 pasukan perdamaian dan secara *de facto* menempatkan sekitar 888 pasukan yang sebagian besar berasal dari negara Argentina, Britania Raya, Slovakia, dan Hungaria (UNFICYP, 2018).

Selain perbandingan kekuatan militer, terdapat beberapa pertimbangan lain untuk menjustifikasi polaritas antara Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dalam periode 2008 - 2017. Kegagalan referendum *Annan Plan for Cyprus* 2004 menyebabkan mediasi dalam periode

2004 - 2008 tidak intens seperti sebelum 2004. Walau Christofias berhasil menjadi presiden ROC pada 2008, namun keinginan Talat untuk menggunakan *Annan Plan for Cyprus* sebagai basis mediasi ditolak Christofias karena penolakan Greek Cypriot yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya pasal yang mengatur penarikan mundur KTBK dari Siprus. Mediasi semakin memburuk dengan naiknya Eroğlu sebagai presiden menggantikan Talat pada 2010 karena pandangan nasionalis garis kerasnya (e.g. menyerukan kedaulatan Turkish Cypriot oleh dunia internasional) serta keinginan untuk semakin mendekatkan Turkish Cypriot dengan Turki (e.g. menolak penarikan mundur pasukan KTBK secara menyeluruh dan pemulangan pendatang Turki dari Siprus pasca invasi 1974) tidak dapat ditoleransi oleh Greek Cypriot. Pada akhir Mei 2012, mediasi berjalan stagnan dan PBB mengumumkan pemberhentian mediasi. Christofias dan Eroğlu tidak menolak keputusan PBB dan bahkan menyalahkan satu sama lain atas kegagalan mencapai resolusi konflik. Pelantikan Anastasiades sebagai presiden ROC pada 28 Februari 2013 sempat membangkitkan harapan akan tercapainya resolusi konflik dalam waktu dekat. Namun Anastasiades yang mendukung *Annan Plan for Cyprus* tidak mampu berbuat banyak karena partai koalisi kanan-tengah DIKO dan EVROKO (menolak *Annan Plan for Cyprus*) menginginkan perpindahan topik mediasi dari reunifikasi Siprus menjadi peningkatan tekanan ROC sebagai anggota UE terhadap Turki untuk menarik mundur pasukannya dari Siprus sesuai prospek Turki menjadi anggota UE. Sedangkan Turkish Cypriot juga menetapkan standar baru dalam mediasi dimana mereka menginginkan mediasi berlangsung atas dasar "2 negara, 1 dinamika, 1 meja perundingan baru, dan menentukan secara rinci jadwal pertemuan". Eroğlu menolak "pengembalian" Varosha kepada ROC sebagai ganti penggunaan pelabuhan Famagusta dibawah pengawasan UE, Eroğlu bahkan menyatakan bahwa resolusi konflik Cypriots hanya tercapai apabila terdapat 2 entitas setara di Siprus (negara Greek Cypriot dan negara Turkish Cypriot) karena perbedaan bahasa, agama, dan asal-usul keduanya. Perpecahan antara Anastasiades-Eroğlu memuncak setelah setelah kapal

eksplorasi Turki masuk kedalam wilayah selatan ZEE ROC setelah mengetahui adanya pembicaraan antara ROC, Yunani, Israel, dan Mesir mengenai SDA yang terdapat di Mediterania Timur. Hal tersebut menyebabkan Anastasiades mundur dari mediasi Cypriots. Kemenangan Mustafa Akıncı dalam pemilu presiden Turkish Cypriot 2015 membuka harapan baru akan tercapainya resolusi konflik. Dibuktikan pada kegiatan jalan bersama Anastasiades-Akıncı pada 23 Mei di Jl. Ledra dan *joint address* tahun baru 2016, sebuah hal yang dilakukan untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara Anastasiades-Eroğlu sebelumnya. Namun tekanan dari internal ROC dan Turkish Cypriot sepanjang 2016, seperti masuknya ELAM kedalam parlemen ROC pada 2016 serta usulan oposisi DIKO dan KOSP agar parlemen meloloskan resolusi mengenai tidak akan ada kesepakatan yang mengizinkan "pasukan asing" bercokol di Siprus. Di pihak Turkish Cypriot terdapat pembentukan koalisi pemerintahan Turkish Cypriot konservatif yang dipimpin oleh PM Hüseyin Özgür (UBP) yang mengancam kedudukan Akıncı sebagai presiden. Pertemuan Mont Pellerin, Jenewa, dan Crans Montana yang berlangsung selama 2016 - 2017 tidak mampu menghasilkan resolusi konflik akibat polaritas yang terjadi antara Greek Cypriot, Turkish Cypriot, Yunani dan Turki selaku *guarantors*. Hal tersebut terlihat dari isu-isu yang tidak mampu teresolusi seperti teritori dan *security guarantees* (Morelli, 2017: 3 - 21).

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa polaritas konflik Cypriots cenderung tidak menyebabkan kegagalan mediasi (e.g. penerimaan tawaran mediasi PBB) apabila tingkat intensitas konflik tinggi. Polaritas konflik cenderung membentuk polarisasi sehingga *disputants* ingin memenangkan konflik dengan segala cara (Kleiboer, 1996: 363 - 364).

5.1.1.3. *The Nature of the Issue(s) in Conflict*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *the nature of the issue(s) in conflict* terdiri atas 5 jenis isu kedaulatan (klaim teritorial), ideologi (politik, sosial, dan kepercayaan), keamanan (keamanan wilayah dan perbatasan), *self-determination* (kemerdekaan), dan isu lainnya. isu ideologi atau *self-determination* menjadi isu yang paling tidak mungkin untuk dimediasi daripada isu teritorial atau keamanan (Kleiboer, 1996: 364).

Berkaitan dengan konflik Cypriots, isu-isu ideologi dan *self-determination* berakar dari perbedaan etnis, agama, kebudayaan yang berujung pada *enosis* vs. *taksim*. *Enosis* berakar dari keinginan Greek Cypriot untuk bergabung dengan *motherland* (tanah air), yaitu Yunani. Semangat *enosis* yang didukung oleh keberadaan Greek Cypriot sebagai mayoritas penduduk Siprus menyebabkan mereka mampu berbuat lebih daripada Turkish Cypriot di pemerintahan. Pada 1963, *enosis* pula yang menyebabkan Makarios III mengajukan amandemen terhadap konstitusi Siprus 1960. *Enosis* pula yang menyebabkan terjadinya *walk out* (berjalan keluar) Turkish Cypriot dari pemerintahan ROC, dan *Enosis* pula yang menyebabkan terjadinya *Bloody Christmas* 1963 sekaligus mendorong Turki mengaktifkan pasal 4 *Treaty of Guarantee* untuk menginvasi Siprus pada 1974 (Ker-Lindsay, 2004).

Pada periode 2008 - 2017, *enosis* sangat terlihat beberapa minggu setelah konferensi di Jenewa berakhir. Pada 13 Februari 2017, Parlemen ROC menyetujui sebuah proposal yang didaftarkan oleh partai sayap-kanan ELAM mengenai rencana perayaan *enosis* tahunan serta mengenalkan istilah tersebut dalam literatur dan diskusi di sekolah-sekolah Siprus. 19 anggota parlemen dari 5 partai berbeda menyetujui proposal tersebut, 16 anggota AKEL menolak, dan anggota parlemen DISY (partai Anastasiades) abstain. Sebagai respons, Akıncı membatalkan pertemuan rutin dirinya dengan Anastasiades pada 14 Februari (Morelli, 2017: 19).

Pada 15 Februari 2017, Mustafa Akıncı selaku pemimpin Turkish Cypriot mengirimkan surat kepada Sekjen António Guterres mengatakan bahwa mediasi Cypriots kemungkinan gagal apabila aturan yang disahkan parlemen Siprus, mengizinkan diadakannya selebrasi *enosis* di Siprus tidak segera

dicabut (Hürriyet Daily News, 2017). Dalam laporan Sekjen PBB kepada DK PBB bertanggal 28 September 2017 juga dijelaskan bahwa permasalahan tersebut menyebabkan perundingan dihentikan selama 2 bulan sejak 16 Februari hingga 11 April 2017, menurut Sekjen PBB hal itu menyebabkan *disputants* kehilangan waktu krusial disaat mereka mencapai banyak hal signifikan lainnya dalam perundingan di Swiss, 9 - 12 Januari 2017 (UNSC, 2017). Kemudian, parlemen ROC mencabut sebagian keputusan mengenai *enosis* (e.g. menunda implementasi aturan diskusi mengenai *enosis* di sekolah-sekolah), sehingga mendorong Akinci untuk kembali bernegosiasi dengan Anastasiades (Morelli, 2017: 19).

Turkish Cypriot pun tidak dapat dilepaskan dari isu ideologi dan *self-determination*, dengan *taksim* menjadi pendorong utamanya. *Taksim* yang berarti pemisahan, mulai bergaung sejak 1957 ketika Turkish Cypriot dilanda kekhawatiran akan diusir dari pulau Siprus seperti yang terjadi pada minoritas Turkish Cretan (orang Turki yang menghuni pulau Kreta) pada awal abad ke-20. Walau pada awalnya *taksim* dimaknai sebagai upaya Turkish Cypriot untuk mempertahankan Siprus pada penguasaan pemerintah kolonial Britania Raya, namun setelah kemerdekaan *taksim* berubah menjadi sebuah gerakan *self-determination* Turkish Cypriot untuk mempunyai sebuah negara sendiri di Siprus (Ker-Lindsay, 2004). Hal ini didukung oleh Turki, dan pada 1974 negara tersebut menginvasi Siprus setelah selama 1963-1974 Turkish Cypriot terus berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena status mereka sebagai minoritas yang menolak *enosis*. *Self-determination* diperparah dengan deklarasi Turkish Cypriote cara unilateral oleh Turkish Cypriot pada 15 November 1983 (Bölükbaşı, 1998: 420 - 422). Hal tersebut sempat menurun ketika 64,9% Turkish Cypriot mendukung Annan Plan for Cyprus 2004 berbanding 35,09% Turkish Cypriot menolaknya (Chadjipadelis & Andreadis, 2007: 5).

Sepanjang periode 2008 - 2017, Turkish Cypriot pada masa pemerintahan Eroğlu pun menerapkan kebijakan "garis keras" seperti penetapan standar mediasi "2 negara, 1 dinamika, 1 meja perundingan baru, dan menentukan secara rinci jadwal pertemuan". Eroğlu bahkan menyatakan bahwa resolusi konflik Cypriots hanya tercapai apabila terdapat 2 entitas setara di Siprus (negara Greek Cypriot dan negara Turkish Cypriot) karena perbedaan bahasa, agama, dan asal-usul keduanya. Hal

tersebut semakin menegaskan polarisasi antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot sekaligus memastikan bahwa isu ideologi dan *self-determination* merupakan isu *zero-sum* (Morelli, 2017: 5 - 10).

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode 2008 - 2017, isu ideologi dan *self-determination* cenderung menyebabkan kegagalan mediasi Cypriots. Selain merupakan isu *zero-sum*, kedua isu tersebut mendorong Greek Cypriot dan Turkish Cypriot tidak bersepakat dalam hal-hal lainnya seperti teritori (e.g. Eroğlu menolak mengembalikan Varosha kepada ROC) dan keamanan (e.g. Turkish Cypriot menolak penarikan mundur pasukan Turki dari wilayahnya) sehingga menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots (Morelli, 2017: 24).

5.1.2. *Parties and their Interrelationship*

Dalam menganalisis *parties and their interrelationship* dalam suatu mediasi internasional, Kleiboer berpendapat bahwa hal tersebut merupakan aktivitas yang dilakukan semua pihak ketika berada dalam tahap keseluruhan mediasi, sub-variabel ini terdiri atas 6 indikator, yaitu: 1) *Identification of Parties*; 2) *Cohesiveness: Constituencies and Representatives*; 3) *Type of Regime*; 4) *Motives to Accept Mediation*; dan 5) *Previous and Ongoing Relationships between Parties*.

5.1.2.1. *Identification of Parties*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *identification of parties* cenderung menggagalkan mediasi apabila mediator tidak mampu mengidentifikasi karakteristik dan ruang lingkup *disputants*. Selain itu, apabila tidak ada *recognition* antar *disputants*, maka hal tersebut akan memperbesar peluang kegagalan mediasi. (Kleiboer, 1996: 365).

Dalam mediasi konflik Cypriots, SASG tidak mampu mengidentifikasi karakteristik dan ruang lingkup baik Greek Cypriot dan Turkish Cypriot secara baik. Hal ini terlihat dari *blunder* yang dilakukan oleh SASG Downer pada 26 Mei 2010. Pada waktu itu, Christofias dan Eroğlu mengadakan

pertemuan resmi pertama dan kontroversi terjadi ketika Downer membacakan pernyataan Sekjen Ban yang memberi ucapan selamat terhadap berlangsungnya mediasi kembali dan berangkat dari poin-poin yang telah disepakati oleh Christofias - Talat pada 30 Maret 2010. Menurut PBB, hal tersebut merupakan kesepakatan perjanjian. Seketika itu, beberapa politisi ROC memprotes pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa ROC tidak berada dalam posisi menyetujui pernyataan Sekjen Ban dan kesepakatan yang telah dicapai saat pertemuan Christofias - Talat. Eroğlu berpendapat bahwa Turkish Cypriot tidak akan terikat kesepakatan yang terjadi di masa pemerintahan Talat sekaligus menolak segenap resolusi DK PBB yang meminta agar Turki menarik mundur pasukannya dari wilayah Turkish Cypriot (Morelli, 2017: 6). *Shuttle diplomacy* yang dilakukan SASG Eide pun terasa sia-sia karena Anastasiades - Akıncı pada 4 Juni 2017 telah sepakat bahwa tidak akan ada kesepakatan apabila terdapat satu poin negosiasi yang tidak disepakati (UNSC, 2017).

Selain itu, Greek Cypriot dan Turkish Cypriot tidak mau mengakui satu sama lain. Greek Cypriot yang mengisi pemerintahan ROC tidak mau mengakui Turkish Cypriot sebagai sebuah entitas mandiri, ROC justru menganggap bahwa Turkish Cypriot merupakan bagian dari mereka sekaligus meminta agar Turki pergi dari wilayahnya. Turkish Cypriot menganggap bahwa pada 1974 Turki melakukan "operasi damai" sebagai guarantor untuk menjaga keamanan dan integritas Turkish Cypriot akibat intervensi junta militer Yunani di Siprus (Michael, 2012: 111).

Selain itu, konflik Cypriots adalah konflik internal mereka dan pihak asing seperti PBB seharusnya tidak turut campur dalam permasalahan ini. Hal ini sejalan dengan pemikiran Kyprianou dan Papandreou pada awal 1980an, dimana mereka menganggap bahwa konflik Cypriots adalah konflik internal negara Siprus dan meminta PBB agar menghukum Turki karena telah melanggar kedaulatan Siprus pasca invasi di tahun 1974 (Bölükbaşı, 1998: 422).

Sebaliknya, Turki dan Turkish Cypriot tidak menganggap ROC sebagai sebuah negara namun hanya entitas. Hal ini terlihat dalam situs kementerian luar negeri pemerintah Turki dan Turkish Cypriot yang tidak pernah menyebutkan satu kata ROC pun disana. Mereka memilih untuk menggunakan kata "Greek Cypriot" apabila merujuk kepada ROC. Tentu hal tersebut membuat mediasi

berjalan tidak mudah karena tidak adanya pengakuan antar *disputants* walau penulis melihat bahwa memang Turkish Cypriot tidak diakui oleh ROC dan PBB. Kenehan juga terjadi karena Turki sebagai *guarantors* menolak untuk mengakui legitimasi ROC dan memilih untuk memakai kata "Greek Cypriot" apabila merujuk kepada pemerintah di bagian selatan pulau Siprus tersebut (Republic of Turkey: Ministry of Foreign Affairs, 2011).

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa *identification of parties* cenderung menyebabkan kegagalan mediasi Cypriots periode 2008 - 2017 akibat SASG tidak dapat mengidentifikasi karakteristik dan ruang lingkup Greek Cypriot dan Turkish Cypriot serta tidak adanya *recognition* antara kedua etnis tersebut.

5.1.2.2. Cohesiveness: Constituencies and Representatives

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *cohesiveness: Constituencies and representatives* mempunyai kecenderungan untuk menggagalkan mediasi apabila tidak terdapat perwakilan yang berwenang dalam negosiasi serta mengimplementasikan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, terdapat lebih dari 1 konstituen di setiap *disputant*. Konstituen yang mempunyai satu suara akan menciptakan stabilitas internal sehingga memperbesar kesuksesan mediasi (Kleiboer, 1996: 365 - 366).

Dalam mediasi konflik Cypriots, penulis melihat terdapat *cohesiveness: constituencies and representatives* baik dari pihak Greek Cypriot maupun Turkish Cypriot. Pertama, baik pihak Greek Cypriot maupun Turkish Cypriot mempunyai perwakilan yang berwenang dalam negosiasi serta mengimplementasikan perjanjian. Semisal, pihak Greek Cypriot mewakilkan wewenang tersebut pada Christofias dan Anastasiades atau Turkish Cypriot mewakilkan wewenang tersebut pada Talat, Eroğlu, dan Akıncı sepanjang periode 2008 - 2017. Penulis merasa bahwa nama-nama tersebut telah cukup membuktikan bahwa mereka mempunyai perwakilan yang sah dan kapabel dalam mediasi konflik Cypriots (Morelli, 2017).

Kedua, *cohesiveness* sangat terasa di kedua etnis tersebut yang didorong oleh pengalaman masa lalu. Kenangan / cerita masa lalu aksi kekerasan yang dilakukan Greek Cypriot terhadap Turkish Cypriot pada 1957 - 1974 serta invasi Turki ke Siprus pada 1974 yang memaksa terjadinya eksodus penduduk besar-besaran, baik Greek Cypriot menuju daerah selatan dan Turkish Cypriot menuju utara membuat *cohesiveness* diantara kedua etnis tersebut sangatlah kuat. Ditambah dengan kuatnya sentimen *enosis* dan *taksim*, kendati beberapa kali terjadi perbedaan pendapat di parlemen dan publik ROC dan Turkish Cypriot. Namun hal tersebut wajar dalam negara demokrasi dan itu tidak membuat pemimpin mereka untuk memaksakan suatu keputusan diluar kehendak rakyat. Dibuktikan dalam 2 kesempatan wawancara yang dilakukan *Cyprus Mail* kepada Greek Cypriot dan Turkish Cypriot dengan pertanyaan pandangan mereka terhadap satu sama lain. Dari 7 narasumber, 2 orang menyatakan mempunyai pandangan positif, 3 negatif, dan 2 abstain (*Cyprus Mail*, 2016). Sedangkan ketika 12 narasumber Turkish Cypriot diberi pertanyaan yang sama, 5 orang menyatakan mempunyai pandangan positif dan 7 negatif (*Cyprus Mail*, 2016). Alasan positif yang diberikan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot cenderung sama, seperti karena percaya bahwa manusia tidak ada yang sempurna sehingga menyadari bahwa mereka perlu diberikan kesempatan kembali untuk berdamai dan hidup bersama sebagai Cypriots. Alasan negatif yang diberikan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot pun cenderung sama seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada paragraf sebelumnya, yaitu khawatir trauma masa lalu akan terulang.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa *cohesiveness: Constituencies and representatives* cenderung tidak menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots periode 2008 - 2017 karena baik ROC maupun Turkish Cypriot mempunyai perwakilan resmi dalam negosiasi dan berwenang untuk mengimplementasikan perjanjian serta hanya terdapat 1 konstituen di masing-masing pihak.

5.1.2.3. *Type of Regime*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *type of regime* mempunyai kecenderungan untuk menggagalkan mediasi apabila *disputants* menganut rezim non-demokrasi, karena rezim tersebut cenderung lebih sulit menerima tawaran mediasi (Kleiboer, 1996: 366).

Dalam mediasi konflik Cypriots, penulis menemukan fakta bahwa baik ROC dan Turkish Cypriot menganut rezim demokrasi. ROC merupakan sebuah negara republik presidensial, dan Turkish Cypriot merupakan sebuah negara republik semi-presidensial (The semi-presidential one, 2008). Republik presidensial berarti bahwa kepala negara dan pemerintahan dijabat oleh presiden sedangkan republik semi-presidensial berarti bahwa kepala negara merupakan presiden sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri (The semi-presidential one, 2008).

Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis tidak menemukan keterkaitan antara tipe rezim yang dianut ROC dan Turkish Cypriot dengan kegagalan mediasi konflik Cypriots. Maka dari itu, penulis berkesimpulan bahwa *type of regime* cenderung tidak menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

5.1.2.4. *Motives to accept Mediation*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *motives to accept mediation* cenderung gagal apabila *disputants* menerima tawaran mediasi pihak ketiga berdasarkan pertimbangan taktik dan strategi tertentu (Kleiboer, 1996: 367).

Dalam mediasi konflik Cypriots, pada 1964 DK PBB menanggapi konflik Cypriots dengan mengesahkan UNFICYP dan meminta Sekjen PBB untuk memediasi konflik Cypriots. Sekjen PBB pun telah membentuk *good offices* dan menunjuk beberapa mediator dalam konflik tersebut, seperti Galo Plaza pada 1964 - 1965. Turkish Cypriot menerima tawaran mediasi yang diajukan *good offices* bahkan rela untuk melepaskan hak veto dan hidup di ROC sebagai "minoritas" karena berharap mereka tidak mengungsi lagi dan dapat kembali ke rumah mereka secepatnya. Namun, keadaan berbalik sejak invasi

Turki 1974 yang berujung pada dibangunnya *buffer zone / green line* oleh UNFICYP untuk mencegah aneksasi Siprus oleh Turki secara keseluruhan serta deklarasi Turkish Cypriot secara unilateral oleh Turkish Cypriot pada 15 November 1983 (Bölükbaşı, 1998: 420).

Sejak *Annan Plan for Cyprus* gagal disahkan pada 2004, seruan untuk reunifikasi semakin menguat baik di pihak Greek Cypriot dan Turkish Cypriot. Greek Cypriot masih menginginkan pengusiran tentara Turki dari Siprus utara sehingga kedaulatan 100% menjadi milik ROC, sedangkan Turkish Cypriot "lelah" dengan stagnasi perekonomian akibat embargo yang dijatuhkan ECJ pada produk ekspor Turkish Cypriot setelah deklarasi kemerdekaan secara unilateral pada 1983 (Talmon, 2001: 736).

Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis tidak menemukan cukup bukti bahwa pertimbangan taktik dan strategi tertentu menjadi alasan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot menerima tawaran mediasi PBB. Terlebih, penulis menganalisis bahwa penerimaan tawaran mediasi oleh mereka berdua murni berdasarkan pada keinginan untuk mencari penyelesaian konflik tanpa adanya pertimbangan strategi tertentu (e.g. Greek / Turkish Cypriot berlandung dibalik SASG untuk menjalankan kepentingannya). Sehingga *motives to accept mediation* cenderung tidak menyebabkan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

5.1.2.5. *Previous and Ongoing Relationships between Parties*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *previous and ongoing relationships between parties* mempunyai kecenderungan untuk menggagalkan mediasi apabila *disputants* hanya tertarik untuk memulai dan mempertahankan hubungan jangka pendek serta mempunyai sejarah persahabatan atau kerja sama yang buruk di masa lalu (Kleiboer, 1996: 367).

Dalam mediasi konflik Cypriots, penulis menemukan fakta bahwa walau kedua pihak menginginkan hubungan jangka panjang yang tercermin dari banyak pernyataan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot sejak era Christofias - Ali Talat namun kedua etnis tersebut telah mempunyai sejarah

persahabatan yang buruk di masa lalu. Terutama, pada 1955 dimana EOKA dan TMT saling meneror satu sama lain dengan Greek Cypriot, Turkish Cypriot, dan pemerintah kolonial Britania Raya menjadi sasarannya (Ker-Lindsay, 2004: 16). Hal tersebut berlanjut pada 1963 sewaktu *Bloody Christmas* hingga 1974 sewaktu invasi Turki ke Siprus. Peristiwa tersebut tentu akan selalu diingat dan diceritakan oleh setiap Greek Cypriot dan Turkish Cypriot kepada generasi selanjutnya (Morelli, 2018: 2 - 3).

Selama periode 2008 - 2017, niat untuk memulai hubungan jangka panjang telah dimulai sejak terpilihnya Christofias sebagai presiden ROC pada 2008, ditambah dengan kehadiran Ali Talat sebagai pendukung reunifikasi dan presiden Turkish Cypriot. Negosiasi untuk mengakhiri konflik pun kembali dilanjutkan kedua belah pihak untuk pertama kalinya sejak referendum berlangsung pada 2004. Terpilihnya Eroğlu sebagai presiden Turkish Cypriot pada 2010 sempat membuat mediasi berjalan stagnan. Namun, terpilihnya Anastasiades sebagai presiden ROC pada 2013 serta Akıncı sebagai presiden Turkish Cypriot pada 2015 kembali membuka harapan publik akan tercapainya resolusi konflik. Namun sayangnya, setelah pertemuan Crans Montana pada berakhir pada 7 Juli 2017 tanpa menghasilkan suatu keputusan apapun. Kedua pemimpin ini belum mengadakan negosiasi. SASG Eide pun mengakhiri masa tugasnya pada Agustus 2017 karena ingin mengikuti pemilu legislatif di Norwegia dan hingga saat ini, belum ada yang menggantikannya (Cyprus Mail, 2018).

Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa sejarah persahabatan Greek Cypriot dan Turkish Cypriot buruk di masa lalu namun disaat yang sama keduanya ingin memulai hubungan jangka panjang. Sehingga, *previous and ongoing relationships between parties* cenderung tidak menyebabkan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

5.1.2.6. *Balance of Power*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *balance of power* mempunyai kecenderungan untuk menggagalkan mediasi apabila terjadi *power disparity* dalam konflik. *Power disparity* yang ditunjukkan *disputant* dengan power lebih besar terhadap lawannya dengan cara

menolak mediasi atau menghalangi pencapaian konsesi karena merasa mampu memaksakan kehendaknya terhadap *disputant* yang mempunyai *power* lebih lemah (Kleiboer, 1996: 368).

Dalam mediasi konflik Cypriots, *balance of power* baru terjadi setelah invasi Turki 1974 dimana Turkish Cypriot yang terus terdesak keadaannya sejak 1963 berbalik unggul saat invasi Turki di Siprus berlangsung pada tahun 1974. Apabila bukan karena UNFICYP menjaga *buffer zone*, kemungkinan ekspansi Turki akan berlanjut hingga seluruh Siprus dikuasai (Bölükbaşı, 1998: 419 - 420). Sejak saat itu, konflik Cypriots berada pada tahap *entrapment* dengan kedudukan yang seimbang antara Greek Cypriot dan Turkish Cypriot. Greek Cypriot didukung Yunani, Turkish Cypriot didukung Turki, sedangkan Britania Raya cenderung netral dalam konflik ini (Ker-Lindsay, 2004: 9 - 10).

Selama periode 2008 - 2017, *power parity* tetap terjaga antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot. Walaupun ROC telah menjadi anggota UE dan menikmati segenap keuntungan didalamnya ketika Turkish Cypriot tidak mendapatkannya sama sekali. Turkish Cypriot mempunyai Turki sebagai penyuplai utama perekonomian Turkish Cypriot. Ditambah lagi, Turkish Cypriot bersama Turki dapat segera bangkit pasca krisis finansial 2008 dimana ROC dan Yunani hingga kini masih berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya. Menurut penulis, adanya *power parity* membuat *balance of power* cenderung tidak menyebabkan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

5.1.3. *Characteristics of the Mediator*

Dalam menganalisis *characteristics of the mediator* dalam suatu mediasi internasional, Kleiboer berpendapat bahwa hal tersebut merupakan karakteristik, kemampuan, serta status mediator dalam mediasi, sub-variabel ini terdiri atas 3 indikator, yaitu: 1) *(Im)partiality and motives*; 2) *Leverage*; 3) *Status*.

5.1.3.1. (Im)partiality and Motives

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *(im)partiality and motives* mempunyai kecenderungan untuk menggagalkan mediasi apabila mediator *impartial* (tidak ada hubungan sama sekali dengan *disputant* sebelum ditunjuk sebagai mediator) karena minim *resource* dan *interest* terhadap konflik (Kleiboer, 1996: 369 - 371).

Dalam mediasi konflik Cypriots, mediator yang berasal dari PBB telah beberapa kali disebut tidak adil. Selama periode 2008 - 2017, SASG sering disebut *partial* oleh kedua pihak. Oposisi pemerintahan Anastasiades menyatakan bahwa SASG Eide terlalu memihak terhadap Turkish Cypriot karena tidak mampu membendung tekanan internasional terhadap Anastasiades terkait rencananya untuk "mengusir" tentara Turki dari Siprus. Selain itu, oposisi menuduh Anastasiades merombak seluruh *pre-condition* mediasi Crans Montana (e.g. debat mengenai keamanan dan teritorial sebagai prioritas). Mereka pun menuduh Anastasiades mendelegasikan seluruh dokumen terkait keamanan pada SASG Eide, yang dirasa bias kepada Turki. Akıncı pun demikian, tekanan oposisi begitu keras terhadapnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan para pemimpin oposisi Turkish Cypriot terhadap rancangan teritorial yang diajukannya (Morelli, 2018: 19 - 25).

Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa sebetulnya SASG dan segenap mediator PBB lainnya berusaha untuk *impartial* sesuai *guidelines* resmi PBB menyatakan bahwa setiap mediator PBB mempunyai mandat agar bersikap *impartial* dengan tetap memegang prinsip dan nilai-nilai universal sehingga *disputants* menghargai keberadaannya (The UN Peacemaker, 2012: 10). Namun, sesuai dengan pernyataan para ahli seperti Bercovitch, Rubin, dan Zartman bahwa bersikap *impartial* bukanlah netral karena kompleksitas dan dinamika yang terjadi antara mediator dengan *disputants* terkait *resources* dan *interest* terhadap *dispute* dan *outcome* konflik (Bercovitch & Rubin, 1992: 6 - 7). Sedangkan sifat bias terkadang menjadi salah satu faktor penerimaan individu / kelompok sebagai mediator karena *disputant* yang lebih kuat percaya bahwa mediator akan berpihak kepada mereka dalam mediasi sedangkan *disputant* yang lebih lemah percaya bahwa mediator akan

mempengaruhi lawannya sehingga tercipta kesepakatan yang tidak merugikan mereka (Zartman, 2008: 155). Menurut Kleiboer, *impartiality* merupakan penekanan sikap mediator terhadap *disputants* selama mediasi berlangsung sedangkan *neutrality* adalah fakta bahwa tidak ada satupun hubungan positif-negatif yang kuat antara mediator dengan *disputants* sebelum mediasi berlangsung. Namun yang terpenting adalah melihat bagaimana efek *impartiality* dalam kesuksesan dan kegagalan mediasi (Kleiboer, 1996: 369).

Penulis menyimpulkan bahwa *(im)partiality and motives* cenderung tidak menyebabkan penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017 karena berulang kali PBB melalui segenap perwakilannya dipercaya untuk menjadi mediator konflik Cypriots. Penulis percaya, hal ini disebabkan karena Greek Cypriot dan Turkish Cypriot menganggap bahwa mediator PBB selalu bersikap *impartial (trust-based mediator)* serta cenderung berpihak terhadap salah satu *disputant* karena adanya *resource* dan *interest* mediator terhadap konflik. Suatu hal yang terlihat sepanjang 1964 - 1974 (mediator PBB cenderung bias terhadap Turkish Cypriot untuk mencegah korban jiwa yang lebih besar) dan begitupun sebaliknya pada 1974 (mediator PBB cenderung bias terhadap Greek Cypriot untuk mencegah invasi Turki meluas di Siprus) (Bölükbaşı, 1998: 416 - 421). Suatu hal yang menurut Kleiboer seharusnya memperbesar peluang kesuksesan mediasi (Kleiboer, 1996: 369).

5.1.3.2. *Leverage*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *leverage* mempunyai kecenderungan untuk menggagalkan mediasi apabila mediator tidak memiliki cukup *resources* untuk memengaruhi *disputants*. (Kleiboer, 1996: 371 - 372).

Dalam mediasi konflik Cypriots, pada hakikatnya SASG mempunyai modal besar yaitu seorang mediator PBB. ROC, Yunani, Turki, dan Britania Raya selaku *guarantor* tercatat sebagai anggota PBB. Maka, diatas kertas Greek Cypriot bersama Yunani, Turkish Cypriot bersama Turki, dan Britania Raya seharusnya mengikuti apapun yang diputuskan oleh DK PBB maupun Majelis Umum

PBB (e.g. menarik mundur pasukan *guarantors* dari Siprus). Namun sayangnya, hal tersebut tidak terjadi. Seperti contoh, telah banyak resolusi dari DK PBB yang dikeluarkan terkait Siprus seperti resolusi no. 353 dan 360 yang dikeluarkan DK PBB sesaat setelah invasi Turki tahun 1974 meminta agar seluruh pihak menghormati kedaulatan ROC serta menarik mundur pasukannya namun sayangnya tidak dipatuhi oleh Yunani, Turki, bahkan oleh Britania Raya selaku salah satu P-5 (Resolution 360, 1974). Kemudian resolusi no. 541 menyayangkan sekaligus tidak mengakui berdirinya Turkish Cypriot pada 1983 (Resolutions 541, 1983). Terakhir, resolusi no. 1250 meminta semua pihak untuk duduk bersama tanpa *preconditions* dan berkomitmen untuk mendukung tercapainya negosiasi yang komprehensif (Resolutions 1.250, 1999). Seluruh resolusi diatas tidak dipatuhi oleh *disputants* dan *guarantors*, terbukti Turkish Cypriot masih berdiri dan berjalan dibawah perlindungan Turki dan terdapat *preconditions* yang ditentukan oleh masing-masing Greek Cypriots dan Turkish Cypriot sebelum mediasi berlangsung sebelum dan selama periode 2008 - 2017 (Morelli, 2018: 1 - 35).

Penulis menyimpulkan bahwa *leverage* cenderung menyebabkan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017 karena seandainya SASG mempunyai *resources* (terdiri atas *power* dan *influence*) yang cukup maka resolusi konflik dapat segera tercapai. *Power* berasal dari kemampuan mediator untuk tegas terhadap *disputant* dan *influence* berasal dari kemampuannya dalam memengaruhi *disputant* agar berjalan sesuai arah yang diinginkan mediator. Menurut penulis, SASG seharusnya dapat memaksimalkan perannya sebagai mediator untuk meminta Sekjen PBB agar bersikap lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Siprus seperti pendudukan tentara Turki di wilayah Siprus utara sekaligus membantu pendirian Turkish Cypriot pada 1983 dan memaksa ROC agar menghargai HAM Turkish Cypriot di Siprus. Namun SASG bukan satu-satunya pihak yang patut disalahkan atas kegagalan mediasi Cypriots selama ini, karena Sekjen PBB pun sebenarnya dapat merayu DK PBB (termasuk P-5), Majelis Umum PBB, dan IGO lainnya seperti NATO dan UE untuk lebih menekan ROC, Turkish Cypriot, Yunani, Turki, dan Britania Raya agar lebih serius mencari resolusi konflik terbaik walau hal tersebut akan merugikan diri mereka masing-masing selaku *disputants* dan *guarantors*.

5.1.3.3. *Status*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *status* mempunyai kecenderungan untuk menggagalkan mediasi apabila *status* dan kemampuan mediator untuk menggerakkan organisasinya rendah dalam mediasi serta tidak berada pada *rank* yang setara dengan *disputants* dalam konflik (Kleiboer, 1996: 372 - 373).

Dalam mediasi konflik Cypriots, SASG Downer dan Eide sudah mempunyai *status* yang tinggi sehingga kapabel untuk memediasi konflik tersebut. Keberadaan Downer dan Eide sebagai SASG yang mempunyai reputasi serta latar belakang cukup baik, dengan Downer merupakan sebagai mantan menteri luar negeri Australia sejak 11 Maret 1996 hingga 3 Desember 2007 dan Eide sebagai menteri pertahanan Norwegia sejak 11 November 2011 dilanjutkan dalam perannya sebagai menteri luar negeri Norwegia sejak 21 September 2012 hingga 16 Oktober 2013. Selain itu, Downer telah terlibat dalam misi-misi perdamaian maupun PBB seperti memimpin misi Australia dalam proses perdamaian konflik Bougainville 2001, dan membantu PBB dalam mengusulkan referendum dan pemasukan INTERFET ke Timor Leste pada 1999. Selain itu Downer, pernah terlibat sebagai diplomat Kemlu Australia dalam misi Australia di UE, NATO, dan Kedubes Australia di Belgia dan Luksemburg (Parliament of Australia, 2018). Sedangkan Eide terlibat dalam misi PBB sejak 1993 yang dimulai dari pekerjaan sebagai peneliti senior di SIPRI & NUPI hingga menjadi kepala program NUPI pada 1996, *co-chairs* dalam studi pengembangan kebijakan dalam integrasi operasi perdamaian UN-ECHA sejak 2005, dan beberapa misi lainnya seperti *managing director* WEF 2014-2016 dan *co-chairs* WEF sejak 2016. Dalam pemerintahan Norwegia, Eide pernah menjabat sebagai Wamenlu (2000-2001, 2010-2011) dan Wamenhan (2005-2010) Norwegia (CSIS, 2018).

Sedangkan untuk *rank*, penulis tidak melihat ada perbedaan antara SASG Downer dan Eide dengan perwakilan yang terlibat dalam mediasi konflik Cypriots periode 2008 - 2017. SASG merupakan perwakilan yang ditunjuk langsung Sekjen PBB untuk bertugas memediasi konflik Cypriots sehingga berwenang untuk bertindak sebagai *communicator*, *formulator*, dan *manipulator* sesuai dengan arahan atau berdasarkan hasil konsultasi dengan Sekjen PBB. Satu-satunya kelemahan SASG

adalah "minimnya" *leverage* yang dimiliki oleh SASG bersama Sekjen PBB untuk lebih mengendalikan jalannya mediasi konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa *status* cenderung tidak menyebabkan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017 karena tingginya *status* yang disandang oleh kedua SASG serta berada pada *rank* yang setara dengan perwakilan ROC, Turkish Cypriot, Yunani, Turki, dan Britania Raya walau minim kemampuan dalam menggerakkan PBB dalam mendukung aktivitasnya selama mediasi berlangsung.

5.1.4. *The International Context*

Dalam menganalisis *the international context* dalam suatu mediasi internasional, Kleiboer berpendapat bahwa *the international context* merupakan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi jalannya sebuah mediasi. Indikator variabel ini terdiri atas *the impact of other parties*, dan *the impact of other conflicts*. *The impact of other parties* berupa tekanan (e.g. politik dan ekonomi) yang dilancarkan aktor eksternal terhadap *disputants* sehingga memungkinkan untuk mendorong proses mediasi kearah yang positif atau negatif (mencapai / tidak mencapai resolusi konflik). Sedangkan *the impact of other conflicts* berupa konflik lain yang sedang dihadapi salah satu atau keseluruhan *disputants* sehingga mampu memicu mereka untuk memperlambat atau mempercepat proses mediasi.

5.1.4.1. *The Impact of Other Parties*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *the impact of other parties* mempunyai kecenderungan untuk menggagalkan mediasi apabila tidak terdapat aktor eksternal yang *powerful* dalam konflik (Kleiboer, 1996: 373 - 374).

Dalam konflik Cypriots, DK PBB mengintervensi Greek Cypriot, Turkish Cypriot dan *guarantors* selama puncak konflik Cypriots berlangsung (1964 - 1974). Seperti pada 9 Agustus 1964,

DK PBB meminta Turki untuk menghentikan serangan udaranya di Siprus sesegera mungkin. Intervensi juga terlihat pada anggota P-5 seperti Uni Soviet yang lebih mendukung pemerintahan Makarios III karena dipercaya mampu menjaga kemerdekaan dan gerakan non-blok Siprus atau AS melalui surat presiden Lyndon B. Johnson pada 5 Juni 1964 menyarankan agar Turki tidak menerjunkan pasukan ke Turki dan mengusulkan mediasi yang dipimpin AS dalam konflik Cypriots serta pada 1967 mediasi yang dilakukan AS melalui Cyrus Vance berhasil meyakinkan junta militer Yunani untuk menarik 10.000 pasukannya dari Siprus (Bölükbaşı, 1998: 419 - 420).

Namun selama periode 2008 - 2017 tidak terdapat dampak signifikan dalam bentuk semacam intervensi seperti itu baik yang dilakukan AS, NATO, atau DK PBB secara keseluruhan terhadap Greek Cypriot dan Turkish Cypriot mengingat baik ROC maupun *guarantors* (Yunani, Turki, dan Britania Raya) merupakan anggota dari NATO maupun PBB. Menurut penulis, intervensi wajib dilakukan untuk mendorong dianulirnya *Treaty of Guarantees* sehingga semua pasukan asing dapat ditarik dari Siprus dan mendorong ROC agar dapat menggunakan segenap SDA di wilayahnya secara independen (karena Turki mengeksplorasi SDA Siprus utara). Seperti pernyataan Sekjen Gutters dalam laporannya kepada DK PBB pada 28 September 2017 bahwa sebaiknya terdapat sebuah sistem keamanan baru bagi Siprus karena *Treaty of Guarantee* (terutama pasal IV) telah "usang" (UNSC, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *the impact of other parties* cenderung menyebabkan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

5.1.4.2. *The Impact of Other Conflicts*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *the impact of other conflicts* mempunyai kecenderungan untuk menggagalkan mediasi apabila tidak terdapat konflik lain yang sedang dihadapi salah satu atau keseluruhan *disputants* (Kleiboer, 1996: 374).

Dalam konflik Cypriots, penulis tidak menemukan adanya *other conflicts* (e.g. pemberontakan dalam negeri atau perang dengan negara lain) yang sedang dihadapi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot untuk mendorong mereka agar mempercepat terjadinya resolusi konflik. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa *the impact of other conflicts* cenderung menyebabkan untuk menjelaskan penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

5.2. Process Variable

Dalam menganalisis *process variable* dalam suatu mediasi internasional, Kleiboer berpendapat bahwa *process variable* merupakan variabel yang terkait dengan analisis perilaku mediator selama mediasi berlangsung. Penulis menggunakan *process variable* berdasarkan tipologi Zartman, yaitu: *Communicator*, *formulator*, dan *manipulator*. Namun, penulis hanya akan menggunakan *communicator* & *formulator* sebagai indikatornya mengingat keduanya cenderung menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots berdasarkan aktivitas SASG pada 2008 - 2017.

5.2.1. Communicator

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *communicator* mempunyai kecenderungan untuk menggagalkan mediasi apabila mediator tidak mampu bertindak sebagai pembuka kontak atau penyampai pesan, dan jembatan konsesi antar *disputants* (Kleiboer, 1996: 375).

Dalam konflik Cypriots, penulis melihat bahwa SASG Downer berhasil membangun kontak yang telah rusak selama 4 tahun pasca referendum 2004 antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot. Selain itu, penulis melihat bahwa SASG Downer dan Eide berhasil menjadi jembatan konsesi *disputants* melalui usaha-usaha yang mereka lakukan. Seperti Eide yang melakukan *shuttle diplomacy* untuk mempercepat terjadinya konsesi selama 2015 - 2017 (UNSC, 2017).

Penulis menyimpulkan bahwa *communicator* cenderung tidak menyebabkan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017 karena kedua SASG mampu bertindak sebagai

pembuka kontak atau penyampai pesan, dan jembatan konsesi antara Greek Cypriot dengan Turkish Cypriot selama mereka menjabat.

5.2.2. *Formulator*

Dalam tulisannya, Kleiboer menyatakan bahwa *formulator* mempunyai kecenderungan untuk menggagalkan mediasi apabila mediator tidak mampu mencari formula tepat penyelesaian konflik (Kleiboer, 1996: 375).

Dalam konflik Cypriots, walau negosiasi mencapai progres positif dalam beberapa hal seperti hak partisipasi politik, hak kepemilikan properti, dan HAM. Namun, tidak mencapai kata sepakat pada isu-isu krusial seperti *security* (e.g. penarikan mundur pasukan Turki dari Siprus) dan *guarantees* (e.g. apakah Siprus memerlukan bantuan Yunani-Turki-Britania Raya untuk menjaga keamanan negara). Hal tersebut menyebabkan kegagalan mediasi terakhir Cypriots di Crans Montana pada 28 Juni - 7 Juli 2017 (UNSC, 2017).

Penulis menyimpulkan bahwa *formulator* cenderung menyebabkan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017 karena SASG tidak mampu memaksimalkan perannya sebagai mediator untuk mencari formula tepat penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama 55 tahun ini.

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan terkait kesimpulan pembahasan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017 dengan menggunakan konsep determinan kesuksesan dan kegagalan mediasi milik Marieke Kleiboer. Penulis akan mencoba untuk menghubungkan antara rumusan masalah, konsep yang digunakan, dan pembahasan yang telah penulis jabarkan di bab sebelumnya. Skripsi bertipe deskriptif ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut: Apakah penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 – 2017? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis coba memasukkan variabel, sub-variabel, dan indikator yang cenderung menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots periode tersebut.

Variabel yang cenderung dapat menjelaskan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017 adalah *contextual & process variable*. Sub-variabelnya adalah *the characteristics of the dispute, the parties and their interrelationship, the characteristics of the mediator*, dan *the international context* di *contextual variable* serta *formulator* di *process variable*.

Sub-variabel *the characteristics of the dispute* mempunyai 2 indikator yang cenderung dapat menjelaskan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017, yaitu *conflict ripeness* dan *the nature of the issue(s) in conflict*.

Dalam *conflict ripeness*, *clock time* menjadi faktor yang lebih tepat untuk menjelaskan penyebab kegagalan mediasi Cypriots karena dengan rentangan konflik yang semakin panjang maka *disputants* semakin enggan untuk menyetujui hasil negosiasi atau bahkan menerima tawaran mediasi sehingga peluang untuk terjadinya resolusi konflik pun

semakin kecil. Hal ini terbukti karena mediasi PBB sejak 1964 tidak membuahkan hasil. Selama periode 2008 - 2017, beberapa kali momen *ripeness* yang ditandai oleh munculnya pemimpin-pemimpin dari partai tengah-kiri atau sayap kiri (e.g. Christofias dari AKEL / Akıncı dari TDP) namun mediasi tidak kunjung menemukan resolusi konflik hingga Konferensi Siprus yang diadakan di Crans Montana pada 28 Juni - 7 Juli 2017.

Dalam *the nature of the issue(s) in conflict*, isu ideologi dan *self-determination* menjadi 2 isu yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab kegagalan mediasi Cypriots karena kedua isu yang berakar dari perbedaan etnis, agama, kebudayaan yang berujung pada *enosis vs. taksim*. *Enosis vs. Taksim* telah menyebabkan mediasi berjalan stagnan selama 55 tahun. Seperti contoh, usulan parlemen ROC untuk menyetujui sebuah proposal mengenai diskusi *enosis* di literatur sekolah mendapat tantangan keras dari Turkish Cypriots hingga berkecambah surat kepada Sekjen Guterres untuk membatalkan negosiasi karena hal tersebut. Selain itu, pendekatan yang digunakan para pemimpin Turkish Cypriots mengenai posisi Turki sebagai "penjajah" ROC pun cukup lembut (mengingat Turki adalah "pembebas" mereka dari "pembunuh" Greek Cypriot). Hal ini tidak disukai oleh ROC sehingga menjadi salah satu penyebab kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

Sub-variabel *the parties and their interrelationship* mempunyai 1 indikator yang cenderung mampu menjawab rumusan masalah, yaitu *identification of parties*.

Dalam *identification of parties*, ketidakmampuan SASG untuk mengidentifikasi karakteristik dan ruang lingkup baik Greek Cypriot dan Turkish Cypriot yang dibuktikan dengan *blunder* SASG Downer sewaktu pertemuan perdana Christofias - Eroğlu pada 26 Mei 2010 dan kurang berhasilnya *shuttle diplomacy* ala SASG Eide selama menjabat menyebabkan kegagalan mediasi konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

Sub-variabel *the characteristics of the mediator* mempunyai 1 indikator yang cenderung dapat menjawab rumusan masalah, yaitu *leverage*. Dalam *leverage*, usaha-usaha baik yang dilakukan SASG untuk membwa mediasi menuju resolusi konflik tidak mendapatkan dukungan dari PBB sendiri (terkhusus DK PBB) sehingga menyebabkan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017. Terbukti, dari sekian banyak resolusi yang telah dikeluarkan DK PBB (e.g. Resolusi 360, 541, dan 1.250) terasa belum tepat untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 55 tahun. Seandainya SASG mendapatkan *leverage* yang cukup, terutama dari AS selaku negara adidaya dan Britania Raya selaku *guarantor* ROC. Kemungkinan keadaan akan berubah menjadi lebih baik.

Sub-variabel *the international context* mempunyai 2 indikator yang cenderung dapat menjawab rumusan masalah, yaitu *the impact of other parties* dan *the impact of other conflicts*.

Dalam *the impact of other parties*, tidak adanya intervensi aktor eksternal yang *powerful* seperti P-5 terhadap Greek Cypriot, Turkish Cypriot, dan *guarantors* menyebabkan kegagalan mediasi SASG dalam konflik Cypriots periode 2008 - 2017.

Dalam *the impact of other conflicts*, ketiadaan konflik lain yang sedang dihadapi Greek Cypriot dan Turkish Cypriot menyebabkan mereka fokus dalam menyelesaikan konflik tanpa terganggu oleh konflik lain. Idealnya, apabila terdapat konflik lain yang sedang dihadapi oleh keduanya. Terlebih konflik besar seperti perang dengan negara lain atau bencana alam hebat, kemungkinan besar fokus salah satu atau keseluruhan *disputants* akan terpecah sehingga harus memprioritaskan konflik yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ketika harus memprioritaskan salah satu konflik, pihak lawan mungkin dapat membaca situasi dan menawarkan proposal perdamaian yang lebih menguntungkan mereka. Disputant yang sedang kesulitan kemungkinan besar akan menerima tawaran

tersebut walau merugikan mereka karena akan sulit untuk menghadapi lebih dari 1 konflik besar secara bersamaan.

Sub-variabel *formulator* cenderung dapat menjawab rumusan masalah karena selama periode 2008 - 2017, SASG tidak mampu untuk mencari formula tepat penyelesaian konflik tersebut. Walau negosiasi mencapai progres positif dalam beberapa hal seperti hak partisipasi politik, hak kepemilikan properti, dan HAM. Namun, tidak mencapai kata sepakat pada isu-isu krusial seperti *security* (e.g. penarikan mundur pasukan Turki dari Siprus) dan *guarantees* (e.g. apakah Siprus memerlukan bantuan Yunani-Turki-Britania Raya untuk menjaga keamanan negara).

Menurut Kleiboer, kesuksesan mediasi ditentukan oleh ukuran besaran kombinasi *resources* (sumber daya / alat dukung) yang tersedia baginya dan *skills* (keterampilan) yang mereka gunakan. Artinya adalah *impartiality* (sikap netral) mediator dalam konflik tidak terlalu penting dalam menentukan mediasi, justru kemampuannya dalam memiliki *leverage* (daya tawar) lebih menentukan dalam rangka mendorong *disputants* agar mereka segera menyetujui proses dan perjanjian perdamaian. Sehingga, dengan analisisnya kegagalan mediasi diukur oleh kurangnya *resources* dan *skills* yang dimiliki mediator. Penulis melihat bahwa *skills* yang dimiliki SASG Downer dan Eide sudah cukup untuk merayu Greek Cypriot dan Turkish Cypriot maupun *guarantors* untuk duduk bersama selama mediasi konflik Cypriots periode 2008 - 2017 berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertemuan yang berlangsung dibawah arahan kedua SASG tersebut ditambah dengan *shuttle diplomacy* yang mereka lakukan selama periode mediasi. Namun, memang harus diakui bahwa *leverage* yang dimiliki kedua SASG tidak cukup karena kurang dukungan aktor eksternal yang *powerful* (e.g. AS). Namun, menarik untuk dilihat bahwa masalah terbesar dari konflik ini adalah bagaimana SASG kurang jeli dalam menganalisis isu ideologi dan *self-determination* yang telah menjadi inti konflik sejak 1963. Seandainya SASG lebih jeli menganalisis serta mencari formula yang tepat untuk mengatasi isu yang

dapat dikategorikan sebagai *intractable conflicts* karena bersifat *zero-sum* ini, kemungkinan besar konflik dapat teresolusi pada periode 2008 - 2017.

1.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan maupun data yang diberikan didalamnya. Oleh karena itu terdapat 2 hal yang penulis sarankan untuk dapat diperbaiki di penelitian selanjutnya.

Pertama, terkait studi kasus. Penulis mencermati bahwa tidak terdapat banyak akademisi ilmu HI yang memilih Siprus maupun konflik Cypriots dalam periode 2008 - 2017 sebagai pilihan dalam skripsi, jurnal, maupun publikasi ilmiah lainnya dalam penelitian. Hal ini berimbas pada terbatasnya pengetahuan yang dapat digali dari sektor tersebut. Penulis melihat perlunya konflik Cypriots dan upaya mediasinya untuk diangkat dalam studi HI di Indonesia, khususnya UB untuk memperluas wawasan mahasiswa HI UB sekaligus memberikan saran maupun solusi bagi upaya resolusi konflik tersebut.

Kedua, penulis menyadari bahwa rentang waktu yang penulis berikan adalah antara tahun 2008 - 2017, dimana pada periode tersebut upaya mediasi gencar dilakukan oleh *disputants* maupun mediator konflik Cypriots. Namun, hingga saat ini konflik belum teresolusi sehingga penulis menyarankan agar dalam penelitian selanjutnya mahasiswa HI UB lainnya dapat melakukan penelitian serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan terbaru demi kepentingan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armed Forces. (n.d.). *Cyprus*. Retrieved from European Defence Information:
<http://www.armedforces.co.uk/Europeandefence/edcountries/countrycyprus.htm>
- Bercovitch, J., & Rubin, J. Z. (1992). *Mediation in International Relations: Multiple Approaches to Conflict Manage*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bölükbaşı, S. (1998, Agustus). The Cyprus Dispute and the United Nations: Peaceful Non-Settlement between 1954 and 1996. *International Journal of Middle East Studies*, 30(3), 411-434.
- Cyprus Mail. (2016, November 19). *Public opinion: "Can we trust the Turks?"*. Retrieved from Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=HtFewXPIDFY>
- Cyprus Mail. (2016, November 26). *Public opinion: "Can we trust the Greek Cypriot?"*. Retrieved from Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=JgMAm2j2cG4>
- Cyprus Mail. (2016, Desember 2016). *The Players: 13 Espen Barth Eide*. Retrieved from Cyprus Mail Online: <http://cyprus-mail.com/2016/12/29/players-espen-barth-eide/>
- Cyprus Mail. (2017, Maret 27). *Turkish troops could be a fraction of the 40,000 claimed*. Retrieved from Cyprus Mail: <https://cyprus-mail.com/2017/03/27/turkish-troops-fraction-40000-claimed/>
- Daily Sabah. (2015, Desember 2015). *Turkish, Greek leaders release joint New Year's message, point to peace in Cyprus*. Retrieved from Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=0JhOJSTPYug>
- Fisher, R. J. (2001a). Cyprus: The Failure of Mediation and the Escalation of an Identity-Based Conflict to an Adversarial Impasse. *Journal of Peace Research*, 38(3), 310. Retrieved from
http://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss/files/Fisher_Cyprus_Escalation_of_an_identity
- Fisher, R. J. (2001b). *Methods of Third-Party Intervention*. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- Global Peace Operations Review. (2014, 2012). *Cyprus*. Retrieved from
http://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2014/12/2010_cyprus_boxtext.pdf
- Goult, H. W. (2018, July 24). *Cyprus*. Retrieved from Encyclopedia Britannica:
<https://www.britannica.com/place/Cyprus>
- Greig, J. M., & Diehl, P. F. (2012). *International Mediation*. Cambridge: Polity Press.

- Hürriyet Daily News. (2017, Februari 16). *Cyprus talks break up over 'Enosis' row*. Retrieved from Hürriyet Daily News: <http://www.hurriyetaidailynews.com/cyprus-talks-break-up-over-enosis-row-109849>
- Ikbar, Y. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Karyos, A. (2009). *EOKA and Enosis in 1955-59: Motive and Aspiration Reconsidered*.
- Ker-Lindsay, J. (2004). *Britain and the Cyprus Crisis, 1963-64*. London: The London School of Economics and Political Science.
- Kleiboer, M., & Hart, P. ' (1995). Time to Talk? Multiple Perspectives on Timing of International Mediation. *Cooperation and Conflict*, 30(4), 321.
- Kleiboer, M. (1996, Juni). Understanding Success and Failure of International Mediation. *The Journal of Conflict Resolution*, 40(2), 360-376.
- Mallinson, W. (2011). *Cyprus: A Historical Review*. (M. Miltiadou, Ed.) Nicosia: The Press and Information Office, Republic of Cyprus.
- Mas' oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: LP3ES.
- Michael, E. A. (2012). *Peacemaking in Cyprus: 1955 - 2012*. Fairfax, Virginia: George Mason University.
- Morelli, V. L. (2018). *Cyprus: Reunification Proving Elusive*. Washington, D.C.: Congressional Research Service.
- Neuman, W. L. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Republic of Turkey: Ministry of Foreign Affairs. (2011). *Cyprus*. Retrieved from Republic of Turkey: Ministry of Foreign Affairs: <http://www.mfa.gov.tr/the-cyprus-issue-overview.en.mfa>
- Resolutions, S/RES/364 (UNSC Desember 13, 1974).
- Resolutions, S/RES/1818 (UNSC Juni 13, 2008).
- Reuters. (2008, September 3). *Rival Cyprus leaders launch reunification talks*. Retrieved from <https://uk.reuters.com/article/uk-cyprus-talks-idUKL331378220080903>
- Security Council Report. (n.d.). *Chronology of Events: Cyprus*. Retrieved from <https://www.securitycouncilreport.org/chronology/cyprus.php?page=all&print=true>
- Siniver, A. (2006). Power, Impartiality and Timing: Three Hypotheses on Third Party Mediation in the Middle East. *Political Studies Association*, 54(4), 806-826.

- SIPRI. (n.d.). *Espen Barth Eide*. Retrieved from SIPRI:
<https://www.sipri.org/about/bios/espen-barth-eide>
- The Guardian. (2004, April 23). *Cyprus split on Annan plan*. Retrieved from The Guardian:
<https://www.theguardian.com/world/2004/apr/23/cyprus.georgewright>
- TRNC. (2018, Juli 4). *Guterres appointed Lute*. Retrieved from Turkish Cypriot Public Information Office: <http://pio.mfa.gov.ct.tr/en/guterres-appointed-lute/>
- UN. (2014, Agustus 22). *Secretary-General Appoints Espen Barth Eide of Norway as Special Adviser on Cyprus*. Retrieved from UN: Meeting Coverage and Press Releases:
<https://www.un.org/press/en/2014/sga1498.doc.htm>
- UNDPA. (2011). *Guidelines: Mediation Start-up*. New York: UNDPA.
- UNSC. (2016, Januari 7). *Report of the Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus*. New York: UN.
- UNSC. (2017). *Report of the Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus*. New York: UN.
- Zartman, I. W. (2008). *Negotiation and Conflict Management*. London & New York: Routledge.
- Zenelaj, R., Beriker, N., & Hatipoglu, E. (2015, Mei 12). Determinants of mediation success in post-conflict Bosnia: a focused comparison. *Australian Journal of International Affairs*, 69(4), 414-437.